

# DEFINISI DAN PEMETAAN DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA

ANALISIS PERJANIJAN EKONOMI INTERNASIONAL,  
FORUM INTERNASIONAL, DAN STRATEGI PENGUATAN  
DIPLOMASI EKONOMI DI MASA PANDEMI





# DEFINISI DAN PEMETAAN DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA: ANALISIS PERJANIJAN EKONOMI INTERNASIONAL, FORUM INTERNASIONAL, DAN STRATEGI PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI DI MASA PANDEMI



Makalah Kebijakan CSIS Indonesia

Didukung oleh:

**Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama  
Pembangunan Internasional, Kementerian  
PPN/Bappenas**

Disusun oleh:

Shafiah F. Muhibat  
Rocky Intan

*Saran Pengutipan*

Muhibat, Shafiah F dan Rocky Intan. "Definisi dan Pemetaan Diplomasi Ekonomi Indonesia: Analisis Perjanjian Ekonomi Internasional, Forum Internasional, dan Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi di Masa Pandemi". Makalah Kebijakan CSIS. Jakarta: CSIS Indonesia.

Laporan Riset CSIS Indonesia merupakan sarana bagi para peneliti yang terafiliasi dengan Centre for Strategic and International Studies untuk mendiseminasi temuan-temuan riset dan bertukar ide.

Laporan riset ini menerima masukan yang dapat ditujukan ke para penulis. Pandangan dalam riset ini merupakan pendapat pribadi, dan tidak mewakili pandangan lembaga CSIS Indonesia.



Studi ini dilakukan oleh CSIS Indonesia bekerjasama dengan Direktorat Politik Luar Negeri dan Kerjasama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas pada periode April-Agustus 2020.



CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES

# DAFTAR ISI

<u>I. PENDAHULUAN</u>	1
<u>II. DIPLOMASI EKONOMI: DEFINISI DAN RUANG LINGKUP</u>	3
II.1. KAJIAN LITERATUR	3
II.2. TELAAH DOKUMEN	7
II.3. TELAAH PERNYATAAN RESMI DAN LIPUTAN MEDIA	10
II.4. PENUTUP	13
<u>III. PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN</u>	15
III.1. KATEGORI PEMANGKU KEPENTINGAN DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA	29
III.1.1 PELAKSANA TEKNIS DIPLOMASI EKONOMI .....	31
III.1.2 PERUMUS KEBIJAKAN DIPLOMASI EKONOMI .....	34
III.1.3 PENDUKUNG DIPLOMASI EKONOMI .....	35
III.1.4. K/L SEKTOR TERKAIT.....	36
III.2. PENUTUP	38
<u>IV. EFEKTIVITAS PERJANJIAN INTERNASIONAL</u>	39
IV.1. FORMULASI PENILAIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	42
IV.1.1 PERTIMBANGAN EKONOMI.....	43
IV.1.2 PERTIMBANGAN STRATEGIS.....	45
IV.2. STUDI KASUS 1: IA-CEPA	46
IV.3. STUDI KASUS 2: RCEP	53
IV.4. PENUTUP	60
<u>V. ANALISIS KETERLIBATAN INDONESIA DI FORUM INTERNASIONAL</u>	62
V.1. STUDI KASUS: G20	66
V.1.1 G20 DAN INDONESIA.....	67
V.1.2 KESEMPATAN INDONESIA DI G20 .....	70
V.1.3 TANTANGAN INDONESIA DI G20 .....	72
V.2. PENUTUP	73
<u>VI. STRATEGI PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI DI TENGAH PANDEMI</u>	75

VI.1. DAMPAK PANDEMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI	76
VI.2. DAMPAK PANDEMI TERHADAP DINAMIKA INTERAKSI ANTAR NEGARA & EKONOMI INTERNASIONAL	77
VI.3. LANGKAH PRIORITAS DAN ANTISIPASI TANTANGAN DALAM DIPLOMASI EKONOMI	79
VI.4. WACANA DIPLOMASI EKONOMI DI MASA PANDEMI: TELAAH MEDIA	81
VI.5. STRATEGI PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI	83
VI.6. PENUTUP	89
<b>VII. PENUTUP DAN REKOMENDASI</b>	<b>90</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN 1</b>	<b>103</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

Presiden Joko “Jokowi” Widodo tengah mengedepankan diplomasi ekonomi sebagai salah satu motor pembangunan ekonomi Indonesia. Ada tiga sektor yang menjadi arahan Presiden dalam diplomasi ekonomi, yaitu perdagangan, investasi, dan pariwisata.

Pada tanggal 9 Januari 2020 dilangsungkan Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI (Raker Keppri), yang diberi tajuk “Memenangkan Diplomasi Ekonomi di Tengah Tantangan Global.” Pada rapat tersebut, Presiden Jokowi telah memberikan arahan bahwa seluruh Perwakilan RI perlu fokus kepada diplomasi ekonomi diwujudkan dengan penggerahan 70-80% dari sumber daya yang ada.

Ada beberapa poin menarik yang dapat digarisbawahi dari rapat ini. Pertama, dampak dari perang dagang yang telah berlangsung selama 2 tahun terhadap perdagangan internasional. Kedua, kampanye hitam dan kebijakan diskriminatif di Uni Eropa terhadap penggunaan kelapa sawit mendorong Indonesia untuk menemukan pasar alternatif dalam mempromosikan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor yang paling unggul bagi Indonesia. Ketiga, Indonesia perlu mengantisipasi bahaya serangan siber (*cyber attacks*) bagi *e-commerce* dan *e-governance*. Keamanan siber merupakan salah satu aspek yang menjadi keprihatinan bersama mengingat adanya kasus-kasus kejahatan siber yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam *e-commerce*.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diplomasi ekonomi yang belum optimal disebut sebagai salah satu faktor kinerja ekspor Indonesia yang lesu.<sup>1</sup> Beberapa isu yang menyebabkan ini antara lain adalah belum terpadunya kebijakan dan koordinasi ekonomi, belum optimalnya kapasitas aparatur pelaksana diplomasi ekonomi, dan belum harmonisnya peraturan dalam negeri yang menghambat pelaksanaan perundingan perjanjian perdagangan; dan belum memadainya koordinasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendorong diplomasi ekonomi yang efektif. Selain itu, penguatan diplomasi

---

<sup>1</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, hal. 42.

juga disebutkan sebagai salah satu kebijakan yang dapat meningkatkan nilai tambah ekspor dan menguatkan tingkat kandungan dalam negeri.<sup>2</sup>

Diplomasi ekonomi Indonesia melibatkan sejumlah kementerian/lembaga (K/L) pelaksana, antara lain Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Kementerian Perindustrian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan perwakilan resmi Indonesia di berbagai negara. Peran para pemangku kepentingan ini tentunya beragam, tapi belum ada pendefinisian yang jelas mengenai pembagian tersebut.

Meski terminologi diplomasi ekonomi kian jamak digunakan oleh pemerintah, masih terdapat kerancuan dalam hal definisi, terutama bila kita bandingkan penggunaannya dalam berbagai pustaka yang ada. Dengan demikian, sangat penting untuk mendefinisikan secara jelas apa yang dimaksud dengan diplomasi ekonomi, dan memetakan para pemangku kepentingan yang memiliki tugas dan peran dalam diplomasi ekonomi Indonesia.

Selain itu, isu yang juga penting untuk dikaji adalah keterlibatan Indonesia dalam berbagai forum internasional dan perjanjian ekonomi internasional yang mendukung diplomasi ekonomi. Penting untuk memahami efektivitas dari forum dan perjanjian internasional yang Indonesia sepakati; apakah terdapat hambatan atau tantangan bagi diplomasi ekonomi di dalamnya.

Makalah kebijakan ini bertujuan untuk: (1) mendefinisikan diplomasi ekonomi sesuai dengan arahan Presiden Republik Indonesia, yang meliputi tujuan dan ruang lingkup diplomasi ekonomi; (2) melakukan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang mendukung diplomasi ekonomi Indonesia; (3) melakukan analisis perjanjian internasional yang telah dilaksanakan maupun yang tengah dalam proses perundingan; (4) melakukan analisis forum internasional terkait diplomasi ekonomi di mana Indonesia terlibat; dan (5) melakukan analisis mengenai strategi penguatan diplomasi ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Makalah kebijakan ini diakhiri dengan penutup dan rekomendasi.

---

<sup>2</sup> RPJMN 2020-2024, hal. 53.

## BAB II

# DIPLOMASI EKONOMI: DEFINISI DAN RUANG LINGKUP

Terminologi Diplomasi Ekonomi kian jamak digunakan di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat perbedaan definisi dan pemahaman yang dimiliki berbagai pemangku kepentingan. Bab ini bertujuan mengkaji definisi ekonomi yang umum digunakan berdasarkan kajian literatur, dan definisi ekonomi yang dipahami di Indonesia, sebagaimana diujarkan oleh Presiden Joko Widodo dan pemangku kepentingan lainnya dan definisi dalam beberapa dokumen kebijakan.

### II.1. KAJIAN LITERATUR

Diplomasi dalam pengertian klasik dapat dipahami sebagai sarana negara mencapai tujuan kebijakan luar negerinya (Berridge dan James, 2001), dan hubungan antarnegara dan entitas politik dunia lainnya melalui agen resmi dan cara damai (Bull, 1995). Bila menggunakan stereotipe dalam pengertian klasik tersebut, maka diplomasi dilakukan oleh diplomat dan Kementerian Luar Negeri. Akan tetapi, stereotipe dan definisi klasik ini tidak berlaku bagi diplomasi ekonomi; justru, seperti yang ditegaskan oleh Bayne dan Woolcock (2017) ruang lingkup dan substansi diplomasi ekonomi lebih luas dan bermakna.

Mendefinisikan diplomasi ekonomi dilakukan dengan memahami elemen-elemen di dalamnya, yaitu tujuan, aktor, dan instrumen. Dari aspek tujuan, ada dua tujuan utama diplomasi ekonomi yaitu tujuan ekonomi dan tujuan politik/strategis. Dari kajian literatur yang dilakukan oleh studi ini, maka ada dua pemahaman mengenai diplomasi ekonomi, yaitu yang secara luas mencakup kedua tujuan tersebut, dan yang lebih sempit bertujuan utama kepentingan ekonomi negara.

Berridge dan James (2001) dan Baldwin (1985) cenderung mendefinisikan diplomasi ekonomi secara luas, yaitu mencakup tujuan ekonomi dan politik/strategis. Berridge dan James memandang bahwa diplomasi ekonomi melibatkan pemanfaatan sumber daya ekonomi untuk mencapai suatu tujuan kebijakan luar negeri. Baldwin, dengan pemahaman yang sama,

menggunakan istilah *economic statecraft* untuk menggambarkan penggunaan strategis sanksi ekonomi positif dan negatif untuk mendorong negara atau aktor lain untuk bekerja sama.

Masih dalam pemahaman diplomasi ekonomi yang luas, Maaike Okano-Heijmans (2013) menjelaskan bahwa diplomasi ekonomi adalah penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai stabilitas politik negara dan juga penggunaan instrumen politik dalam negosiasi internasional dengan tujuan meningkatkan perekonomian sebuah negara. Ini berarti instrumen dan tujuan akhir bisa kedua-duanya, ekonomi dan politik. Okano-Heijmans juga menuturkan bahwa dalam diplomasi ekonomi, kepentingan politik dan ekonomi seringkali berjalan secara bersama-sama bahkan saling mempengaruhi.

Pemahaman kedua, yang lebih sempit, mengedepankan tujuan ekonomi. Berridge dan James menyebut ini bukan diplomasi ekonomi, tapi diplomasi komersial, yang berfokus pada pekerjaan misi-misi diplomatik yang mendukung sektor bisnis dan keuangan negara guna mencapai kesuksesan ekonomi dan tujuan pembangunan ekonomi secara umum. Menurut Scholte (2000), aspek penting dari kegiatan diplomasi komersial adalah menyediakan informasi mengenai kesempatan investasi dan ekspor, dan menjembatani bisnis di negara asal dan negara tuan rumah. Sedangkan menurut Naray (2012), aktivitas promosi bisnis antara perwakilan diplomatik resmi dari negara pengirim dan penerima merupakan esensi dari diplomasi komersial. Pemahaman tujuan ekonomi ini secara garis besar sejalan dengan visi Presiden Jokowi yang mengarah pada penggunaan instrumen politik untuk mencapai tujuan ekonomi. Dalam Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI tanggal 12 Februari 2018, misalnya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya para diplomat untuk meningkatkan akses produk ekspor Indonesia ke- dan investasi dari pasar-pasar non-tradisional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pemahaman yang sama juga tercermin dari definisi diplomasi ekonomi yang ditemukan dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri (Renstra Kemlu) 2015-2019, di mana diplomasi ekonomi didefinisikan sebagai: “*pemanfaatan alat politik internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti pembangunan (termasuk kesehatan, pendidikan, dan pertanian), energi, lingkungan hidup, keuangan, dan pangan.*”

Dari perspektif aktor pelaksana diplomasi ekonomi, secara konvensional aktor diplomasi tentunya adalah Kementerian Luar Negeri suatu negara beserta dengan misi diplomatiknya. Tetapi untuk diplomasi ekonomi, aktor dan pemangku kepentingan meluas jauh lebih banyak. Poonam Barua (2006) secara spesifik menempatkan diplomasi ekonomi dalam konteks ekonomi baru yang melibatkan aktor-aktor baru yaitu organisasi non-pemerintah, lembaga kajian/penelitian, dan perusahaan multi-nasional yang memiliki tujuan mempengaruhi kebijakan negara. Literatur lain, yaitu Kishan S. Rana (2013) secara khusus menekankan keterlibatan aktor-

aktor penting dari sektor bisnis dalam pertemuan yang membahas diplomasi ekonomi. Aktor-aktor tersebut juga harus dilibatkan dalam pertemuan dengan negara lain ketika membahas diplomasi ekonomi. Sektor swasta merupakan elemen penting dalam pelaksanaan dan kesuksesan diplomasi ekonomi.

Dari perspektif instrumen yang digunakan, diplomasi ekonomi meliputi instrumen luas, baik secara multilateral maupun bilateral, dan meliputi seluruh spektrum mulai dari negosiasi informal dan kerja sama sukarela hingga dibentuknya peraturan dan kesepakatan yang mengikat. Woolcock dan Bayne (2017) menitikberatkan perjanjian multilateral sebagai instrumen utama diplomasi ekonomi untuk mencapai kepentingan negara. Yakop dan Van Bergeijk (2011) menjelaskan bahwa misi luar negeri dan kedutaan merupakan instrumen diplomasi ekonomi untuk meningkatkan laju perdagangan karena hal tersebut dapat mempermudah alur eksport-impor dan mengurangi risiko bagi pihak bisnis.

## II. 2. TELAAH DOKUMEN

*Dokumen kebijakan pertama* yang penting untuk ditelaah adalah Undang-Undang No. 37 tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri (UU Hublu). UU Hublu dikeluarkan dengan dilandasi pemikiran bahwa penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri memerlukan ketentuan-ketentuan yang secara jelas mengatur segala aspek yang menyangkut sarana dan mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut. Kebijakan yang diatur dalam UU ini diantaranya adalah:

1. Penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri, termasuk sarana dan mekanisme pelaksanaannya, koordinasi di pusat dan perwakilan, wewenang dan pelimpahan wewenang dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri dan pelaksanaan politik luar negeri.<sup>3</sup>
2. Ketentuan-ketentuan yang bersifat pokok mengenai pembuatan dan pengesahan perjanjian internasional, yang pengaturannya secara lebih rinci, termasuk kriteria perjanjian internasional yang pengesahannya memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, ditetapkan dengan undang-undang tersendiri.<sup>4</sup>
3. Perlindungan kepada warga negara Indonesia, termasuk pemberian bantuan dan penyuluhan hukum, serta pelayanan konsuler.<sup>5</sup>
4. Aparatur hubungan luar negeri.<sup>6</sup>

Dari hal-hal yang diatur dalam UU ini, diplomasi ekonomi belum menjadi bagian di dalamnya. Istilah kebijakan luar negeri tidak jamak digunakan dalam dokumen ini, dan justru istilah “politik luar negeri” yang digunakan. Ini menandakan bahwa hubungan luar negeri lebih dipandang sebagai bagian dari politik, dan tidak dikaitkan dengan bidang-bidang lain, seperti ekonomi atau budaya. Bahkan, bila dilakukan pencarian kata “ekonomi” atau “perdagangan” dalam dokumen ini, tidak ada hasil yang ditemukan.

---

<sup>3</sup> Undang-Undang No. 37 tahun 1999, Bab II

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 37 tahun 1999, Bab III

<sup>5</sup> Undang-Undang No. 37 tahun 1999, Bab V

<sup>6</sup> Undang-Undang No. 37 tahun 1999, Bab VII

Ketika Pemerintah mulai menggalakkan diplomasi ekonomi melalui pernyataan dari Presiden ditambah dengan Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri yang sejak lima tahun terakhir selalu memasukkan diplomasi ekonomi sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri, upaya ini belum diiringi oleh penyesuaian pada dokumen hukum yaitu UU Hublu yang melandasi kebijakan luar negeri.

Pada bulan September 2019, Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Hubungan Luar Negeri.<sup>7</sup> Dalam naskah tersebut juga disebut bahwa UU Hublu belum mengatur secara jelas mengenai mekanisme koordinasi penyelenggaraan diplomasi ekonomi, yang berarti diakuinya ini menjadi kekurangan UU Hublu yang sejak 1999 belum diperbaharui. Bab III dari UU Hublu memang mengatur mengenai Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional, tetapi pengaturannya sangat umum dan hanya melibatkan Kemlu saja tanpa ada pengaturan mengenai koordinasi dengan K/L lain, yang seyogyanya pasti dilakukan dalam hal perjanjian perdagangan internasional.

*Dokumen kedua* yang menjadi acuan adalah Peraturan Presiden RI No 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri. Dalam PP ini dicantumkan tupoksi Kementerian Luar Negeri, antara lain:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;
4. Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri.

Dalam PP ini ditetapkan posisi Staf Ahli bidang Diplomasi Ekonomi, dengan tugas: "memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait dengan bidang diplomasi ekonomi." Namun tidak ada elaborasi lebih lanjut mengenai diplomasi ekonomi itu sendiri.

*Dokumen ketiga* adalah Undang-Undang No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, di mana Bab XII (Pasal 82 sampai dengan 87) mengatur mengenai kerja sama perdagangan internasional. Pasal 82 menyebutkan:

---

<sup>7</sup> Pusat PUU BK DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri," 25 September 2019, <http://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-66.pdf>

1. Untuk meningkatkan akses Pasar serta melindungi dan mengamankan kepentingan nasional, Pemerintah dapat melakukan kerja sama Perdagangan dengan negara lain dan/atau lembaga/organisasi internasional.
2. Kerja sama Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui perjanjian Perdagangan internasional.

Sedangkan Pasal 83 menyebutkan: Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat.

Satu hal menarik di sini adalah pembuatan perjanjian perdagangan internasional adalah merupakan salah satu bentuk konkret pelaksanaan politik luar negeri melalui diplomasi ekonomi, yang seperti dijelaskan sebelumnya tidak ada pengaturannya secara khusus dalam UU Hublu, terutama mengenai koordinasi dengan K/L lain. Sedangkan, menurut UU No. 7 tahun 2014 perjanjian perdagangan internasional menjadi bagian dari hal yang diatur dalam konteks Perdagangan.

Dari tiga dokumen di atas (UU Hublu, PP No. 56 tahun 2015, dan UU No. 7 tahun 2014), tidak ada definisi diplomasi ekonomi maupun diplomasi perdagangan yang diberikan. Definisi diplomasi ekonomi baru ditemukan di dua dokumen berikutnya di bawah ini.

*Dokumen keempat* adalah Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri 2015-2019, yang seperti telah disebutkan di atas, memberikan definisi diplomasi ekonomi sebagai: “pemanfaatan alat politik internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti pembangunan (termasuk kesehatan, pendidikan, dan pertanian), energi, lingkungan hidup, keuangan, dan pangan.”

*Dokumen kelima* terkait perumusan kebijakan diplomasi ekonomi adalah RPJMN 2020-2024. Kajian ini menemukan bahwa, sesuai dengan arahan dari Presiden, diplomasi ekonomi disebutkan dalam RPJMN sebagai upaya negara untuk meningkatkan ekspor dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan investasi (pembentukan modal tetap bruto) dari swasta baik asing maupun dalam negeri terutama didorong untuk bertumbuh 6,88-8,11% tiap tahunnya melalui kebijakan-kebijakan seperti deregulasi prosedur dan harmonisasi peraturan perizinan, dengan menggarisbawahi perbaikan posisi Indonesia di peringkat *Ease of Doing Business*.<sup>8</sup> Untuk peningkatan ekspor, strategi akan difokuskan pada: 1) peningkatan ekspor produk manufaktur berteknologi menengah dan tinggi melalui rantai pasokan global

---

<sup>8</sup> RPJMN 2020-2024, hal. 13.

(*global supply chain*) dan 2) perluasan pangsa ekspor di pasar-pasar non-tradisional, seperti di kawasan Afrika, Amerika Latin, dan Eropa Timur.<sup>9</sup>

Terdapat beberapa hal yang saat ini perlu digarisbawahi dalam RPJMN 2020-2024 terkait diplomasi ekonomi. Pertama, dalam peningkatan ekspor, RPJMN memberikan fokus pada peningkatan pada produk bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). Salah satu kebijakan yang digarisbawahi untuk mencapai ini adalah meningkatkan efektivitas diplomasi ekonomi dan perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement*, FTA).<sup>10</sup> Untuk itu, RPJMN memberikan target peningkatan untuk jumlah sektor prioritas yang difasilitasi investasi dalam jaringan produksi global dari 3 sektor di tahun 2020 menjadi 5 sektor di 2024.<sup>11</sup> Dalam lampiran penjelasan, matriks pembangunan RPJMN menetapkan target produk industri yang mendapatkan sertifikasi TKDN meningkat setiap tahun 500 dari 6.000 di tahun 2020 hingga 8.000 di tahun 2024.<sup>12</sup>

Kedua, sektor pariwisata juga didorong sebagai sumber pendapatan devisa dalam RPJMN. Selain mendorong diversifikasi wisatawan asing dari Bali, kebijakan juga didukung untuk mendorong keberlanjutan pariwisata di Bali dan penguatan 11 destinasi potensial seperti Sabang, Padang-Bukittinggi, Batam-Bintan, Raja Ampat, dan lain-lain.<sup>13</sup> Untuk itu, RPJMN menargetkan Indonesia untuk memperbaiki peringkatnya di *Travel and Tourism Competitiveness Index* pada peringkat 40 di tahun 2020 menjadi peringkat 29-34 di tahun 2024.<sup>14</sup> Namun, tidak ada target peningkatan untuk jumlah promosi *tourism, trade, and investment* (TTI) terintegrasi dari 8 promosi terintegrasi di tahun 2020 hingga 2024.<sup>15</sup>

Ketiga, RPJMN juga menekankan aspek kerja sama pembangunan internasional sebagai salah satu cara untuk mendukung peningkatan perdagangan dan investasi, terutama pada penguatan pelaksanaan Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Dari sisi pendanaan, RPJMN menegaskan perlunya penggunaan lebih atas skema kredit ekspor melalui pelibatan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dan sektor swasta, terutama melalui skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBUs). Dari sisi kelembagaan, perlu digarisbawahi juga ‘pembentukan mekanisme dan pengelolaan pendanaan satu pintu’. Belum jelas bagaimana kaitan aspirasi ini

---

<sup>9</sup> RPJMN 2020-2024, hal. 54.

<sup>10</sup> RPJMN 2020-2024, hal. 53.

<sup>11</sup> RPJMN 2020-2024, hal. 48.

<sup>12</sup> Perpres No. 18/2020, Lampiran III

<sup>13</sup> RPJMN 2020-2024, hal. 52.

<sup>14</sup> RPJMN 2020-2024, hal. 49.

<sup>15</sup> RPJMN 2020-2024, hal. 49.

dengan pembentukan dari Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Internasional Indonesia atau LDKPI (*Indonesian Agency for International Development*, Indonesia AID). Dalam lampiran RPJMN, matriks pembangunan RPJMN menetapkan 8 target jumlah program untuk periode ini.<sup>16</sup> Dalam mengukur kesuksesan pembangunan politik luar negeri, RPJMN 2020-2024 mencatat tercapainya target program KSST di tahun 2015-2019 menjadi total 193 program dari 66 di periode sebelumnya.<sup>17</sup>

### II.3. TELAAH PERNYATAAN RESMI DAN LIPUTAN MEDIA

Studi ini melakukan pelacakan atas pernyataan pejabat dan K/L di Indonesia dengan periode mulai dari bulan Oktober 2014 (yaitu ketika periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo dimulai) sampai dengan Agustus 2020 (yaitu batas akhir pelaksanaan studi ini). Pelacakan dilakukan atas pengujuran ungkapan kunci ‘diplomasi ekonomi’ dan/atau ‘diplomasi perdagangan’, pengujar, waktu dan tempat spesifik, dan kutipan kalimat secara lengkap. Grafik 2.1 menunjukkan jumlah acuan per tahunnya berdasarkan hasil pelacakan yang dilakukan.

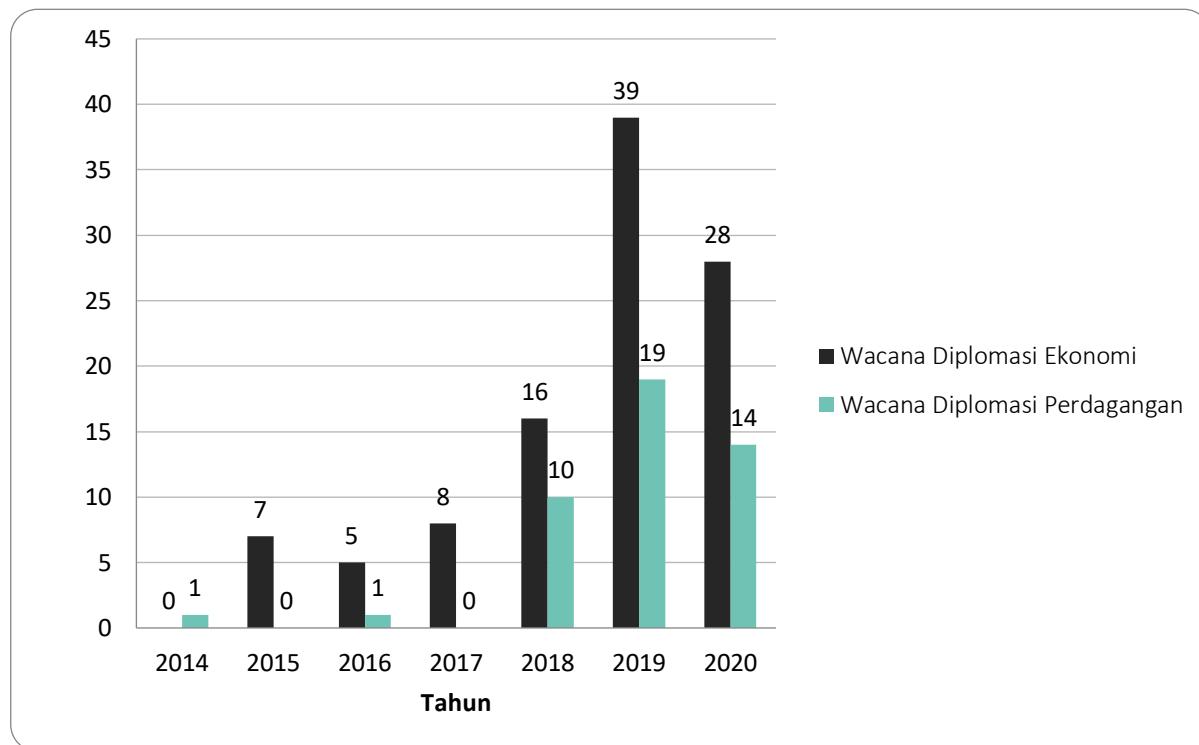
Pada tahun awal periode pertama pemerintahan Jokowi, wacana diplomasi ekonomi jarang diutarakan oleh pejabat dan K/L. Pada tahun 2014, Presiden Jokowi mengutarakan ‘geoekonomi’ di Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur di Myanmar. Dalam konferensi tersebut, presiden menyebutkan geoekonomi dalam konteks perubahan strategis di kawasan dan menegaskan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Telaah media menemukan bahwa ungkapan ‘diplomasi ekonomi’ dalam makna yang kita pahami sekarang mulai digunakan oleh Kemlu pada tahun 2015, terkait pemberitaan penunjukkan 11 menteri dan kepala badan **sebagai** penghubung investasi Indonesia dengan beberapa negara mitra, dan dengan jelas mulai diutarakan bahwa diplomasi ekonomi merupakan bagian dari tugas Kemlu.

---

<sup>16</sup> RPJMN 2020-2024, hal. 230.

<sup>17</sup> RPJMN 2020-2024, hal. 212.

Grafik 2.1 Wacana Diplomasi Ekonomi Indonesia Era Kepemimpinan Joko Widodo (Oktober 2014 – Agustus 2020)



Sumber: Data olahan dari berbagai sumber media (lihat Lampiran 1)

Pengujaran wacana diplomasi ekonomi lalu perlahan meningkat dari tahun 2017 hingga 2019, menjelang kampanye pemilihan presiden di tahun yang sama. Presiden Jokowi sendiri pertama berujar ‘diplomasi ekonomi’ di tahun ini, dalam konteks meningkatkan ekspor Indonesia. Di akun Facebook resmi miliknya, presiden menggarisbawahi penjualan pesawat CN235 produksi PT Dirgantara Indonesia ke Angkatan Udara Senegal. Selain itu, PT Dirgantara Indonesia juga berhasil mengekspor pesawat produksinya ke Thailand dan Korea Selatan. Presiden juga melanjutkan kesuksesan ekspor PT Industri Kereta Api (INKA) menembus pasar Bangladesh, dengan pengiriman 150 gerbang kereta ke Dhaka.

Puncak pengujaran terjadi di tahun 2019 ketika, sesuai arahan presiden, Kementerian Luar Negeri menjadikan diplomasi ekonomi sebagai prioritas Politik Luar Negeri Indonesia di periode kedua pemerintahan Jokowi. Memasuki 2020, bersamaan dengan dilangsungkannya Raker Keppri yang bertajuk “Memenangkan Diplomasi Ekonomi di Tengah Tantangan Global,” media

cukup banyak mengulas hal ini. Setelah itu, penurunan pengujaran terjadi seiring dengan pemberitaan yang didominasi oleh pandemi COVID-19, konflik di Laut Tiongkok Selatan, dan repatriasi warga negara Indonesia simpatisan ISIS. Pengujaran mulai terlihat signifikan penggunaannya pada Mei 2020, yakni mulai dikaitkan dengan strategi pemerintah meminimalkan dampak ekonomi dari pandemi.<sup>18</sup>

Tabel 2.2 menunjukkan pejabat yang paling banyak mengutarakan wacana diplomasi ekonomi adalah Kementerian Luar Negeri, diikuti dengan Kementerian Perdagangan. Presiden Joko Widodo juga dalam beberapa kesempatan mengujarkan ide-ide terkait diplomasi ekonomi.

**Tabel 2.2 Ujaran Diplomasi Ekonomi oleh Pemangku Kepentingan  
Oktober 2014 s/d Agustus 2020**

No.	Pengajar	Jumlah Ujaran
1	Kementerian Luar Negeri	76
2	Kementerian Perdagangan	13
3	Presiden Joko Widodo	9
4	Kementerian Pertanian	8
5	Komite Ekonomi dan Industri Nasional	5
6	Pelaku/Asosiasi dari berbagai bidang usaha	5
7	Kementerian PPN/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	4
8	Bank Indonesia	4
9	Dewan Perwakilan Rakyat	4
10	Kamar Dagang dan Industri	4
11	Badan Koordinasi Penanaman Modal	3
12	Kementerian Koordinator bidang Perekonomian	3
13	Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi	3

<sup>18</sup> Khusus mengenai pandemi COVID-19 akan dibahas di Bab VI.

14	Kementerian Perindustrian	2
15	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	2
16	Kementerian BUMN	1
17	Kementerian Keuangan	1
18	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1
<b>Total</b>		148

Sumber: Data olahan dari berbagai sumber media (lihat Lampiran 1)

Secara garis besar, diplomasi ekonomi yang diutarakan oleh pejabat dan K/L dimaksudkan utamanya sebagai pertama, promosi produk ekspor Indonesia di pangsa pasar tradisional dan non-tradisional. Pada praktiknya, pejabat dan K/L tidak membedakan antara diplomasi ekonomi dengan diplomasi perdagangan komersial, seperti di kepustakaan. Kedua, dalam beberapa kesempatan, diplomasi ekonomi juga dimaksud oleh pejabat dan K/L selama pemerintahan Presiden Jokowi sebagai upaya untuk mengundang penanaman modal asing ke Indonesia. Kembali pada kajian pustaka, kedua hal ini menunjukkan pejabat dan K/L mengacu pada pemahaman diplomasi ekonomi secara sempit yaitu penggunaan instrumen politik untuk mencapai tujuan ekonomi. Dalam hal ini, penggunaan aparatur strategis diplomatik negara untuk memacu pembangunan ekonomi melalui peningkatan ekspor dan investasi.

#### II.4. PENUTUP

Dari berbagai kajian di atas, bisa dipahami bahwa dari aspek tujuan, pemerintah Indonesia sejauh ini mengartikan diplomasi ekonomi secara sempit yaitu berfokus pada pekerjaan misi-misi diplomatik yang mendukung sektor bisnis dan keuangan negara guna mencapai kesuksesan ekonomi dan tujuan pembangunan ekonomi secara umum. Sebagai contoh, dalam RPJMN 2020-2024 diplomasi ekonomi dimaksudkan sebagai upaya negara untuk meningkatkan ekspor dan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sedangkan dari perspektif aktor, temuan awal dari telaah dokumen dan media menunjukkan bahwa sesuai dengan definisi diplomasi ekonomi yang melibatkan aktor yang luas, diplomasi ekonomi Indonesia juga memiliki pemangku kepentingan yang beragam. Tabel 2.1 menunjukkan ada 18 aktor yang membuat ujaran terkait tugas atau fungsi mereka dalam diplomasi ekonomi.

Meski demikian, penggunaan istilah ‘diplomasi’ masih memberikan konotasi bahwa ini adalah ranah Kementerian Luar Negeri dan misi diplomatik, sehingga masih ada kerancuan dalam memahami terminologi ini.

Terakhir, dari perspektif instrumen, diplomasi ekonomi Indonesia menggunakan instrumen yang cukup beragam, mulai dari perjanjian internasional, keterlibatan di berbagai forum internasional dan kegiatan lain seperti pameran dan bursa, dan penempatan atase perdagangan di sejumlah misi diplomatik yang dinilai penting.

## BAB III

# PEMETAAN PEMANGKU KEPENTINGAN

RPJMN 2020-2024 menjelaskan tiga elemen utama dari diplomasi ekonomi, yakni investasi, ekspor, dan pariwisata, ditambah dengan aspek kerja sama pembangunan internasional. Disebutkan pula dalam RPJMN bahwa permasalahan diplomasi ekonomi adalah kerja sama dan koordinasi antara pemerintah, swasta, dan sipil baik dari dalam negeri hingga perwakilan di luar negeri. Namun, pada identifikasi permasalahan tersebut tidak disebutkan tugas pokok dan alur koordinasi dari 15 kementerian/lembaga yang dimaksud, sehingga belum ada pemetaan fungsi para pemangku kepentingan ini, ditemukan sejumlah masalah.

Bab ini berupaya membuat pemetaan pemangku kepentingan dalam diplomasi ekonomi di Indonesia. Pemetaan ini dilakukan dengan cara mendalami 2 indikator, yaitu tupoksi masing-masing K/L, dan tugas/fungsi mereka dalam diplomasi ekonomi berdasarkan telaah dokumen dan media.

Temuan di Bab II menunjukkan sekurangnya ada 18 aktor yang membuat ujaran terkait tugas atau fungsi mereka dalam diplomasi ekonomi. Kajian lebih lanjut pada bab ini mengerucutkan aktor-aktor tersebut menjadi 16 K/L, plus Pelaku/Asosiasi dari berbagai bidang usaha.<sup>19</sup> Tabel 3.1 menjelaskan tupoksi 16 K/L yang menjadi pemangku kepentingan diplomasi ekonomi Indonesia dan dasar hukum yang melatarbelakangi peran mereka dalam diplomasi ekonomi Indonesia.

---

<sup>19</sup> Satu aktor yang menjadi temuan pelacakan media tetapi tidak disertakan sebagai pemangku kepentingan dalam studi ini adalah Presiden Joko Widodo, karena sebagai pimpinan eksekutif Presiden adalah aktor yang menentukan tugas pokok dan fungsi bagi K/L yang menjadi pemangku kepentingan.

Tabel 3.1 Dasar Hukum Tupoksi K/L Pemangku Kepentingan Diplomasi Ekonomi Indonesia

No.	Pemangku Kepentingan	Tupoksi (terkait dengan Diplomasi Ekonomi)	Dasar Hukum
1	Kementerian Luar Negeri—termasuk Perwakilan RI di Luar Negeri	<p>1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;</p> <p>2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;</p> <p>3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;</p> <p>4) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri;</p> <p>5) Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;</p> <p>6) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia;</p> <p>7) Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang luar negeri;</p> <p>8) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.</p>	<p>Peraturan Presiden RI No. 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri.</p> <p>Tugas/Fungsi Spesifik dalam Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri.</p>

2	Kementerian Perdagangan— termasuk Atase Perdagangan dan Indonesian Trade Promotion Center	<p>1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang non-migas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi impor serta pengamanan perdagangan, peningkatan akses pasar barang dan jasa di forum internasional, promosi, pengembangan dan peningkatan produk, pasar ekspor serta pelaku ekspor, serta pengembangan, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan berjangka komoditi, sistem resi gudang dan pasar lelang komoditas;</p> <p>2) Pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, ... <i>[dan seterusnya sama dengan poin 1]</i></p> <p>3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen,</p>	<p>Peraturan Presiden RI No. 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan.</p> <p>Tugas/Fungsi Spesifik dalam Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Perdagangan, menggunakan istilah "diplomasi perdagangan".</p>
---	---	--	---

		<p>standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, ... [dan seterusnya sama dengan poin 1]</p> <p>4) Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan.</p>	
3	<b>Badan Koordinasi Penanaman Modal—termasuk Indonesian Investment Promotion Center</b>	<p>1) Pengkajian dan pengusulan perencanaan penanaman modal nasional;</p> <p>2) Koordinasi pelaksanaan kebijakan nasional di bidang penanaman modal;</p> <p>3) Pengkajian dan pengusulan kebijakan pelayanan penanaman modal;</p> <p>4) Penetapan norma, standar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan penanaman modal;</p> <p>5) Pengembangan peluang dan potensi penanaman modal di daerah dengan memberdayakan badan usaha;</p> <p>6) Pembuatan peta penanaman modal di Indonesia;</p> <p>7) Koordinasi pelaksanaan promosi serta kerja sama penanaman modal;</p> <p>8) Pengembangan sektor usaha penanaman modal melalui pembinaan penanaman modal. antara lain meningkatkan kemitraan, meningkatkan daya saing, menciptakan persaingan usaha yang sehat, dan menyebarkan informasi yang seluas-luasnya dalam lingkup penyelenggaraan penanaman modal;</p> <p>9) Pembinaan pelaksanaan penanaman</p>	<p>Peraturan Presiden RI No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal.</p> <p>Tugas/Fungsi Spesifik dalam Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi dijabarkan dalam Peraturan Kepala BKPM No. 1 Tahun 2016 tentang Perwakilan BKPM di Luar Negeri.</p>

		<p>modal, dan pemberian bantuan penyelesaian berbagai hambatan dan konsultasi permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam menjalankan kegiatan penanaman modal;</p> <p>10) Koordinasi dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu;</p> <p>11) Koordinasi penanam modal dalam negeri yang menjalankan kegiatan penanaman modalnya di luar wilayah Indonesia;</p> <p>12) Pemberian pelayanan perizinan dan fasilitas penanaman modal;</p> <p>13) Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, keuangan, hukum, kehumasan, kearsipan, pengolahan data dan informasi, perlengkapan dan rumah tangga; dan;</p> <p>14) Pelaksanaan fungsi lain di bidang penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
4	Kamar Dagang dan Industri	<p>1) Membina dan mengembangkan kemampuan, kegiatan, dan kepentingan pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi, dan usaha swasta dalam kedudukannya sebagai pelaku-pelaku ekonomi nasional dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan dunia usaha nasional yang sehat dan tertib berdasarkan Pasal 33 Undang-Undang</p>	<p>Undang-Undang No. 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.</p> <p>Tugas/Fungsi Spesifik dalam Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi dijabarkan dalam Nota Kesepahaman dengan</p>

		<p>Dasar 1945;</p> <p>2) Menciptakan dan mengembangkan iklim dunia usaha yang memungkinkan keikutsertaan yang seluas-luasnya secara efektif dalam Pembangunan Nasional;</p> <p>3) Menjadi wadah komunikasi dan konsultasi antar pengusaha Indonesia dan antara pengusaha Indonesia dan Pemerintah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan masalah perdagangan, perindustrian, dan jasa.</p>	<p>Kementerian Negeri diperbaharui 2020).</p> <p>Luar (2011, Januari</p>
5	<b>Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas</b>	<p>1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan;</p> <p>2) Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional;</p> <p>3) Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;</p> <p>4) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan</p>	<p>Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional</p>

		5) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.	
6	Dewan Rakyat Perwakilan	<p>1) Fungsi legislasi: menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas), menyusun dan membahas Rancangan Undang-Undang (RUU), menerima RUU yang diajukan oleh DPD (terkait otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah; pengelolaan SDA dan SDE lainnya; serta perimbangan keuangan pusat dan daerah), membahas RUU yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan UU bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti UU (yang diajukan Presiden) untuk ditetapkan menjadi UU;</p> <p>2) Fungsi anggaran: memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN (yang diajukan Presiden); memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU tentang APBN dan RUU terkait pajak, pendidikan dan agama; menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK; memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara;</p> <p>3) Fungsi pengawasan: melakukan</p>	<p>Undang-Undang Dasar 1945</p> <p>Tugas/fungsi spesifik terkait Ratifikasi Perjanjian Perdagangan Internasional dijelaskan dalam UU No. 7 Tahun 2014 Pasal 83.</p>

		<p>pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN dan kebijakan pemerintah; membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD (terkait pelaksanaan UU mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan SDA dan SDE lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama)</p>	
7	<b>Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi</b>	<p>1) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;</p> <p>2) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang kemaritiman dan investasi;</p> <p>3) Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang kemaritiman dan investasi;</p> <p>4) Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;</p> <p>5) Penyelesaian isu di bidang kemaritiman dan investasi yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud;</p> <p>6) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kemenko Marves;</p>	Peraturan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi No. 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi

		<p>7) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Marves;</p> <p>8) Pengawasan atas pelaksanaan fungsi di lingkungan Kemenko Marves; dan</p> <p>9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.</p>	
8	<b>Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia</b>	<p>1) Memberi bantuan yang diperlukan pihak-pihak dalam bentuk Pembiayaan, Penjaminan, dan Asuransi guna pengembangan dalam rangka menghasilkan barang dan jasa dan/atau usaha lain yang menunjang Ekspor;</p> <p>2) Menyediakan pembiayaan bagi transaksi atau proyek yang dikategorikan tidak dapat dibiayai oleh perbankan, tetapi mempunyai prospek untuk peningkatan ekspor nasional; dan</p> <p>3) Membantu mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Bank atau Lembaga Keuangan dalam penyediaan pembiayaan bagi Eksportir yang secara komersial cukup potensial dan/atau penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia.</p>	Undang-Undang RI No. 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
9	<b>Komite Ekonomi dan Industri Nasional</b>	<p>1) Melakukan pengkajian terhadap permasalahan ekonomi dan industri nasional, regional, dan global;</p> <p>2) Menyampaikan saran tindak strategis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industri nasional kepada Presiden; dan</p>	Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2016 tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional

		3) Melaksanakan tugas lain dalam lingkup ekonomi dan industri yang diberikan Presiden.	
10	Kementerian Perindustrian	<p>1) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, promosi industri dan jasa industri, standardisasi industri, teknologi industri, pengembangan industri strategis dan industri hijau, pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, penyebaran dan pemerataan pembangunan industri, ketahanan industri dan kerja sama, serta peningkatan penggunaan produk dalam negeri;</p> <p>2) Pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, ... (<i>dan seterusnya sama dengan poin 1</i>);</p> <p>3) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan di bidang pendalaman dan penguatan struktur industri, peningkatan daya saing, pengembangan iklim usaha, ..... (<i>dan seterusnya sama dengan poin 1</i>);</p> <p>4) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang perindustrian.</p>	Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian
11	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif—	Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas penyiapan,	Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 Tahun 2015, Rencana

	termasuk Indonesia Office	Visit Tourism	perumusan, dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemgembangan destinasi wisata serta peningkatan daya saing industri pariwisata. VITO adalah tenaga ahli bidang pemasaran dalam membantu memasarkan pariwisata Indonesia di luar negeri.	Strategis 2020-2024 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
12	Bank Indonesia		1) Pengelolaan persepsi positif perekonomian RI untuk mendukung perekonomian nasional terutama untuk mendorong investasi dan perdagangan Indonesia dan pemahaman mengenai kebijakan Indonesia; 2) Perumusan <i>stance/posisi</i> dan peningkatan peran Indonesia di tingkat bilateral, regional, plurilateral, dan multilateral; 3) Pelaksanaan hubungan internasional untuk mendukung kepentingan nasional perluasan jejaring dengan negara sahabat dan/atau lembaga internasional dalam rangka menjaring informasi terkait isu-isu ekonomi di negara tersebut; 4) Pertukaran data dan/atau informasi untuk mendukung perumusan kebijakan perekonomian Indonesia; 5) Pengembangan kapasitas sumber daya	Nota Kesepahaman Antara Bank Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Kerja Sama Peningkatan Diplomasi Ekonomi
13	Kementerian BUMN		1) Mendukung rantai pasok ( <i>supply chain</i> ) dalam memasarkan produk di pasar strategis. 2) Meningkatkan jumlah transaksi dan nilai investasi <i>outbound</i> BUMN di pasar	Nota Kesepahaman Antara Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri Republik

		<p>global.</p> <p>3) <i>Matchmaking</i> antara BUMN dan investor asing yang berminat melakukan <i>inbound investment</i> di Indonesia sesuai dengan sektor yang diminati.</p> <p>4) Memperluas jaringan kemitraan, potensi investasi BUMN, dan peluang untuk memasarkan produk BUMN di pasar Internasional</p>	Indonesia
14	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	<p>a) Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian;</p> <p>b) Pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga terkait dengan isu di bidang perekonomian;</p> <p>c) Pengelolaan dan penanganan isu yang terkait dengan bidang perekonomian;</p> <p>d) Pengawalan program prioritas nasional dan kebijakan lain yang telah diputuskan oleh Presiden dalam Sidang Kabinet;</p> <p>e) Penyelesaian isu di bidang perekonomian yang tidak dapat diselesaikan atau disepakati antar Kementerian/Lembaga dan memastikan terlaksananya keputusan dimaksud.</p>	<p>Peraturan Presiden No. 37/2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.</p> <p>Tugas/Fungsi Spesifik dalam Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2020-2024.</p>

15	Kementerian Pertanian	<p>a) Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, kedelai, tebu, daging, dan pertanian lainnya, serta peningkatan nilai tambah, daya saing, mutu, dan pemasaran hasil pertanian;</p> <p>b) Pelaksanaan kebijakan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, ... (dan seterusnya sama dengan poin 1);</p> <p>c) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan di bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian, peningkatan produksi padi, jagung, ... (dan seterusnya sama dengan poin 1)</p> <p>d) Pelaksanaan penelitian, pengembangan dan inovasi di bidang pertanian;</p> <p>e) Penyelenggaraan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanian;</p> <p>f) Koordinasi dan pelaksanaan diversifikasi dan pemantapan ketahanan pangan;</p>	<p>Peraturan Presiden No. 45/2015 tentang Kementerian Pertanian.</p> <p>Tugas/Fungsi Spesifik dalam Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Pertanian 2020-2024.</p>
16	Kementerian Keuangan	<p>a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan</p>	<p>Peraturan Presiden No. 57/2020 tentang Kementerian Keuangan.</p> <p>Tugas/Fungsi Spesifik dalam Pelaksanaan</p>

	<p>pembentukan dan risiko keuangan negara;</p> <p>b) Perumusan dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan.</p>	Diplomasi Ekonomi dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian Keuangan 2020-2024.
--	--	--

Sumber: Dari berbagai sumber, diolah oleh penulis.

### **III.1. KATEGORI PEMANGKU KEPENTINGAN DIPLOMASI EKONOMI INDONESIA**

Berdasarkan tupoksi yang dijelaskan pada tabel 3.1 di atas, maka 16 pemangku kepentingan dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) pelaksana teknis diplomasi ekonomi; (2) perumus kebijakan diplomasi ekonomi; (3) pendukung diplomasi ekonomi. Lihat Tabel 3.2 untuk pembagian kategori tersebut.

Ada dua catatan penting di sini. *Pertama*, pengategorian ini dilakukan secara sederhana berdasarkan temuan penelitian, guna mempermudah analisis dan penarikan kesimpulan, tanpa menafikan adanya tumpang tindih tupoksi beberapa K/L. *Kedua*, pelaksana diplomasi ekonomi dapat memiliki juga elemen fungsi perencanaan dan pendukungan, sedangkan perencana diplomasi ekonomi dapat juga memiliki elemen pendukungan.

**Tabel 3.2 Pemetaan Peran dan Fungsi Pemangku Kepentingan Diplomasi Ekonomi Indonesia**

Pemangku Kepentingan		
Pelaku/Pelaksana Teknis	Perumus Kebijakan	Pendukung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Luar Negeri</li> <li>• Kementerian Perdagangan</li> <li>• Badan Koordinasi Penanaman Modal</li> <li>• Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif</li> <li>• K/L sektor terkait</li> <li>• Pelaku/Asosiasi berbagai bidang usaha*</li> </ul>	<b>Arah Kebijakan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kementerian Keuangan</li> <li>• Bank Indonesia</li> <li>• Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia</li> <li>• Bank komersial***</li> <li>• K/L sektor terkait</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• K/L yang menjadi Pelaksana Teknis Diplomasi Ekonomi</li> <li>• Kementerian PPN/Bappenas</li> </ul>	
	<b>Regulasi</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dewan Perwakilan Rakyat</li> <li>• Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia**</li> </ul>	

Sumber: Diolah bersama dengan Bappenas

Catatan:

\*Pelaku/asosiasi dari berbagai bidang usaha merupakan pihak swasta yang berperan di luar alur pelaksanaan teknis pemerintah dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi.

\*\* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak masuk dalam Tabel 3.1. karena terlibat dalam pelaksanaan teknis maupun perumusan kebijakan khusus diplomasi ekonomi. Akan tetapi, ia, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, berwenang melakukan pengundangan dalam proses akhir pembuatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seluruh perumusan kebijakan diplomasi ekonomi yang melibatkan pembuatan peraturan perundang-undangan akan melibatkan Kemenkumham, sehingga dimasukkan ke dalam Tabel 3.2.

\*\*\* Bank komersial merupakan bank BUMN atau swasta yang berperan di luar alur pelaksanaan teknis pemerintah dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi.

---

### III.1.1 PELAKSANA TEKNIS DIPLOMASI EKONOMI

Berdasarkan tupoksi, yang dikategorikan sebagai pelaksana teknis diplomasi ekonomi adalah Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perdagangan (termasuk Indonesian Trade Promotion Center), Badan Koordinasi Penanaman Modal (termasuk Indonesian Investment Promotion Center), dan Kamar Dagang dan Industri. Empat K/L ini terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis diplomasi ekonomi, antara lain, tapi tidak terbatas pada, pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan luar negeri, perundingan perdagangan internasional, dan promosi investasi.

#### 1. Kementerian Luar Negeri (Kemlu), termasuk Perwakilan RI di Luar Negeri

Tabel 3.1 menunjukkan bahwa dari tupoksi Kemlu, poin 1, 2, 3, dan 4 terkait langsung dengan pelaksanaan dan perencanaan diplomasi ekonomi. Membandingkan dengan K/L lain, hanya Kementerian Luar Negeri yang secara jelas dan elaboratif memuat diplomasi ekonomi dalam Rencana Strategis (Renstra). Mengutip dari Renstra Kemlu 2015-2019, “diplomasi ekonomi yang kuat” menjadi salah satu dari delapan sasaran strategis Kemlu.<sup>20</sup> Dari penjelasan di Renstra tersebut juga dapat dianalisis bahwa Kemlu memiliki tanggungjawab kerja sebagai koordinator, negosiator, dan promotor antara pemangku kepentingan domestik dengan pasar tradisional maupun non-tradisional di luar negeri. Dengan demikian, Kemlu memiliki tugas/fungsi pelaksana dan perencana diplomasi ekonomi, dan juga memberikan pendukungan kepada pelaksanaan diplomasi ekonomi oleh K/L lain.

Telaah media yang dilakukan di Bab II menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi erat diidentifikasi dengan Kemlu, terutama sejak tahun 2015 diplomasi ekonomi resmi menjadi penambahan tugas di Kemlu. Di tahun 2019, penugasan ini semakin diperkuat lagi dengan penunjukan wakil menteri luar negeri yang fokus pada diplomasi ekonomi dan perdagangan oleh Presiden Joko Widodo.

#### 2. Kementerian Perdagangan (Kemendag), termasuk Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) dan Atase Perdagangan

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa dari tupoksi Kemendag, poin 1, 2, dan 3 terkait langsung dengan pelaksanaan dan perencanaan diplomasi ekonomi, meskipun dari telaah berbagai dokumen Kemendag, terutama Renstra Kemendag, istilah yang digunakan adalah

---

<sup>20</sup> Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri 2015-2019, Hal. 26.

"diplomasi perdagangan." Mengutip Renstra Kemendag 2015-2019, dijelaskan: "Diplomasi perdagangan merupakan salah satu instrumen penting dalam memperjuangkan kepentingan nasional guna memperluas akses pasar internasional. Berbagai perundingan dalam forum bilateral berkembang sangat cepat dan memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia harus berperan aktif dalam setiap perundingan guna melindungi kepentingan ekonomi Indonesia di bidang perdagangan dan investasi."<sup>21</sup> Dari pernyataan ini bisa dipahami bahwa fungsi utama Kemendag dalam diplomasi ekonomi adalah terkait dengan perundingan perdagangan, baik bilateral maupun multilateral.

Sebagai pelaksana diplomasi ekonomi, Kemendag bersanding dengan Kemlu. Menurut pernyataan Menteri Perdagangan, pembagian tugas antara Kemendag dan Kemlu tidak akan tumpang tindih, yakni Kemendag berfokus pada pelaksanaan dan teknis, sedangkan Kemlu melakukan diplomasi membuka pasar non tradisional.<sup>22</sup>

Perwakilan Perdagangan di Luar Negeri meliputi Atase Perdagangan dan ITPC mempunyai fungsi sangat penting dalam meningkatkan eksport Indonesia. Mengacu pada Renstra Kemendag 2020-2024, Atase Perdagangan memiliki tugas: (1) menyelenggarakan laporan intelijen bisnis (laporan); (2) menyelenggarakan promosi dagang luar negeri yang diikuti (promosi); dan (3) menyelenggarakan keikutsertaan dalam pertemuan antar pemerintah negara di bidang perdagangan (pertemuan).<sup>23</sup>

Sedangkan ITPC adalah unsur pelaksana teknis yang merupakan bagian dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri. Tugasnya antara lain adalah: penetrasi pasar melalui penyelenggaraan kontak bisnis, pembinaan dan pengembangan jejaring bisnis; pelayanan informasi pasar melalui market intelligence; dan promosi eksport melalui partisipasi dalam pameran dagang internasional.

3. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), termasuk Indonesia Investment Promotion Center (IIPC)

Hampir semua poin dalam tupoksi BKPM seperti yang tertulis di Tabel 3.1 berkaitan dengan pelaksanaan (poin 7, 8, 9, dan 12), perencanaan (poin 1, 3, dan 6), dan

---

<sup>21</sup> Rencana Strategis Kementerian Perdagangan 2015-2019, Hlm. 50.

<sup>22</sup> "Begini pembagian tugas Kemendag dan Kemenlu dalam diplomasi perdagangan," *Kontan.co.id*, 19 November 2019.

<sup>23</sup> Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 40 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024.

pendukungan (poin 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, dan 14) diplomasi ekonomi. BKPM juga melakukan sinergi erat dengan Kemlu, antara lain seperti disampaikan melalui Siaran Pers BKPM tanggal 7 Mei 2020,<sup>24</sup> dan dalam hal promosi menyelenggarakan forum investasi bersama K/L terkait melalui berbagai forum promosi investasi. Dengan adanya Inpres Nomor 7 tahun 2019 terkait pelimpahan kewenangan perizinan dari 22 kementerian/lembaga kepada BKPM, maka BKPM berwenang mengawal investor yang masuk dan menjamin agar investasi yang masuk tidak dipersulit lagi.

Khusus IIPC, ia merupakan perwakilan resmi BKPM di luar negeri yang bertugas mempromosikan investasi Indonesia ke para calon investor di luar negeri. IIPC memiliki tugas dan fungsi: (i) meningkatkan penanaman modal dari Negara Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja ke Indonesia; dan (ii) memfasilitasi penanaman modal dari Indonesia ke Negara Tempat Kedudukan dan Wilayah Kerja.

4. Pelaku/Asosiasi berbagai bidang usaha, baik secara langsung maupun melalui Kamar Dagang dan Industri (KADIN)

Bila melihat poin-poin dalam tupoksi KADIN seperti yang tercantum dalam UU No 1 (1987), dipahami bahwa fungsi KADIN lebih terkait dengan pendukungan diplomasi ekonomi. Namun, bila merujuk pada nota kesepahaman (*memorandum of understanding*, MoU) yang ditandatangani oleh KADIN dan Kemlu pada bulan Januari 2020, memperbarui MoU sebelumnya yang ditandatangani pada 2011, KADIN dan Kemlu bekerja sama membangun sinergi diplomasi ekonomi dalam meningkatkan perdagangan dan investasi Indonesia. Dalam MoU tersebut secara tegas dijabarkan tugas KADIN yang terkait diplomasi ekonomi, yaitu antara lain: (i) perencanaan dan pelaksanaan diplomasi ekonomi Indonesia di negara-negara akreditasi; dan (ii) pertukaran informasi mengenai potensi dan peluang usaha, kebijakan dan peraturan terkait diplomasi ekonomi.

5. K/L sektor terkait, yang tupoksinya dapat dilihat di Tabel 3.1.

---

<sup>24</sup> BKPM, "Siaran Pers: BKPM-Kemlu Perkuat Kerjasama untuk Genjot Investasi," 7 Mei 2020, [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file\\_siaran\\_pers/Siaran\\_Pers\\_BKPM\\_07052020\\_BKPM-Kemlu\\_Perkuat\\_Kerjasama\\_untuk\\_Genjot\\_Investasi.docx\\_.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_07052020_BKPM-Kemlu_Perkuat_Kerjasama_untuk_Genjot_Investasi.docx_.pdf)

---

### III.1.2 Perumus Kebijakan Diplomasi Ekonomi

Perencanaan diplomasi ekonomi meliputi perumusan arah kebijakan yang terkait diplomasi ekonomi, termasuk penetapan prioritas, penyusunan strategi, dan evaluasi. Dalam hal ini, perumusan kebijakan diplomasi ekonomi dilakukan oleh Kemlu, Kemendag, BKPM, Kadin, dan Kementerian PPN/Bappenas.

#### 1. Kementerian PPN/BAPPENAS

Berdasarkan Peraturan Presiden RI No. 65 Tahun 2015, secara garis besar, BAPPENAS berwenang dalam merumuskan dan menetapkan arah kebijakan lintas sektoral yang memiliki keterkaitan dengan pembangunan nasional. Tabel 3.1 menunjukkan tupoksi Bappenas poin 1 dan 2 terkait langsung dengan perencanaan diplomasi ekonomi. Lebih spesifik lagi, Bappenas memberikan rekomendasi desain perencanaan efektif pada Kemlu dan Perwakilan RI, Kemendag, dan K/L lain yang melaksanakan diplomasi ekonomi.

Perlu ditegaskan lagi di sini catatan di atas, yaitu Kementerian PPN/Bappenas bukanlah satu-satunya perumus kebijakan diplomasi ekonomi. Empat K/L yang disebutkan sebelumnya, yakni Kemlu, Kemendag, BKPM, dan KADIN, yang memiliki fungsi pelaksana teknis, juga memiliki bagian/peran dalam tahap perumusan kebijakan.

#### 2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

Tugas penting DPR terkait diplomasi ekonomi tentunya adalah ratifikasi berbagai perjanjian internasional yang terkait hubungan ekonomi, yang sepenuhnya menjadi kewenangan Komisi VI DPR. Pasal 83 UU No. 7 tahun 2014 tentang Perdagangan menyebutkan: Pemerintah dalam melakukan perundingan perjanjian Perdagangan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) dapat berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, DPR juga berwenang untuk menyampaikan aspirasi pengusaha UKM yang ingin melakukan internasionalisasi dan mempromosikan potensi pasar domestik.

#### 3. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak terlibat dalam pelaksanaan teknis maupun perumusan kebijakan khusus diplomasi ekonomi, tetapi ia, melalui Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, berwenang melakukan pengundangan dalam proses akhir pembuatan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, seluruh perumusan kebijakan diplomasi ekonomi yang melibatkan pembuatan peraturan perundang-undangan akan melibatkan Kemenkumham.

#### 4. K/L yang menjadi pelaksana teknis diplomasi ekonomi

---

##### III.1.3 PENDUKUNG DIPLOMASI EKONOMI

Dukungan terhadap diplomasi ekonomi meliputi sejumlah fungsi, antara lain ratifikasi perjanjian internasional, fasilitasi bagi pelaku bisnis, penyaluran aspirasi domestik, dan pelatihan pelaku usaha. Beberapa dari fungsi pendukungan ini juga dilakukan oleh pelaksana diplomasi ekonomi, tapi ada juga yang spesifik menjadi bagian tupoksi lembaga tertentu.

###### 1. Kementerian Keuangan (Kemenkeu)

Dalam Renstra Kemenkeu 2020-2024, salah satu strategi yang dijelaskan adalah mengenai kebijakan ekspor bernilai tambah tinggi. Dalam hal ini, jelas peran pendukungan Kemenkeu terhadap diplomasi ekonomi Indonesia, misalnya, dalam hal peningkatan efektivitas *Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)* dan diplomasi ekonomi, dan peningkatan akses dan pendalaman pasar ekspor, melalui pemberian insentif fiskal terhadap bahan baku melalui Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Disebut juga dibentuknya Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional sebagaimana diatur dalam PMK No. 143/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja LDKPI.

###### 2. Bank Indonesia (BI)

Dari tupoksinya, BI bertugas menetapkan dan menyediakan kebijakan moneter, kebijakan sistem pembayaran dan pengelolaan rupiah, serta stabilitas sistem keuangan. Sejak tahun 2017, BI memiliki nota kesepahaman dengan Kemlu yang secara spesifik bertajuk “Kerja Sama Peningkatan Diplomasi Ekonomi.” Pada 19 Mei 2020, nota kesepahaman ini diperpanjang dengan kerja sama yang difokuskan dalam program tahunan lain meliputi: pengembangan kapasitas sumber daya manusia; peningkatan peran Indonesia di berbagai fora bilateral, regional dan multilateral; dan pertukaran data dan informasi untuk mendukung perumusan kebijakan perekonomian Indonesia.

###### 3. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)

LPEI terkait dalam diplomasi ekonomi tentunya berdasar atas ekspor sebagai salah satu elemen diplomasi ekonomi. Pada bulan Januari 2020, guna mendukung diplomasi ekonomi, LPEI menandatangani 2 MoU dengan Kemlu, yang pertama mengenai kerja sama pengembangan kapasitas untuk menunjang diplomasi ekonomi, dan yang kedua

adalah mengenai penembangan kapasitas pelaku usaha dan pemangku kepentingan ekspor melalui Pendidikan dan pelatihan teknis kepada negara-negara berkembang dalam kerangka kerja sama Selatan-Selatan.

4. Bank Komersial

Bank komersial merupakan bank BUMN atau swasta yang berperan di luar alur pelaksanaan teknis pemerintah dan perumusan kebijakan diplomasi ekonomi.

5. K/L Sektor Terkait, yang tupoksinya dapat dilihat di Tabel 3.1.

---

#### III.1.4. K/L Sektor Terkait

1. Kementerian Koordinasi Kemarkitiman dan Investasi (Kemenko Marves)

Merujuk pada Peraturan Menko Marves No 2 (2020) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Marves, tugas Kemenko Marves adalah menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kemarkitiman dan investasi. BKPM berada di bawah koordinasi Kemenko Marves.

2. Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)

Tabel 3.1 menunjukkan tupoksi KEIN, dan poin 1 dan 2 terkait dengan pemberian dukungan bagi diplomasi ekonomi. KEIN melakukan pengkajian terhadap permasalahan ekonomi dan industri nasional, regional, dan global; dan juga menyampaikan saran tindak strategis dalam menentukan kebijakan ekonomi dan industri nasional kepada Presiden.

3. Kementerian Perindustrian (Kemenperin)

Kemenperin memberikan dukungan bagi diplomasi ekonomi terutama melalui penguatan industri di dalam negeri, sesuai dengan tupoksinya sepertinya yang bisa dilihat di Tabel 3.1. Secara lebih spesifik, Kemenperin juga memberikan fasilitasi sarana diplomasi ekonomi untuk pelaku industri asal Indonesia di forum internasional.

4. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf), termasuk Visit Indonesia Tourism Officer (VITO)

Pariwisata adalah salah satu elemen diplomasi ekonomi. Mengacu pada Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 Tahun 2015, Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas penyiapan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemgembangan destinasi wisata serta peningkatan daya saing

industri pariwisata. Tugas ini memberikan Kemenparekraf kapasitas untuk tidak hanya berperan sebagai agen pemasaran, namun juga pengembangan kebijakan di dalam negeri maupun berkoordinasi bersama K/L lain dalam bidang promosi terintegrasi. Selain itu, merujuk pada Renstra Kemenparekraf 2020-2024, Indonesia memiliki tenaga perwakilan yang telah ditunjuk sebagai Visit Indonesia Tourism Officers (VITO) yang merupakan tenaga ahli bidang pemasaran dalam membantu memasarkan pariwisata Indonesia di luar negeri. VITO tersebut tersebar di 23 kota di 14 negara yang menjadi fokus pasar wisatawan mancanegara.

5. Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN)

Pada bulan Juli 2020, Kemlu membentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE), berkolaborasi dengan BKPM dan Badan Usaha Milik Negara, yang ditugaskan membantu sektor usaha dalam negeri agar dapat mengambil peluang di kancah internasional saat pandemi. Terkait ini, Kemlu menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kementerian BUMN, yang bertujuan membentuk tim untuk mendukung pengembangan dan ekspansi BUMN di pasar global dan identifikasi bersama peluang investasi, yang disebut “BUMN Go Global.”<sup>25</sup>

6. Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Ekonomi)

Tabel 3.1 menunjukkan Tupoksi Kemenko Ekonomi, yang keseluruhan terkait dengan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan terkait ekonomi, dan dapat dilihat kaitannya dengan pendukungan terhadap kebijakan diplomasi ekonomi. Secara lebih spesifik, Renstra Kemenko Ekonomi 2020-2024, dalam Strategi 21, 26, 27, dan 28 menjelaskan keterlibatan Kemenko Ekonomi dalam diplomasi ekonomi. Sebagai contoh, Strategi 26 secara khusus membahas strategi peningkatan diplomasi ekonomi ke pasar non-tradisional.

7. Kementerian Pertanian (Kementan)

Bila merujuk Perpres No. 45 Tahun 2015, Bab I Pasal 3, seperti yang dituliskan di Tabel 3.1, Tupoksi Kementan secara umum terkait bidang penyediaan prasarana dan sarana pertanian. Akan tetapi, bila merujuk pada Renstra Kementan 2020-2024, halaman 4-5, dalam Strategi Kementan ada poin yang terkait langsung dengan diplomasi ekonomi,

---

<sup>25</sup> “Kementerian Luar Negeri Bentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi,” *Liputan 6*, 17 Juli 2020.

yaitu poin 3 “Peningkatan komoditas bernilai tambah dan berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor.”

### III.2. PENUTUP

Tabel 3.1 Dasar Hukum Tupoksi K/L Pemangku Kepentingan Diplomasi Ekonomi Indonesia dapat memetakan dengan cukup jelas pemangku kepentingan dalam diplomasi ekonomi Indonesia, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pelaksana diplomasi ekonomi, perencana diplomasi ekonomi; pendukung diplomasi ekonomi, dan tupoksi masing-masing.

Sebagian tugas/fungsi ada yang spesifik dijalankan oleh aktor tertentu, tetapi ada juga tugas/fungsi yang tumpang tindih. Untuk 5 pemangku kepentingan yang menjadi pelaksana dan perencana diplomasi ekonomi, pembagian tugas/fungsi cukup jelas. Namun, di sisi pendukungan, bisa terjadi tumpang tindih tugas/fungsi. Dalam RPJMN pun sudah diakui bahwa permasalahan diplomasi ekonomi adalah belum terpadunya kebijakan dan koordinasi diplomasi ekonomi, serta belum adanya mekanisme koordinasi penyelenggaraan investasi ke luar negeri,<sup>26</sup> dan tidak disebutkan tugas pokok dan alur koordinasi dari K/L pemangku kepentingan yang menjadi hasil temuan dalam kajian ini. Meski demikian, tujuan Bab ini untuk memetakan pemangku kepentingan sudah terpenuhi dengan Tabel tersebut, yaitu dengan memetakan tupoksi masing-masing K/L, dan tugas/fungsi mereka dalam diplomasi ekonomi.

---

<sup>26</sup> RPJMN 2020-2024, hal. 42

## BAB IV

# EFEKTIVITAS PERJANJIAN INTERNASIONAL

Kajian diplomasi ekonomi tentu tak bisa lepas dari perjanjian ekonomi internasional. Pada era tarif yang secara umum rendah dan saling berhubungnya berbagai moda ekonomi, perjanjian ekonomi internasional kini tidak lagi hanya berupa perjanjian perdagangan bebas (*free trade agreement*, FTA), namun juga perjanjian perlindungan investasi internasional bilateral (*bilateral investment treaty*, BIT) dan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif (*comprehensive economic partnership agreement*, CEPA). Guna menyederhanakan, perjanjian ekonomi internasional akan digunakan secara bergantian dengan FTA dan CEPA.

Meski ada tren mundurnya multilateralisme dan deglobalisasi, Indonesia tetap aktif berdiplomasi ekonomi melalui berbagai perjanjian ekonomi internasional. Pada akhir tahun 2019, Indonesia telah menyelesaikan 17 negosiasi FTA dan sedang dalam tahap negosiasi di 12 perjanjian. Jakarta juga sedang dalam tahap penjajakan di 11 FTA. Di tahun 2020, status ini belum berubah, karena banyak proses perundingan yang terhambat oleh keadaan pandemi COVID-19.

Tabel 4.1 Daftar Perjanjian Ekonomi Internasional Indonesia

No.	Nama Perjanjian	Keterangan
		Implementasi
1	Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)	Ditandatangani: 20 Agustus 2007. Implementasi: 1 Juli 2008
2	Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA)	Ditandatangani: 3 Februari 2012 Implementasi: 1 September 2013
3	Protocol to Amend Indonesia-Pakistan PTA (IP-PTA)	Ditandatangani: 27 Januari 2018. Implementasi: 14 November 2018
4	Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia-Palestine	Ditandatangani: 12 Desember 2017 Implementasi: 21 Februari 2019
5	Indonesia-Chile Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA)	Ditandatangani: 12 November 2017 Implementasi: 10 Agustus 2019
6	ASEAN Free Trade Area (AFTA)	Ditandatangani: 28 Januari 1992 Implementasi: 1 Januari 2004
7	ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)	Ditandatangani: 12 November 2017 Implementasi: 12 November 2018
8	Protocol to Amend the Framework Agreement under ACFTA	Ditandatangani: 12 November 2017 Implementasi: 14 November 2018
9	ASEAN-India FTA (AIFTA)	Ditandatangani: 13 November 2014

		Implementasi: 12 November 2018
10	ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)	Ditandatangani: 31 Maret 2008 Implementasi: 19 November 2009
11	ASEAN-Korea FTA (AKFTA)	Ditandatangani: 22 November 2015 Implementasi: 12 November 2018
12	ASEAN, Australia, and New Zealand FTA (AANZFTA)	Ditandatangani: 27 Februari 2009 Implementasi: 6 Mei 2011
13	1st Protocol to Amend the Agreement Establishing AANZFTA	Ditandatangani: 26 Agustus 2014 Implementasi: 14 November 2018
14	ASEAN Agreement on Medical Device Directive (AMDD)	Ditandatangani: 21 November 2014 Implementasi: 14 November 2018
15	9th ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS)	Ditandatangani: 27 November 2015 Implementasi: 14 November 2018
16	Agreement on Trade in Service under the ASEAN-India FTA (AITISA)	Ditandatangani: 13 November 2014 Implementasi: 14 November 2018
17	ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA)	Ditandatangani: 26 Februari 2009 Implementasi: 8 Agustus 2011
18	2nd Protocol to Amend the ACIA	Ditandatangani: 21 September 2017 Implementasi: 8 Juli 2019
19	3rd Protocol to Amend the ACIA	Ditandatangani: 20 Desember 2017 Implementasi: 8 Juli 2019
20	Trade Facilitation Agreement (TFA), World Trade Organization	Ditandatangani: Desember 2013 Implementasi: 22 November 2017
21	Indonesia-Australia CEPA (IA-CEPA)	Ditandatangani: 4 Maret 2019 Implementasi: 5 Juli 2020
22	Review Indonesia-Pakistan PTA	Ditandatangani: 27 Januari 2018 Implementasi: Maret 2019
<b>Ratifikasi</b>		
1	Indonesia-European Free Trade Association (EFTA) FTA	Ditandatangani: 16 Desember 2018 Proses ratifikasi
2	Indonesia-Mozambique PTA	Ditandatangani: 27 Agustus 2019 Proses ratifikasi
3	Indonesia-Korea CEPA	Ditandatangani: 25 November 2019 Proses ratifikasi
4	ASEAN-Hong Kong FTA & Investment Agreement	Ditandatangani: 12 November 2017 Proses ratifikasi
5	1st Protocol to Amend the AJCEP	Ditandatangani: 2 Maret 2019 Proses ratifikasi
6	10th AFAS	Ditandatangani: 11 November 2018 Proses ratifikasi
7	ASEAN Agreement on Electronic Commerce	Ditandatangani: 12 November 2018 Proses ratifikasi
8	General Review Indonesia-Japan EPA	Ditandatangani: 21 Juni 2019 Persiapan: Protocol to Amend IJEPAP
9	ASEAN Trade in Services Agreement	Ditandatangani: 23 April 2019

		Proses ratifikasi
10	1st Protocol to Amend the ASEAN Trade in Goods Agreement	Ditandatangani: 22 Januari 2019 Proses ratifikasi
11	Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)	Ditandatangani: 15 November 2020 Proses ratifikasi
<b>Negosiasi</b>		
1	Indonesia-European Union CEPA	Dimulai: 2016 Status: Ronde ke-9, Desember 2019
2	Indonesia-Morocco PTA	Dimulai: Juni 2018 Status: Negosiasi dimulai, Januari 2019
3	Indonesia-Tunisia PTA	Dimulai: 2018 Status: Ronde ke-3, Maret 2019
4	Indonesia-Bangladesh PTA	Dimulai: 2019 Status: Ronde ke-2, Juli 2019
5	Indonesia-Turkey CEPA	Dimulai: 2018 Status: Ronde ke-2, Januari 2019
6	Indonesia-Iran PTA	Dimulai: 2010 Status: Ronde ke-5, Februari 2018
7	Protocol to Amend Indonesia-Japan EPA	Dimulai: 2019 Status: 2nd Joint Committee Meeting, November 2019
8	General Review ASEAN, Australia, and New Zealand FTA	Dimulai: 2009 Status: Peninjauan
9	General Review ASEAN-India FTA	Dimulai: 2009 Status: Diajukan untuk ditinjau setelah negosiasi RCEP selesai
10	Indonesia-Pakistan Trade in Goods	Dimulai: 2019 Status: Ronde ke-1, Agustus 2019
<b>Eksplorasi</b>		
1	Indonesia-Sri Lanka PTA	Peluncuran studi kelayakan bersama (Januari 2018)
2	Indonesia-Djibouti PTA	Peluncuran studi kelayakan bersama (Agustus 2019)
3	Indonesia-Gulf Cooperation Council (GCC) CEP	Diusulkan (2018)
4	Indonesia-South Africa Customs Union (SACU) PTA	Diusulkan (2017)
5	Indonesia-Kenya (East African Community, EAC) PTA	Diusulkan (2017)
6	Indonesia-Nigeria (Economic Community of West African States, ECOWAS) PTA	Diusulkan (2017)
7	Indonesia-New Zealand PTA	Diusulkan (2019)
8	Indonesia-Peru FTA	Studi kelayakan selesai (2017)
9	Indonesia-Mercosur FTA	Diusulkan (2019)
10	Indonesia-Eurasia Economic Union FTA	Diusulkan (2019)
11	Indonesia-Colombia FTA	Peluncuran studi kelayakan bersama (November 2019)
12	Indonesia-Fiji PTA	Diusulkan (2019)
13	Indonesia-Papua New Guinea PTA	Diusulkan (2019)

14	ASEAN-Canada FTA	Proses studi kelayakan bersama
15	ASEAN-European Union FTA	Menyiapkan parameter kerangka kerja untuk negosiasi

Sumber: Direktorat Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan (2020)

#### IV.1. FORMULASI PENILAIAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

Menilai sebuah perjanjian ekonomi internasional tentu harus menggunakan analisis kuantitatif ekonomi untuk mengukur dampak terhadap produksi (*output*) dan kesejahteraan (*welfare*). Berbagai metode dan model mutakhir seperti model *computable general equilibrium* (CGE) dan model *gravity* telah tersedia untuk tujuan ini. Namun, FTA tidak hanya berdampak pada produksi dan kesejahteraan; FTA juga dapat berdampak pada persaingan usaha, efektivitas regulasi, dan dampak kualitatif lainnya. Menilai dampak ini semakin mendesak dengan FTA yang telah meluas melebihi sekedar isu akses pasar dan pemotongan tarif ke isu-isu seperti pengadaan pemerintah, persaingan usaha, dan hak kekayaan intelektual. Selain itu, dampak strategis FTA pun beragam mulai dari mendorong hubungan bilateral dengan negara mitra hingga diversifikasi hubungan. Dalam menganalisis perjanjian ekonomi internasional Indonesia, makalah kebijakan ini akan berfokus pada pertimbangan keuntungan ekonomi kualitatif dan pertimbangan strategis.

Seperti diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional,<sup>27</sup> diplomasi perdagangan bergerak di bawah payung politik luar negeri Indonesia; meski demikian, Kemendag tentunya akan mengkaji dari aspek atau perspektif ekonomi. Prioritas secara strategis tentunya akan menjadi pertimbangan, tapi tetap keuntungan secara ekonomi akan dikaji.

Kementerian Perdagangan mengoordinasikan dan memimpin delegasi dalam berbagai perundingan perdagangan internasional, namun komitmen yang bisa ditawarkan Indonesia dalam negosiasi adalah hasil kesepakatan dengan K/L dan lembaga di tiap sektor terkait—ini tantangan besar karena belum tentu visi yang dimiliki semua pemangku kepentingan itu sama.<sup>28</sup> Sebagai contoh, keputusan untuk membuka pasar baru (non-tradisional) atau mempertahankan pasar tradisional memiliki dimensi pertimbangan yang berbeda-beda antara K/L. Selain itu, perlu juga dipahami bahwa perjanjian perdagangan internasional harus berperspektif ke depan, sehingga pertimbangan ekonomi atau strategis juga harus merefleksikan proyeksi beberapa

<sup>27</sup> Wawancara: Iman Pambagyo, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, 12 Agustus 2020.

<sup>28</sup> Ibid.

tahun ke depan, atau jangka panjang.<sup>29</sup> Ini tentunya akan berdampak tidak hanya kepada pemilihan pasar atau negara mitra, tetapi juga sektor yang ditawarkan dan dikembangkan oleh Indonesia, baik itu sektor *goods* maupun jasa dan investasi.

---

#### IV.1.1 PERTIMBANGAN EKONOMI

##### 1. Komitmen Reformasi Kebijakan

Untuk meningkatkan daya saing ekonomi, Indonesia perlu menjalankan reformasi kebijakan. Reformasi kebijakan biasanya tidak memiliki pemangku kepentingan pendorong di luar kalangan akademik dan teknokrat dan justru kontroversial karena ada pihak yang jelas merugi. Sebagai contoh, jika ada satu perusahaan monopoli yang bisa menjual harga tinggi ke konsumen, para ahli dan teknokrat jelas mendukung sektor tersebut untuk diliberalisasi agar konsumen bisa mendapatkan harga rendah. Namun, sulit membayangkan konsumen untuk bermobilisasi hanya demi mendapatkan potongan harga sebesar Rp. 10.000,00 (meski secara agregat, potongan sepuluh ribu per konsumen dampaknya signifikan.). Di lain pihak, perusahaan monopoli ini akan melawan dengan keras agar monopolinya terjaga. Kondisi asimetri ini membuat reformasi, meski secara agregat baik untuk ekonomi, sulit dijalankan.

FTA dapat menjadi salah satu cara untuk mendorong reformasi kebijakan di Indonesia dengan membuat para anggota berkomitmen pada sebuah kebijakan dan melindungi reformasi tersebut dari intervensi politik domestik di masa depan (efek “*lock-in*”). FTA sendiri memiliki pemangku kepentingan yang akan mendapatkan keuntungan jelas yang dapat dikerahkan secara terorganisir: eksportir yang akan meraih akses pasar dan importir yang akan mendapatkan barang input lebih murah. Dengan mengaitkan pemangku kepentingan ini ke kebutuhan reformasi, FTA dapat memfasilitasi reformasi kebijakan. Dalam menimbang dan meninjau sebuah FTA, Indonesia perlu menilai apakah FTA tersebut mendorong Indonesia untuk berkomitmen dalam reformasi kebijakan.

---

<sup>29</sup> Ibid.

## 2. Investasi Asing & Transfer Teknologi

Negara berkembang seperti Indonesia membutuhkan investasi asing yang disertai transfer teknologi untuk mendorong produktivitas dan menaikkan pendapatan per kapita guna memajukan pembangunan ekonomi. Ini terutama terkait FTA antar negara maju dan berkembang, meski FTA antar negara berkembang juga dapat memfasilitasi jaringan produksi lintas batas. Liberalisasi perdagangan yang dicanangkan oleh FTA dapat mendorong perusahaan domestik untuk menciptakan sendiri atau mengimpor teknologi guna bersaing (di pasar ekspor atau domestik karena kompetisi impor).<sup>30</sup> Selain itu, FTA juga bisa memfasilitasi investasi asing, yang mendorong transfer teknologi yang akan meningkatkan produktivitas. Investasi asing, terutama yang jangka panjang (*greenfield investment*), dapat menjadi wadah bagi perusahaan-perusahaan asing dari negara maju untuk berbagi teknologi dengan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dalam menimbang dan meninjau sebuah FTA, Indonesia perlu menilai apakah FTA tersebut mendorong investasi asing dan transfer teknologi ke Indonesia.

## 3. Sumber Daya Manusia & Kapasitas Lembaga

Berkaitan dengan poin sebelumnya mengenai transfer teknologi, investasi asing yang dipermudah oleh FTA juga dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, FTA sendiri dapat dirancang agar membantu Indonesia dalam meningkatkan kapasitas lembaga. Bantuan teknis ini bisa dalam bentuk seminar, lokakarya, kunjungan studi, dan beasiswa dalam bidang kepabeanan, kebijakan persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, dan sertifikasi sanitasi serta hambatan teknis ke perdagangan lainnya. Dalam menimbang dan meninjau sebuah FTA, Indonesia perlu menilai apakah FTA tersebut meningkatkan sumber daya manusia dan kapasitas lembaga Indonesia.

---

<sup>30</sup> Pissarides, 1997

---

#### IV.1.2 PERTIMBANGAN STRATEGIS

##### 1. Sentralitas ASEAN

ASEAN adalah landasan utama kebijakan luar negeri Indonesia. Terdapat perdebatan akademis apakah ASEAN merupakan satu-satunya landasan atau satu dari beberapa landasan penting, namun pentingnya ASEAN dalam hubungan luar negeri Indonesia tidak dapat dipungkiri. Pertama, posisi geografis Indonesia sendiri di Asia Tenggara membuat hubungan Jakarta dengan negara-negara di kawasan sangat penting, seperti tertuang dalam ide lingkaran konsentris kebijakan luar negeri Indonesia oleh Dewi Fortuna Anwar.<sup>31</sup> Kedua, ASEAN beserta arsitektur keamanan kawasan yang berpusat padanya juga menyediakan wadah untuk melibatkan negara-negara besar. Ini penting bagi Indonesia karena ini dapat mengurangi dampak merugikan dari persaingan strategis antar negara besar. Dalam menimbang dan meninjau sebuah FTA, Indonesia perlu menilai apakah FTA tersebut mendorong sentralitas ASEAN.

##### 2. Hubungan Bilateral Kunci

Indonesia juga perlu menjaga dan mendorong hubungan bilateral dengan negara-negara utama sesuai kepentingan nasional. Ini terutama terkait dengan negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan para negara anggota utama Uni Eropa; negara dengan kedekatan sejarah seperti anggota Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerjasama Islam. Dalam menimbang dan meninjau sebuah FTA, Indonesia perlu menilai apakah FTA tersebut mendorong hubungan bilateral kunci Indonesia.

##### 3. Diversifikasi

Di era semakin sengitnya persaingan strategis dan pandemi, ketergantungan pada sebuah sumber tunggal, baik itu negara atau perusahaan, beresiko merugikan Indonesia. Sebagai contoh, ketergantungan ekspor jelai (*barley*) Australia ke Tiongkok menyebabkan Canberra rentan saat Beijing menaikkan tarif jelai, yang konon adalah balasan atas inisiasi Australia untuk menginvestigasi penanganan awal virus corona di Tiongkok.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Dewi Fortuna Anwar. "Megawati's Search for an Effective Foreign Policy," in *Governance in Indonesia, Challenges Facing the Megawati Presidency*, eds. Hadi Soesastro et al (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).

<sup>32</sup> Hurst, Daniel. "Why has China slapped tariffs on Australian barley and what can Australia do about it? [Mengapa Tiongkok menaikkan tarif jelai Australia dan apa yang bisa Australia lakukan?]" *The Guardian*, 19 Mei 2020,

Ketergantungan Meksiko dan Kanada terhadap pasar Amerika Serikat juga membuat mereka mudah dipaksa oleh Washington untuk merenegosiasi ulang Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (North American Free Trade Agreement, NAFTA). Dalam menimbang dan meninjau sebuah FTA, Indonesia perlu menilai apakah FTA tersebut mendorong diversifikasi.

## IV.2. STUDI KASUS 1: IA-CEPA

Telaah media yang dilakukan oleh studi ini menemukan bahwa dari berbagai perjanjian ekonomi internasional yang telah disepakati oleh Indonesia, satu yang banyak mendapat perhatian adalah Persetujuan Kemitraan Komprehensif Ekonomi Indonesia-Australia (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership, IA-CEPA). Pentingnya IA-CEPA juga dikemukakan oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan.<sup>33</sup>

IA-CEPA merupakan perjanjian perdagangan kedua Indonesia dengan negara anggota G7 setelah Jepang. Selama ini, hubungan ekonomi Jakarta-Canberra diatur oleh aturan tarif *most favored nation* (MFN) di WTO dan perjanjian perdagangan antara ASEAN, Australia, dan Selandia Baru (ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area, AANZFTA). IA-CEPA mendorong hubungan integrasi ekonomi kedua negara melebihi AANZFTA dengan cakupan sektor lebih luas atas penurunan serta kerja sama ekonomi di bidang-bidang baru. Dengan negosiasi dimulai pada 2 November 2010, kedua negara menyetujui komitmen integrasi ekonomi ini pada tanggal 4 Maret 2019. Setelah melengkapi proses ratifikasi, IA-CEPA mulai berlaku pada tanggal 5 Juli 2020.<sup>34</sup>

Sebagai FTA yang telah berlaku, terdapat beberapa alasan mengapa IA-CEPA perlu didalami lebih lagi. Pertama, seperti telah disebutkan, ini merupakan perjanjian FTA kedua Indonesia dengan negara anggota G7 setelah Jepang, yang berarti cakupan perjanjian lebih komprehensif dari sekedar pemangkasan tarif barang. Patut dianalisis apakah IA-CEPA mendorong reformasi

---

<https://www.theguardian.com/business/2020/may/20/why-has-china-slapped-tariffs-on-australian-barley-and-what-can-australia-do-about-it>

<sup>33</sup> Wawancara: Iman Pambagyo, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, 12 Agustus 2020.

<sup>34</sup> Di Indonesia sendiri, Dewan Perwakilan Rakyat meratifikasi IA-CEPA pada tanggal 28 Februari 2020 melalui UU No.1/2020.

kebijakan, menarik investasi asing, dan meningkatkan kualitas SDM bagi Indonesia. Kedua, IA-CEPA merupakan FTA Indonesia dengan negara mitra yang sudah memiliki FTA dengan Indonesia melalui kerangka ASEAN. Selama ini, tarif arus barang antara Jakarta dan Canberra diatur oleh tarif MFN yang berlaku secara umum untuk setiap anggota WTO dan tarif preferensial bagi AANZFTA. Ini mengindikasikan kedua negara ingin mendorong hubungan ekonomi lebih dalam. Ini menjadi sebuah perkembangan menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengingat situasi geopolitik di Indo-Pasifik dengan kebangkitan strategis Tiongkok dan perang dagang AS-Tiongkok.

**Tabel 4.2. Pertimbangan Keuntungan Ekonomi Kualitatif dan Pertimbangan Strategis atas IA-CEPA**

Pertimbangan	Tingkat Dukungan		
	Tidak Kondusif	Netral	Kondusif
<b>DAMPAK EKONOMI</b>			
Komitmen Reformasi Kebijakan			Ya
Investasi Asing & Transfer Teknologi			Ya
Kapasitas Lembaga & Sumber Daya Manusia			Ya
<b>DAMPAK STRATEGIS</b>			
Sentralitas ASEAN		Ya	
Hubungan Bilateral Kunci			Ya
Diversifikasi Hubungan			Ya

## 1. Pertimbangan ekonomi IA-CEPA

### a. Komitmen Reformasi Kebijakan

Menilik komitmen dalam IA-CEPA, terdapat aspek dalam perjanjian yang dapat mendorong reformasi kebijakan di Indonesia dalam hal pencegahan korupsi, memberikan kepastian bisnis, dan membantu keamanan pangan (*food security*) dan juga swasembada pangan (*food self-sufficiency*). Ini terkait komitmen Indonesia untuk mempermudah akses impor sapi dan daging sapi dari Australia.

Saat ini, Indonesia adalah net importir daging sapi. Kebutuhan konsumsi domestik mencapai 700 ribu ton per tahun, sementara produksi dalam negeri hanya mampu memenuhi sekitar 400 ribu ton.<sup>35</sup> Selisih 300 ribu ini ditutup oleh impor dari Australia

---

<sup>35</sup> "RI Butuh 1,7 juta Ekor Sapi Impor Setahun, Mentan: Tak Bisa Dibiarkan," *Katadata*, 20 Januari 2020, <https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a498e6615b/ri-butuh-17-juta-ekor-sapi-impor-setahun-mentan-tak-bisa-dibiarkan>

sendiri sudah menjadi mitra utama di bidang impor sapi.<sup>36</sup> Saat ini, impor sapi jantan, sapi induk, dan daging sapi beku dikenakan tarif MFN 5%. Untuk kebutuhan domestik dan stabilitas harga tadi, Kementerian Pertanian (Kementan) tiap tahunnya menerbitkan kuota impor dengan tarif 0%. Besaran kuota dan siapa importir penerima kuota ini ditentukan oleh Kementan dan pada praktiknya, pengambilan keputusan tersebut kurang transparan, sehingga menjadi ajang korupsi. Skandal suap izin impor daging yang melibatkan Kementan dan Presiden Partai Keadilan Sejahtera Luthfi Hasan Ishaq tahun 2013 merupakan contoh jelas.<sup>37</sup> Tanpa korupsi sekali pun, kuota fluktuatif ini merupakan sumber ketidakpastian bagi bisnis.

Komitmen yang tertuang dalam IA-CEPA memberikan tarif dan kuota preferensial untuk produk sapi Australia ke pasar Indonesia. Untuk impor daging sapi beku dari Australia, kuota dihapus dan tarif impor menjadi 2,5% di tahun pertama perjanjian dan akan menjadi 0% di tahun ke-5.<sup>38</sup> Untuk sapi induk Australia, kuota juga dihapus dan tarif impor menjadi 0% di tahun pertama.<sup>39</sup> Untuk sapi jantan Australia, diberlakukan sistem kuota: tarif di luar kuota 5% seperti MFN dan tarif di dalam kuota 0%. Di tahun pertama, kuota 0% akan diberikan pada 575.000 ekor sapi dan akan meningkat tiap tahun sampai menjadi 700.000 ekor di tahun ke-6.<sup>40</sup> Jumlah kuota ini akan ditinjau jika perlu kenaikan.

Dalam hal ini, IA-CEPA membantu reformasi kerangka kebijakan dalam dua hal. Pertama, pemotongan tarif impor produk sapi membantu tujuan pemerintah Indonesia dalam keamanan dan swasembada pangan. Pemangkasan tarif untuk sapi jantan dan daging sapi beku akan membantu menjaga pasokan sapi di Indonesia dan menstabilkan harga, sehingga keamanan pangan terjaga. Tarif 0% untuk sapi induk dari Australia juga akan membantu tujuan pemerintah untuk mendorong

---

<sup>36</sup> “Indonesia Buka Keran Impor Sapi, Australia Diprediksi Masih Akan Rajai Pasar,” *Detik*, 21 Januari 2020, <https://news.detik.com/abc-australia/d-4867788/indonesia-buka-keran-impor-sapi-australia-diprediksi-masih-akan-rajai-pasar>

<sup>37</sup> “Suap Daging PKS, Begini Awal Mulanya,” *Tempo*, 31 Januari 2013, <https://nasional.tempo.co/read/458101/suap-daging-pks-begini-awal-mulanya/full&view=ok>

<sup>38</sup> Lampiran 2-A. Jadwal Komitmen Tarif Indonesia, hal. 2, [http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20191203\\_2a-indonesia-tariff-schedule-bahasa.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20191203_2a-indonesia-tariff-schedule-bahasa.pdf)

<sup>39</sup> Lampiran 2-A. Jadwal Komitmen Tarif Indonesia, hal. 1, [http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20191203\\_2a-indonesia-tariff-schedule-bahasa.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20191203_2a-indonesia-tariff-schedule-bahasa.pdf)

<sup>40</sup> Apendiks 1-A. 1: Tarif Rate Quotas, hal. 3. [http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20191203\\_2a1-appendix-2a1-tariff-rate-quotas.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20191203_2a1-appendix-2a1-tariff-rate-quotas.pdf)

swasembada pangan Indonesia. Kedua, penetapan dan penghapusan kuota akan memberikan kepastian bisnis bagi importir Indonesia dan mencegah praktik korupsi bagi pembuat kebijakan. Komitmen penetapan kuota dengan jumlah pasti akan memberikan pengusaha kepastian untuk melakukan perencanaan secara jangka panjang dan mengurangi celah bagi tindakan penyuapan.

b. Investasi Asing & Transfer Teknologi

Selain di bidang perdagangan, penanaman modal antara Indonesia dan Australia juga rendah. Keduanya bukan mitra investasi utama masing-masing, meski lokasi geografis yang berdekatan. Di tahun 2018, total investasi Australia di Indonesia hanya sebesar AUS\$ 5,6 miliar, sekitar 0,3% dari total investasi eksternal Australia dan 1,5% dari jumlah investasi asing di Indonesia.<sup>41</sup> Beberapa hambatan bagi investasi dari Australia yang diidentifikasi oleh Canberra dan Jakarta meliputi: pembatasan kepemilikan perusahaan, peraturan usaha yang kompleks, keterbatasan infrastruktur, dan kesulitan dalam mengidentifikasi tatanan otoritas (i.e. pusat atau daerah).<sup>42</sup> Di lain pihak, ini menunjukkan adanya potensi untuk meningkatkan penanaman modal ke Indonesia dari seberang selatan Samudra Hindia. Iman Pambagyo, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan mengungkapkan bahwa meski pasarnya tidak besar untuk ekspor barang Indonesia, Australia berpotensi menjadi sumber investasi.<sup>43</sup> Beliau juga menuturkan bahwa IA-CEPA mendorong konsep *powerhouse economic cooperation*, di mana sumber daya alam Australia dapat diekspor ke Indonesia lalu diproses menjadi produk manufaktur untuk pasar Indonesia, Australia, atau negara ketiga.

Terkait ini, IA-CEPA memfasilitasi peningkatan penanaman modal dari Australia ke Indonesia dalam dua hal penting. Pertama, IA-CEPA memberikan peningkatan pada batas atas kepemilikan asing untuk investor dari Australia. Dibandingkan dengan Daftar Negatif Investasi (DNI) 2016, pembatasan di beberapa sektor dikurangi, terutama dalam sektor-sektor yang banyak menerima investasi dari Australia seperti

---

<sup>41</sup> ABS (2019) Category: 5352.0 International Investment Position, Australia: Supplementary Statistics.

<sup>42</sup> Joint Feasibility Study Report on FTA between Indonesia and Australia.

[http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20180523\\_joint-feasibility-study-report-on-fta-between-indonesia-and-australia.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180523_joint-feasibility-study-report-on-fta-between-indonesia-and-australia.pdf) (p. 35)

<sup>43</sup> Wawancara: Iman Pambagyo, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, 12 Agustus 2020.

industri tambang dan jasa tambang (menjadi 67%) dan industri perhotelan bintang 3-5 (menjadi 100%).<sup>44</sup> Pada tahun 2019, ambang batas kepemilikan asing banyak ditingkatkan dan beberapa dihapus, termasuk beberapa sektor industri yang Australia raih secara preferensial di IA-CEPA. Secara umum, ini berita baik bagi prospek peningkatan investasi dari Australia dan perlu diingat juga, komitmen preferensial yang tertuang dalam IA-CEPA memberikan kepastian usaha lebih dibandingkan peraturan kementerian. Kedua, IA-CEPA juga mencanangkan pembentukan penyelesaian sengketa investor-negara (*investor-state dispute settlement*, ISDS). Instrumen ini akan memastikan adanya pemberian perlakuan sama antar investor nasional dan Australia, perlindungan hukum setara pada investor Australia, dan kompensasi atas pengambilalihan perusahaan Australia. Ini akan menyediakan kepastian usaha pada investor Australia sehingga memfasilitasi peningkatan penanaman modal.

c. Sumber Daya Manusia & Kapasitas Lembaga

Pembahasan kerja sama Australia-Indonesia dalam peningkatan sumber daya manusia Indonesia tentu tak bisa lepas dari sektor pendidikan. Di akhir tahun 2019, terdapat sekitar 17.000 pelajar Indonesia di Australia, menjadikannya negara pertama tujuan pelajar Indonesia di mancanegara.<sup>45</sup> Di Australia sendiri, pelajar dari Indonesia menempati urutan ke-9 dari pelajar internasional (sekitar 2.4% dari total) dengan pelajar Tiongkok menempati urutan pertama (30% dari total).<sup>46</sup> Sektor pendidikan tingkat lanjut di Australia merupakan sektor pendidikan paling terbuka untuk pelajar internasional di dunia, dengan rasio pelajar internasional terhadap populasi tertinggi di dunia dan pelajar internasional rata-rata mewakili sekitar 27% dari total pelajar di tiap universitas.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Lampiran I: Jadwal Indonesia untuk Jasa dan Investasi,  
[http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20191203\\_14-9-annex-i-indonesia-services-and-investment-schedule-catatan-pengantar-lampiran-i.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20191203_14-9-annex-i-indonesia-services-and-investment-schedule-catatan-pengantar-lampiran-i.pdf)

<sup>45</sup> "Ada 17 Ribu Pelajar Asal Indonesia di Australia," *Tribun Makassar*, 11 Juli 2020,  
<https://makassar.tribunnews.com/2020/07/11/ada-17-ribu-pelajar-asal-indonesia-di-australia-begini-hebatnya-pendidikan-negeri-kanguru>

<sup>46</sup> "Australia Negara Terfavorit untuk Studi Mahasiswa Indonesia," *Republika*, 9 Februari 2016,  
<https://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/16/02/09/o29t2c366-australia-negara-terfavorit-untuk-studi-mahasiswa-indonesia>

<sup>47</sup> "Student Numbers," *Department of Education, Skills, and Employment*, Juni 2020,  
<https://internationaleducation.gov.au/research/DataVisualisations/Pages/Student-number.aspx>

Membangun hubungan kerja sama yang telah ada ini, IA-CEPA mendorong peningkatan sumber daya manusia Indonesia dalam dua hal. Pertama, terkait dengan investasi, IA-CEPA akan meningkatkan ambang batas atas investasi asing dari Australia di sektor pendidikan dari 40% menjadi 67%.<sup>48</sup> Dibukanya akses bagi lembaga pendidikan tingkat lanjut Australia untuk beroperasi secara langsung dengan kepemilikan mayoritas membuat pemain sektor pendidikan Australia lebih percaya diri untuk membuka kampus di Indonesia. Monash University dari Melbourne dan Western University dari Perth telah mengumumkan rencana mereka untuk berekspansi di sektor perguruan tinggi Indonesia. Ini akan membantu peningkatan sumber daya manusia dengan mempermudah pelajar Indonesia untuk mendapatkan pendidikan tingkat lanjut kualitas tinggi tanpa harus ke Australia. Monash University sendiri telah mengkonfirmasi rencana mereka untuk membuka kampus untuk gelar Magister dan Doktor di Jakarta.<sup>49</sup> Kedua, IA-CEPA juga meningkatkan kuota pengajuan visa kerja dan liburan (*working and holiday visa, WHV*) bagi pekerja Indonesia dan menetapkan nota kesepahaman untuk Skema Visa Pelatihan Berbasis Kerja. Sebelum IA-CEPA, kuota WHV bagi pencari kerja di Indonesia hanya 1.000 dan IA-CEPA akan menjadikan kuota ini 4.100 pada tahun pertama dan ditingkatkan 5% setiap hingga akhirnya menjadi 5.000.<sup>50</sup> Skema Visa Pelatihan Berbasis Kerja juga akan membuka kesempatan bagi 200 pekerja Indonesia tiap tahunnya untuk mendapatkan pelatihan vokasi langsung di perusahaan Australia di bidang pendidikan, pariwisata, telekomunikasi, infrastruktur, kesehatan, dan energi.<sup>51</sup>

## 2. Pertimbangan Strategis IA-CEPA

### a. Sentralitas ASEAN

---

<sup>48</sup> Sebayang, Rehia Indrayanti Beru. "IA-CEPA Resmi Diteken, Dua Kampus Australia ini Siap Masuk RI," *CNBC Indonesia*, 4 Maret 2019, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20190304191215-4-58828/ia-cepa-resmi-diteken-dua-kampus-australia-ini-siap-masuk-ri>

<sup>49</sup> "Monash University announces new campus in Indonesia [Monash University mengumumkan kampus baru di Indonesia]," *Monash University*, 10 Februari 2020, <https://www.monash.edu/news/articles/monash-university-announces-new-campus-in-indonesia#.XkC7TCILtBE.twitter>

<sup>50</sup> "Australia Tambah Kuota Visa Kerja dan Liburan WNI jadi 4.100 Orang," *Kontan*, 10 Juli 2020, <https://nasional.kontan.co.id/news/australia-tambah-kuota-visa-kerja-dan-liburan-untuk-wni-jadi-4100-orang>

<sup>51</sup> "Memorandum of Understanding on a Pilot Workplace-Based Training Visa Arrangement," *DFAT*, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepa-mou-pilot-workplace-based-training-visa-arrangement>

Sebagai perjanjian ekonomi bilateral antara Indonesia dan Australia, IA-CEPA tentu berada di luar cakupan FTA yang berbasis dengan ASEAN. Namun, perlu dicatat bahwa sebelum IA-CEPA, Indonesia dan Australia sendiri sudah menjadi mitra dalam AANZFTA. Komitmen-komitmen yang tertuang dalam IA-CEPA sendiri membangun hubungan ekonomi Jakarta-Canberra dari yang sudah tertuang di AANZFTA dan membuka ekonomi keduanya dengan lebih komprehensif dan di sektor-sektor yang sebelumnya tidak dibahas di AANZFTA. Sektor pertanian (e.g. gandum dan daging sapi) dan jasa (e.g. pendidikan) merupakan contohnya. Dalam praktik keseharian tata niaga, eksportir dan importir Indonesia menggunakan fasilitas IA-CEPA dan AANZFTA secara komplementer. Sebagai contoh, dalam sebuah wawancara, beberapa eksportir menyatakan bahwa mereka sudah menggunakan fasilitas tarif preferensial IA-CEPA yang lebih rendah. Beberapa eksportir lain mengakui bahwa mereka tetap menggunakan fasilitas AANZFTA karena diminta oleh mitra usaha Australia karena dibutuhkan surat keterangan asal AANZFTA dalam rantai pasokan pengusaha Australia tersebut.<sup>52</sup>

Australia sendiri juga mitra wicara (*dialogue partner*) ASEAN sejak tahun 1976 dan merupakan pendukung awal ASEAN dalam mencanangkan ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP). Dalam Konferensi Tinggi Asia Timur tahun 2019 di Thailand misalnya, Perdana Menteri Scott Morrison menyatakan dukungan Australia atas AOIP dan komitmen Canberra atas “visi Indo-Pasifik dengan ASEAN di pusatnya”.<sup>53</sup> Meski IA-CEPA tidak secara aktif mengukuhkan ASEAN sebagai landasan kebijakan luar negeri Indonesia, perjanjian ini tidak berdampak negatif pada landasan tersebut.

b. Hubungan Bilateral Kunci

Kedekatan geografis Australia dengan Indonesia membuat pentingnya Australia dalam kebijakan luar negeri Indonesia tak bisa dipungkiri. Dalam lingkaran konsentris kebijakan luar negeri, Australia masuk dalam lingkaran konsentris kedua dalam golongan Pasifik Selatan, bersama dengan Papua Nugini, Timor

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan KADIN dan APINDO di FGD Daerah Indonesia-EU CEPA, 30 Juni 2020.

<sup>53</sup> “Visit to Thailand for East Asia Summit [Kunjungan ke Thailand untuk Konferensi Tinggi Asia Timur],” *Office of the Prime Minister of Australia*, 2 November 2019, <https://www.pm.gov.au/media/visit-thailand-east-asia-summit>

Leste, dan Selandia Baru.<sup>54</sup> Karena kedekatan geografis, negara-negara di kawasan ini seharusnya lebih menjadi prioritas kebijakan luar negeri Indonesia dibanding beberapa negara besar di Asia Timur yang hubungan ekonomi dan strategisnya lebih berkembang dengan Indonesia. Dalam beberapa kesempatan, baik Jakarta dan Canberra sendiri telah menggarisbawahi hubungan ekonomi saat ini masih jauh di bawah potensi, mengingat kedekatan geografis dan besarnya ekonomi masing-masing. Karena itu, IA-CEPA merupakan instrumen penting untuk memperkuat hubungan bilateral Jakarta dan Canberra.

c. Diversifikasi

Bagi Indonesia, ada kebutuhan untuk memperluas pasar dan sumber investasi di luar pangsa pasar tradisional di negara-negara Asia Timur dan ASEAN. Tiongkok saja merupakan tujuan dari 15% barang ekspor dan 24% asal barang impor Indonesia. Australia adalah pasar negara maju yang banyak belum dimanfaatkan yang lokasinya berdekatan dengan Indonesia, tidak seperti pasar-pasar non-tradisional di Afrika dan Amerika Latin yang secara geografis jauh dari Indonesia. Bagi Australia, kebutuhan untuk melampaui hubungan ekonomi yang terpusat di Asia Timur lebih besar lagi. Lebih bergantung daripada Indonesia, Tiongkok merupakan tujuan dari 33% pasar ekspor dan 20% dari asal barang impor Australia. Kebutuhan diversifikasi bagi Canberra juga semakin mendesak karena perang dagang antara Tiongkok dan Australia di bidang ekspor jelai dan daging sapi. Bagi Indonesia dan Australia, pandemi virus corona juga semakin menggarisbawahi kebutuhan untuk mendiversifikasi hubungan ekonomi. Sebagai wadah untuk memperdalam dan memperluas jalinan antara Indonesia dan Australia, IA-CEPA adalah langkah menuju tujuan tersebut.

#### IV.3. STUDI KASUS 2: RCEP

Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP) merupakan perjanjian perdagangan megaregional yang meliputi 10 negara ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan awalnya India. Ide mengenai RCEP

---

<sup>54</sup> Anwar, Dewi Fortuna. "Megawati's Search for an Effective Foreign Policy," in *Governance in Indonesia, Challenges Facing the Megawati Presidency*, eds. Hadi Soesastro et al (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).

lahir dari proses ASEAN mengharmonisasikan tiap FTA ASEAN dengan mitra (ASEAN Plus FTA). Setelah berbagai opsi integrasi yang hanya beranggotakan sebagian mitra ASEAN, ide harmonisasi inklusif meliputi ASEAN+6 (ASEAN, Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, Australia, Selandia Baru, dan India) lahir pada tahun 2010 oleh inisiasi Indonesia.<sup>55</sup> Negosiasi pertama dimulai di Brunei pada bulan Mei 2013. Di Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur 2019, para pemimpin negara anggota mengumumkan bahwa sebagian besar negosiasi bab RCEP telah selesai dan persetujuan akan segera dicapai. Sayangnya, di konferensi yang sama, India mengumumkan bahwa New Delhi akan keluar dari RCEP utamanya dikarenakan isu akses pasar. Tanpa India, RCEP mencakup sekitar 30% ekonomi dan populasi dunia, tetapi menjadikannya perjanjian ekonomi kawasan terbesar di dunia. Pada 20 November 2020, perjanjian RCEP ditandatangi dan akan berlaku 60 hari ketika proses ratifikasi rampung di setidaknya 6 negara anggota ASEAN dan 3 negara non-ASEAN.

Makalah ini mengangkat RCEP sebagai studi kasus kedua berdasarkan dua alasan. Pertama, cakupan anggota dan ukuran ekonomi RCEP menjadikannya prioritas bagi Indonesia. RCEP mewakili sebagian besar 10 negara mitra utama perdagangan Indonesia, dengan pengecualian Uni Eropa dan Amerika Serikat. Seperti yang dijelaskan oleh Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, RCEP akan menjadi "*mega-regional Free Trade Agreement*".<sup>56</sup> Kedua, proses inisiasi dan struktur negosiasi yang ASEAN-sentris merupakan upaya konkret ASEAN dalam membentuk tatanan ekonomi kawasan yang patut dipelajari. RCEP merupakan FTA yang "berpusat pada ASEAN" dan "*footprint* Indonesia di RCEP sangat kental."

Tabel 4.3. Pertimbangan Keuntungan Ekonomi Kualitatif dan Pertimbangan Strategis atas RCEP

Pertimbangan	Tingkat Dukungan		
	Tidak Kondusif	Netral	Kondusif

<sup>55</sup> Wawancara: Iman Pambagyo, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, 12 Agustus 2020.

<sup>56</sup> Ibid.

DAMPAK EKONOMI			
Komitmen Reformasi Kebijakan			Ya
Investasi Asing & Transfer Teknologi		Ya	
Kapasitas Lembaga & Sumber Daya Manusia		Ya	
DAMPAK STRATEGIS			
Sentralitas ASEAN			Ya
Hubungan Bilateral Kunci			Ya
Diversifikasi Hubungan		Ya	

## 1. Pertimbangan Ekonomi RCEP

### a. Komitmen Reformasi Kebijakan

Dalam menimbang potensinya untuk mendorong reformasi kebijakan di Indonesia, perlu dicatat bahwa RCEP adalah perjanjian dengan cakupan yang tidak mendalam relatif dengan FTA lain. RCEP memiliki 20 bab negosiasi dan diproyeksikan akan menghapus tarif untuk sekitar 80% produk barang yang dinegosiasikan, dengan banyak pengecualian untuk produk pertanian.<sup>57</sup> Ini relatif rendah jika dibandingkan dengan Kemitraan Komprehensif dan Progresif Trans-Pasifik (Comprehensive and Progressive Trans-Pacific Partnership, CPTPP). CPTPP mencakup 30 bab dan akan menghapus tarif untuk sekitar 99% produk barang. RCEP juga meliputi komitmen terbatas dalam bidang jasa, hak kekayaan intelektual, perlindungan buruh dan lingkungan, dan ketentuan atas badan usaha milik negara; sektor-sektor yang dapat menjadi pendorong reformasi kebijakan bagi Indonesia.<sup>58</sup>

Namun sebagai perjanjian yang lahir dari gabungan FTA ASEAN dengan mitra, satu hal baru yang dicanangkan RCEP adalah harmonisasi ketentuan asal barang (*rules of origin*, ROO). Ketentuan ROO dapat menjadi hambatan bagi perdagangan karena tumpang tindih antar berbagai FTA di Asia Timur dan Asia Tenggara yang memiliki

<sup>57</sup> Reinh, William Alan & Jack Caporal. "At Last, An RCEP Deal [Akhirnya, Persetujuan atas RCEP]," *Center for Strategic and International Studies*, 3 Desember 2019, <https://www.csis.org/analysis/last-rcep-deal>

<sup>58</sup> "RCEP: Legal Text [RCEP: Naskah Hukum]," *ASEAN Secretariat*, <https://rcepsec.org/legal-text/>

ketentuan berbeda dalam setiap ROO.<sup>59</sup> Fenomena ini semakin perlu direformasi mengingat perdagangan internasional hari ini banyak berupa barang setengah jadi (*intermediate goods*) dalam rantai pasokan kawasan (*regional supply chain*). Dengan harmonisasi ROO, RCEP akan memfasilitasi perdagangan internasional dan mendorong partisipasi Indonesia dalam rantai pasokan kawasan. RCEP diproyeksikan akan mendorong ekspor Indonesia untuk meningkat sebanyak 3.8% di tahun 2030 dari proyeksi acuan awal (*baseline*).<sup>60</sup>

b. Investasi Asing & Transfer Teknologi

Negara-negara anggota RCEP sendiri merupakan negara asal utama investasi asing bagi Indonesia. Namun mirip dengan reformasi kebijakan secara keseluruhan, RCEP tidak banyak menghadirkan terobosan baru memfasilitasi investasi asing ke Indonesia. RCEP memiliki bab mengenai ISDS, namun dalam bab ini, tertuang ketentuan bahwa instrumen ini hanya akan aktif jika dalam tiga tahun setiap negara anggota setuju.<sup>61</sup> RCEP juga tidak memiliki komitmen baru dalam pelarangan atas lokalisasi data dan hambatan untuk aliran data lintas batas.<sup>62</sup> Dua hal ini penting bagi perusahaan-perusahaan multinasional untuk menjangkau konsumen dan berkoordinasi lintas batas. Meski tidak secara aktif menghambat investasi asing ke Indonesia, RCEP tidak menghadirkan prakarsa baru yang dapat mendorong investasi asing ke Indonesia.

c. Sumber Daya Manusia & Kapasitas Lembaga

Hal serupa juga terjadi bagi RCEP dan peningkatan sumber daya manusia Indonesia. Dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan, RCEP menggunakan metode daftar

---

<sup>59</sup> RCEP: Outcomes at a glance [RCEP: Hasil Sekilas],” DFAT, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/rcep>

<sup>60</sup> Petri & Plummer et al. “Going it Alone in the Asia-Pacific: Regional Trade Agreements without the United States [Jalan Sendiri di Asia-Pasifik: Perjanjian Perdagangan Regional tanpa Amerika Serikat],” Peterson Institute for International Economics, October 2017, <https://www.piie.com/system/files/documents/wp17-10.pdf>

<sup>61</sup> Tobin, Meaghan. “Explained: the difference between RCEP and CPTPP [Penjelasan: Perbedaan RCEP dan CPTPP],” South China Morning Post, 6 Juli 2019, <https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/3017487/explained-difference-between-rcep-and-cptpp>

<sup>62</sup> “RCEP: Outcomes at a glance [RCEP: Hasil Sekilas],” DFAT, <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/rcep>

positif dan negatif investasi dengan banyak keleluasaan bagi negara anggota.<sup>63</sup> Pelarangan atas kepemilikan asing juga terbatas dalam RCEP, sesuatu yang dapat mendorong investasi seperti kita lihat di sektor pendidikan dan IA-CEPA. Meski tidak secara aktif menghambat peningkatan sumber daya manusia, RCEP tidak menghadirkan langkah baru yang dapat meningkatkan sumber daya manusia Indonesia.

## 2. Pertimbangan Strategis RCEP

### a. Sentralitas ASEAN

Sebagai perjanjian yang lahir dari harmonisasi FTA ASEAN dengan negara-negara mitranya, RCEP adalah perjanjian ekonomi internasional yang paling mengedepankan sentralitas ASEAN. RCEP sendiri adalah puncak dari integrasi ekonomi regional yang bertumpu pada ASEAN. Pada tahun 2001, ide integrasi ekonomi di kawasan tertuang dalam Wilayah Perdagangan Bebas Asia Timur (East Asia Free Trade Area, EAFTA) yang adalah ASEAN+3 (ASEAN dengan Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan). Pada tahun 2006, Jepang mendorong ide ini menjadi Kemitraan Ekonomi Komprehensif Asia Timur (Comprehensive Economic Partnership in East Asia, CEPEA) yang adalah ASEAN+6 (ditambah dengan Australia, Selandia Baru, dan India). Pada tahun 2010, Indonesia mendorong ide ini saat memegang kursi kepemimpinan ASEAN sehingga akhirnya RCEP dimulai negosiasinya 3 tahun kemudian. Meski India sampai saat tulisan ini tetap keluar dari perjanjian, RCEP tetap berpegang pada semangat sentralitas ASEAN ini.

### b. Hubungan Bilateral Kunci

Berkaitan erat dengan hakikatnya yang ASEAN-sentris, negara-negara anggota RCEP meliputi negara-negara yang berada di lingkaran konsentris kebijakan luar negeri Indonesia di Asia Tenggara, Pasifik Selatan, dan Asia Timur. Selain mitra dagang dan sumber utama investasi asing, negara-negara anggota RCEP juga merupakan mitra-mitra strategis Indonesia. Dari hubungan-hubungan bilateral kunci Indonesia, hanya

---

<sup>63</sup> "Crafting Trade Rules for a Digital Age in RCEP [Menempa Aturan Perdagangan di Era Digital untuk RCEP]," *Asia Trade Centre*, Oktober 2018,  
<https://static1.squarespace.com/static/5393d501e4b0643446abd228/t/5bcd233c8165f55241feadc7/1540170559464/Policy+Brief+18-07+IP+and+EC+Oct+2018.pdf>

negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat yang tidak tergabung dalam RCEP. Tidak dipungkiri bahwa RCEP memajukan hubungan bilateral Indonesia dengan negara-negara utama.

c. Diversifikasi

Dalam hal diversifikasi, RCEP berpotensi menghasilkan skenario yang cukup unik. Karena sebagian besar negara mitra Indonesia berada dalam RCEP, perjanjian ini bisa menyebabkan hubungan Indonesia dengan negara-negara di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Pasifik Selatan semakin erat dan mengurangi potensi diversifikasi hubungan Indonesia dengan negara dari kawasan lain. Namun, karena negara-negara mitra ini memiliki ukuran pangsa pasar dan haluan politik strategis tersendiri, terdapat juga potensi negara anggota saling menjadi penyeimbang antara hubungan mereka dengan Indonesia. Sebagai contoh, ketergantungan dengan Tiongkok di Prakarsa Sabuk dan Jalan (Belt and Road Initiative, BRI) dapat diseimbangi oleh kerja sama dengan Jepang di Kemitraan untuk Infrastruktur Berkualitas (Partnership for Quality Infrastructure), yang pada gilirannya, dapat diseimbangi oleh kemitraan dengan Australia dan seterusnya. Konon, untuk tujuan ini secara implisit, Jepang memperluas inisiasi ASEAN+3 di EAFTA menjadi ASEAN+6 di CEPEA. Tingkat keseimbangan ini bisa lebih meningkat lagi jika India kembali bergabung dalam RCEP.

## TARGET 2020

Untuk tahun 2020, tantangan terbesar memang pandemi COVID-19. Meskipun sejumlah perundingan masih berjalan secara virtual, tetap besar tantangan karena berbeda dengan proses negosiasi langsung, selain juga terdapat kebijakan yang berbeda-beda dari negara-negara mitra mengenai perundingan secara virtual.<sup>64</sup> Sebagai contoh adalah Indonesia-European Union CEPA yang sempat terhenti agak lama karena di Eropa terjadi *lockdown*. Indonesia menawarkan pertemuan secara virtual dari rumah masing-masing, tapi di Eropa ada protokol untuk kegiatan resmi, apalagi perundingan, yaitu harus dilakukan tersentralisasi di Gedung Komisi Eropa.

Kementerian Perdagangan c.q. Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional tetap menjalankan fungsinya seperti biasa. Meski ada tantangan, opsi pertemuan virtual semakin banyak dipakai, bahkan seperti dijelaskan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, sejak Juli semakin padat pertemuan dengan berbagai mitra, tidak hanya perundingan yang sifatnya menuju *trade deal*, *trade agreement* baik itu ETA, FEA atau CEPA, tetapi juga menangani Bilateral Joint Committee (atau *Commission*) untuk menangani isu-isu khusus misalnya dengan India dan Pakistan.<sup>65</sup> Seluruh proses perundingan yang dilakukan di tahun 2019, seperti di Tabel 4.1 masih berlanjut, antara lain dengan Korea, Tunisia, Iran, Jepang, dan juga RCEP. Selain itu, tugas untuk mendapatkan akses pasar yang terbuka tetap dilakukan, dan melalui perundingan-perundingan Indonesia tetap berupaya membuka lagi akses pasar.

Satu hal yang menarik adalah, meskipun pandemi terlihat sebagai tantangan besar di tahun 2020, namun isu koordinasi di dalam negeri tetap menjadi tantangan yang juga sangat berdampak.<sup>66</sup> Ini terkait dengan yang telah dibahas di awal bab ini, yakni mengenai adanya pertimbangan yang berbeda-beda (strategis dan ekonomi) mengenai posisi Indonesia dalam suatu perundingan perdagangan.

---

<sup>64</sup> Wawancara: Iman Pambagyo, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, 12 Agustus 2020.

<sup>65</sup> Ibid.

<sup>66</sup> Ibid.

#### **IV.4. PENUTUP**

Makalah kebijakan ini berfokus pada pertimbangan keuntungan ekonomi kualitatif dan pertimbangan strategis terhadap perjanjian ekonomi internasional yang dilakukan Indonesia. Dari kajian yang dilakukan, dapat dipahami bahwa Indonesia masih terus mempertahankan, serta berupaya memperluas akses ke pasar-pasar tradisional, dan secara paralel juga membuka pasar-pasar yang selama ini belum terjangkau, selain itu juga dilakukan upaya diversifikasi ekspor dan impor.

Bab ini melakukan kajian kualitatif untuk menilai perjanjian ekonomi internasional berdasarkan pertimbangan ekonomi (komitmen reformasi kebijakan, investasi asing & transfer teknologi, dan kapasitas lembaga & sumber daya manusia), dan pertimbangan strategis (sentralitas ASEAN sebagai soko guru politik luar negeri Indonesia, hubungan bilateral kunci, dan diversifikasi hubungan). Sebagai studi kasus, secara detail bab ini mengkaji IA-CEPA dan RCEP, dan menemukan bahwa:

1. Baik pertimbangan ekonomi maupun strategis penting dalam menilai suatu FTA. Meskipun FTA secara alami adalah perjanjian ekonomi, tetapi pertimbangan strategis juga bagian yang sangat penting dalam menentukan prioritas dan kesuksesan suatu FTA.
2. IA-CEPA bisa menjadi model untuk menilai suatu FTA bilateral. IA-CEPA sangat menguntungkan secara ekonomi, dan meskipun tidak ASEAN-sentrism tetapi ia sangat sesuai dengan kepentingan strategis Indonesia. Ini menunjukkan bahwa FTA yang tinggi keuntungan ekonomi dan strategis harus mendapatkan prioritas di antara negosiasi FTA lainnya.
3. RCEP adalah FTA multilateral yang memiliki keuntungan ekonomi bagi Indonesia, terutama karena negara mitra yang terlibat adalah negara-negara penting dalam arsitektur ekonomi kawasan, contohnya Tiongkok dan Jepang. Di sisi lain, ia juga menawarkan keuntungan strategis bahwa ia sangat ASEAN-sentrism (sesuai dengan arahan politik luar negeri Indonesia) dan sangat mendukung hubungan bilateral kunci (semua negara RCEP adalah mitra penting Indonesia). Keuntungan strategis ini justru melampaui keuntungan ekonomi, dan dengan profil yang demikian RCEP akan menjadi prioritas perundingan FTA Indonesia.

Sebagai catatan akhir, dua studi kasus ini dipilih berdasarkan penilaian subjektif bahwa dua perjanjian perdagangan ini bernilai penting dan menjadi prioritas; ini adalah penilaian subjektif yang mendapatkan konfirmasi dari hasil telaah media atas atensi publik dan juga konfirmasi dari pendapat kementerian perdagangan. Meski demikian, dua studi kasus ini belum tentu dapat merepresentasikan keseluruhan perjanjian ekonomi internasional yang dilakukan oleh Indonesia, baik yang sudah rampung maupun yang masih dalam tahap perundingan. Oleh karena itu, studi ini merekomendasikan dilakukannya studi lanjutan yang membahas FTA-FTA lain yang dilakukan oleh Indonesia, guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pemetaan FTA.

# BAB V

## ANALISIS KETERLIBATAN INDONESIA DI FORUM INTERNASIONAL

Selain secara bilateral, Indonesia tentu melaksanakan diplomasi ekonomi di berbagai organisasi internasional dan forum multilateral yang diikuti Indonesia. Tabel di bawah menunjukkan daftar beberapa forum yang diikuti oleh Indonesia. Kebanyakan dari forum ini bersifat multilateral dan berbasis pada kerja sama intra dan antar kawasan. Mayoritas dari forum ini juga berbasis di kawasan Asia. Tujuan Indonesia berpartisipasi dalam berbagai forum ini tentu beragam, seperti kerja sama dan pertukaran informasi dalam sektor terpilih (i.e. budaya, lingkungan, keamanan, dan lain-lain), akses pendanaan, dan fasilitasi kerja sama antar bisnis.

Tabel 5.1 Daftar Forum Internasional Yang Diikuti Indonesia<sup>67</sup>

No.	Forum Internasional	Aktor	K/L Terkait
Kawasan Asia Pasifik dan Afrika			
1	APEC Small and Medium Enterprises Ministerial Meeting (SMEMM)	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Perdagangan
2	APEC Economic Leaders Week (AELW)	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Perdagangan
3	APEC Concluding Senior Officials' Meeting (CSOM)	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Perdagangan
4	APEC Annual Ministerial Meetings (AMM)	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Perdagangan

<sup>67</sup> Daftar forum ini dikategorikan berdasarkan kawasan dan tidak menampilkan seluruh forum internasional yang diikuti Indonesia. Berdasarkan data olahan Kementerian PPN/Bappenas, terdapat sekitar 240 forum internasional yang diikuti Indonesia tiap tahunnya.

5	Asia Pacific Parliamentary Forum	Kementerian Luar Negeri	Dewan Perwakilan Rakyat
6	APEC Senior Official Meeting	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Pertanian
7	APEC Informal Senior Meeting (ISOM)	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Perdagangan
8	Pacific Islands Forum (PIF) Leaders Meeting and Post Forum Dialogue	Kementerian Luar Negeri	N/A
9	Melanesian Spearhead Group (MSG)	Kementerian Luar Negeri	N/A
10	South West Pacific Dialogue (SwPD)	Kementerian Luar Negeri	N/A
11	Kegiatan Penguatan Kerjasama PIF dan MSG	Kementerian Luar Negeri	N/A
12	Asia Cooperation Dialogue (ACD) Ministerial Meeting	Kementerian Luar Negeri	N/A
13	APEC Business Advisory Council (ABAC)	Kementerian Luar Negeri	N/A
14	Asian Parliamentary Assembly	Dewan Perwakilan Rakyat	N/A
15	Pertemuan Tingkat Menteri Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Perdagangan
16	Konferensi Tingkat Tinggi Brunei Darussalam - Indonesia - Malaysia - Filipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)	Sekretaris Negara	Kementerian Perekonomian Kementerian Luar Negeri Kementerian Perdagangan Sekretaris Kabinet Gubernur Sulawesi Selatan Gubernur Kalimantan Utara
17	Coral Triangle Initiative Leaders' Declaration on Coral Reefs (CTI-CFF) Leaders and Ministerial Meeting	Kementerian Kelautan dan Perikanan	Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Kementerian Luar Negeri

18	Heart of Borneo (HoB)	WWF Indonesia	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Kementerian Kehutanan
19	Indian Ocean Rim Association (IORA) Maritime Safety and Security Working Group	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Perdagangan
20	Indian Ocean Rim Association (IORA) Fisheries Management Cluster Group	Kementerian Luar Negeri	Kementerian Kelautan dan Perikanan
21	Indian Ocean Rim Association (IORA) Bi-Annual CSO	Kementerian Luar Negeri	N/A
22	KTT Uni Afrika	Kementerian Luar Negeri	N/A
<b>Kawasan Amerika dan Eropa</b>			
23	Indonesia-EU Joint Committee	Kementerian Luar Negeri	N/A
24	Security Policy Dialogue Indonesia-UE	Kementerian Luar Negeri	N/A
25	Asia Europe Meeting (ASEM) Youth Entrepreneurial Meeting	Kementerian Luar Negeri	N/A
26	Dewan Gubernur Asia-Europe Foundation (ASEF)	Kementerian Luar Negeri	N/A
27	KTT Asia-Europe Meeting (ASEM)	Kementerian Luar Negeri	N/A
28	Sekretariat European Free Trade Association (EFTA)	Kementerian Luar Negeri	N/A
29	WG on Environment and Climate Change	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	N/A
30	ASEM Senior Officials Meeting	Kementerian Luar Negeri	N/A
31	Indonesia-Caribbean	Kementerian Luar	N/A

	Community	Negeri	
32	Forum for East Asia-Latin America Cooperation (FEALAC)	Kementerian Luar Negeri	N/A
33	Indonesia-MERCOSUR Business Forum	Kementerian Luar Negeri	N/A
34	Indonesia-Pacific Alliance Business Forum	Kementerian Luar Negeri	N/A

Sumber: Data hasil olahan internal Direktorat Politik Luar Negeri & Kerja Sama Pembangunan Internasional, Kementerian PPN/Bappenas

Dengan keterlibatan di banyak forum ini, muncul pertanyaan apakah tujuan dan kepentingan Indonesia tercapai melalui berbagai forum tersebut. Di awal periode pertama, Presiden Jokowi jelas telah mensinyalir tidak akan menggunakan pendekatan “Seribu Teman, Nol Musuh” dari pemerintahan sebelumnya. Beliau menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bergabung di sebuah forum jika tidak membawa keuntungan.<sup>68</sup> Bahkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pertamanya pada tahun 2014 di Nay Pyi Taw, Presiden Jokowi menekankan bahwa implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community) tidak bisa dibiarkan merusak kepentingan nasional Indonesia. Beliau terutama menekankan pentingnya keterbukaan sektor keuangan di Malaysia dan Singapura bagi perbankan Indonesia berdasarkan asas timbal balik.<sup>69</sup> Pada bab ini, makalah kebijakan ini akan menggarisbawahi bahwa penilaian atas keterlibatan Indonesia dalam sebuah forum perlu mempertimbangkan hakikat, kesempatan, dan tantangan di forum tersebut berdasarkan tujuan dan kepentingan Indonesia.

---

<sup>68</sup> Parameswaran, Prashanth. “Is Indonesia Turning Away from ASEAN Under Jokowi [Apakah Indonesia Berpaling dari ASEAN di bawah Jokowi]?” *The Diplomat*, 18 Desember 2014, <https://thediplomat.com/2014/12/is-indonesia-turning-away-from-asean-under-jokowi/>

<sup>69</sup> Witular, Rendi A. “Jokowi demands fair trade [Jokowi menuntut perdagangan adil],” *Jakarta Post*, 13 November 2014, <https://www.thejakartapost.com/news/2014/11/13/jokowi-demands-fair-trade.html>

## V.1. STUDI KASUS: G20

Grup 20 (*Group of 20*, G20) merupakan forum utama mengenai kerja sama ekonomi internasional yang terdiri 19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan Uni Eropa. 19 negara ini terdiri dari baik negara maju dan berkembang dengan perwakilan dari tiap benua. Sebagai ilustrasi atas pentingnya bobot kolektif kelompok ini, G20 meliputi sekitar 2/3 penduduk dunia, 80% total perdagangan dunia, dan 90% GDP global.

Konferensi G20 pertama diadakan pada tahun 1999. Krisis Keuangan Asia di tahun sebelumnya menggarisbawahi kebutuhan atas keterlibatan negara-negara berkembang dalam isu stabilitas keuangan dunia. Sesuai dengan topik tersebut, konferensi pertama di tahun 1999 yang diselenggarakan oleh Jerman dan Kanada berada pada tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Krisis Keuangan Global 2008 semakin menunjukkan mendesaknya keterlibatan negara-negara di luar negara-negara maju. Konferensi tingkat tinggi pertama G20 tingkat kepala pemerintah diadakan pada tahun krisis tersebut. Pada tahun 2009, G20 diumumkan sebagai dewan utama kerja sama ekonomi dunia, menggantikan posisi yang selama ini diperankan oleh klub negara-negara maju di G8.<sup>70</sup>

Sebagai forum utama kerja sama ekonomi dunia, agenda G20 utama adalah stabilitas ekonomi global. Pada KTT pertama di September 2008, agenda utama adalah “jalan keluar untuk mengontrol krisis.”<sup>71</sup> Dari KTT selanjutnya hingga 2020 dan sesuai kebutuhan dan prerogatif negara presiden tahun itu, agenda-agenda G20 tiap tahun telah meluas; mencakupi isu pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, ketenagakerjaan, keuangan inklusif, ketahanan energi, pemberantasan korupsi, perpajakan internasional, ekonomi digital, perubahan iklim, dan lain-lain. Berkembangnya tantangan juga membuat G20 membahas isu-isu di luar ekonomi dan keuangan. Meski demikian, perhatian utama para pemimpin G20 di setiap KTT tetap berpusat pada respon terhadap krisis, reformasi lembaga keuangan internasional, dan perdagangan.

---

<sup>70</sup> “Officials: G20 to supplant G8 as international economic council [Pejabat: G20 menggantikan G8 sebagai dewan ekonomi internasional],” CNN, 24 November 2009,

<http://edition.cnn.com/2009/US/09/24/us.g.twenty.summit/index.html>

<sup>71</sup> “Perkembangan Isu Utama,” Sherpa G20 Indonesia,

<https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/public/perkembangan-isu-utama-2>

---

## V.1.1 G20 DAN INDONESIA

G20 memiliki beberapa konferensi tiap tahunnya dengan berbagai tingkat. Pertama, KTT diadakan di tingkat kepala pemerintah/negara anggota G20. Biasanya diadakan setahun sekali, pada tahun 2020, diselenggarakan KTT Luar Biasa Pemimpin G20 Virtual untuk membahas penanganan COVID-19.<sup>72</sup> Kedua, konferensi tingkat menteri meliputi pertanian, perairan, luar negeri, keuangan, energi, lingkungan hidup, pendidikan dan lain-lain. Topik-topik untuk isu non-keuangan dalam pertemuan tingkat menteri dapat berbeda tiap presidensi. Konferensi tingkat menteri biasanya dilaksanakan satu atau dua kali tiap tahun, meski pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral sering diadakan lebih.<sup>73</sup> Ketiga, pertemuan tingkat kelompok kerja (working group, WG) yang juga dibagi dalam isu keuangan dan non-keuangan. WG keuangan berkisar pada isu perdagangan dan investasi, tatanan keuangan internasional, dan infrastruktur dan investasi. Sesuai presidensi tiap tahun, WG non-keuangan dapat meliputi isu-isu pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, pemberantasan korupsi, lapangan pekerjaan, dan lain-lain. Ditunjuk langsung oleh Presiden, Sherpa G20 Indonesia adalah representasi Indonesia yang menjadi perwakilan presiden di setiap pertemuan G20 selain KTT.<sup>74</sup> Tabel di bawah dari tata kelola G20 presidensi Jepang tahun 2019 dapat menjadi ilustrasi mengenai tata kelola di G20.

---

<sup>72</sup> "Pertemuan KTT Luar Biasa Pemimpin G20 Secara Virtual dalam Pembahasan Penanganan COVID-19," *Sherpa G20 Indonesia*, 26 Maret 2020, <https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/public/pertemuan-ktt-luar-biasa-pemimpin-g20-secara-virtual-dalam-pembahasan-penanganan-covid-19>

<sup>73</sup> Untuk tahun 2020 pada masa presidensi Arab Saudi, konferensi tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral diadakan 6 kali dengan 4 diantaranya secara virtual.

<sup>74</sup> Sherpa G20 Indonesia saat ini adalah Dr. Rizal Affandi Lukman, yang juga menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

**Tabel 5.2** Tata Kelola G20 Presidensi Jepang 2019

KTT G20		
Isu Non-Keuangan		Isu Keuangan
Pertemuan Tingkat Menteri (berbeda tiap presidensi, misalnya pertanian, perdagangan, energi, lingkungan hidup, tenaga kerja, kesehatan, pariwisata, luar negeri)	Sherpa	Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral  Deputi Keuangan dan Bank Sentral
<b>Kelompok Kerja (<i>Working Group, WG</i>) dan Satuan Tugas (<i>Task Force</i>)</b>		
Jalur Sherpa: <ul style="list-style-type: none"> <li>· WG Perdagangan &amp; Investasi</li> <li>· WG Pembangunan</li> <li>· WG Anti-Korupsi</li> <li>· WG Kesehatan</li> <li>· Satuan Tugas Ekonomi Digital</li> <li>· WG Transisi Energi</li> <li>· WG Keberlanjutan Iklim</li> <li>· WG Lapangan Pekerjaan</li> </ul>	Jalur Keuangan: <ul style="list-style-type: none"> <li>· WG Tatatan Keuangan Internasional</li> <li>· WG Investasi &amp; Infrastruktur</li> <li>· WG Keuangan Hijau</li> <li>· WG Keuangan Iklim</li> </ul>	

Sebagai salah satu 19 negara dengan ekonomi terbesar di dunia, Indonesia sudah menjadi anggota G20 sejak konferensi pertama tahun 1999. Sebagai ekonomi terbesar yang mencakup kira-kira separuh Asia Tenggara, Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN di G20. ASEAN sendiri merupakan salah satu organisasi multilateral yang diundang secara tetap dalam KTT tingkat kepala pemerintah G20, diwakilkan oleh Sekretaris Jenderal ASEAN dan kepala pemerintah negara anggota ASEAN yang sedang menjadi ketua tahun itu.

**Tabel 5.3 Perwakilan Indonesia di G20**

<b>Pertemuan Tingkat Kepala Pemerintah</b>		
1	Konferensi Tingkat Tinggi (KTT)	Presiden Joko Widodo
<b>Pertemuan Jalur Keuangan &amp; Sherpa</b>		
1	Pertemuan Tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral	Sri Mulyani, Menteri Keuangan Perry Warjiyo, Gubernur Bank Indonesia
2	Pertemuan Tingkat Sherpa	Rizal Affandi Lukman, Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama International Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
<b>Pertemuan Tingkat Menteri – Kelompok Kerja</b>		
1	Pertemuan Tingkat Menteri Perdagangan	Agus Suparmono, Menteri Perdagangan
2	Pertemuan Tingkat Menteri Pembangunan	Suharso Monoarfa, Kepala Bappenas
3	Pertemuan Tingkat Menteri Pendidikan	Nadiem Makarim. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
4	Pertemuan Tingkat Menteri Kesehatan	Terawan Agus Putranto, Menteri Kesehatan
5	Pertemuan Tingkat Menteri Ekonomi Digital	Johnny G. Plate, Menteri Komunikasi dan Informatika
6	Pertemuan Tingkat Menteri Pertanian	Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian
7	Pertemuan Tingkat Menteri Energi	Arifin Taslim, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
8	Pertemuan Tingkat Menteri Luar Negeri	Retno L.P. Marsudi, Menteri Luar Negeri
9	Pertemuan Tingkat Menteri Pariwisata	Wishnutama Kusubandio, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
10	Pertemuan Tingkat Menteri Lingkungan	Siti Nurbaya Bakar, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
11	Pertemuan Tingkat Menteri Ketenagakerjaan	Ida Fauziyah, Menteri Ketenagakerjaan

Sumber: [Sherpa G20 Indonesia \(2020\)](#)

---

### V.1.2 KESEMPATAN INDONESIA DI G20

Kesempatan pertama bagi Indonesia adalah untuk kontribusi inisiatif. Dalam hal ini, G20 berfungsi sebagai wadah untuk memajukan dan mendukung inisiatif yang sesuai dengan kepentingan Indonesia. Contoh pertama inisiatif adalah reformasi di Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization, WTO) yang dibahas di G20. Pada KTT G20 2019, Indonesia bersama dengan Jepang mengusungkan agenda reformasi tatanan perdagangan dunia di G20.<sup>75</sup> Dalam inisiatif reformasi WTO ini, Indonesia memajukan ide reformasi agar tatanan perdagangan dunia tetap berdasar pada asas-asas keterbukaan dan multilateral di tengah meningkatnya sentimen proteksionisme dan tindakan unilateral. Beberapa reformasi yang diusung Indonesia berupa: 1) secara jangka pendek, perbaikan atas sistem penyelesaian di bawah Badan Banding (*Appellate Body*) dan 2) secara jangka panjang, persetujuan atas skema subsidi yang transparan.<sup>76</sup> Sebagai salah satu negara yang bergantung pada keterbukaan arus barang, jasa, dan modal, Indonesia berkepentingan untuk memastikan tatanan perdagangan dunia di bawah WTO mencerminkan ini.

Contoh kedua adalah inisiatif di G20 untuk penangguhan pembayaran bunga utang (Debt-Service Suspension Initiative, DSSI). Skema ini akan menangguhkan pembayaran utang yang jatuh tempo dari Mei hingga Desember 2020 bagi negara-negara berpendapatan rendah. Hingga 18 Juli 2020, 42 negara sudah mengikuti skema senilai US\$ 5,3 triliun yang dirancang untuk menyediakan ruang fiskal untuk menangkal dampak ekonomi dari pandemi.<sup>77</sup> Jakarta mendukung inisiatif untuk mengurangi beban utang di negara-negara berpendapatan rendah; krisis keuangan di negara berkembang dapat menjadi efek domino dan menyebar ke negara lain, termasuk Indonesia. Contoh ketiga adalah komitmen untuk mencapai konsensus global mengenai

---

<sup>75</sup> Gareta, Sella Panduarsa. "Indonesia-Jepang sepakat usung reformasi WTO di G20," *Antara*, 29 mei 2019, <https://www.antaranews.com/berita/892461/indonesia-jepang-sepakat-usung-reformasi-wto-di-g20>

<sup>76</sup> "Defending the Multilateral Trading System 7 the Strategic Way Forward: Non-Paper Update" 2019 & 2020 Non-Paper, proposed by Indonesia at the G20.

<sup>77</sup> "Communiqué," *G20 Finance Ministers & Central Bank Governors Meeting*, 18 Juli 2020, <https://g20.org/en/media/Documents/Final%20G20%20FMCBG%20Communiqu%C3%A9%20-%20July%202020.pdf> (no. 32, p. 20)

perpajakan di era digital.<sup>78</sup> Negara-negara anggota G20 terus berkomitmen untuk mencari solusi atas usaha perusahaan-perusahaan multinasional yang menggeser pencatatan laba ke yurisdiksi dengan pajak yang lebih rendah untuk menghindari pembayaran pajak. Sebagai negara dengan pasar domestik besar, Indonesia berkepentingan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia membayar beban pajak mereka secara adil dan transparan. Pada tahun 2019, terdapat sengketa antara Kementerian Keuangan dengan sejumlah perusahaan digital multinasional seperti Google dan Facebook terkait beban pajak untuk mereka sebagai Badan Usaha Tetap.<sup>79</sup> Diharapkan inisiatif kerja sama perpajakan internasional di G20 dapat mencegah masalah serupa di kemudian hari.

Kedua, kesempatan untuk berjejaring. Salah satu nilai tambah dari forum dengan skala seperti G20 adalah daftar hadirnya. Tidak hanya kepala pemerintah negara-negara besar, direktur dari perusahaan-perusahaan multinasional dunia juga hadir di pertemuan tahunan G20. Sejak tahun 2011, pemimpin dari perusahaan-perusahaan global hadir di G20 bekerja sama dengan Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce, ICC) melalui ICC G20 Advisory Group. Grup ini merupakan inisiatif dari komunitas bisnis global untuk memberikan masukan pada G20 pada bidang-bidang terkait seperti perdagangan, pertumbuhan, dan lapangan pekerjaan.<sup>80</sup> Kehadiran pemimpin dunia dan pemimpin bisnis global ini menyediakan kesempatan bagi delegasi Indonesia untuk mengadakan pertemuan sela di G20. Melalui pertemuan sela ini, Indonesia tidak perlu mengadakan kunjungan bilateral terpisah ke negara mitra untuk membahas FTA bilateral yang sedang dinegosiasi, misalnya. Di sela KTT G20 2011, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengadakan pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Barack Obama, juga dengan kepala dan wakil pemerintahan dari Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Arab Saudi.<sup>81</sup>

---

<sup>78</sup> "Communiqué," *G20 Finance Ministers & Central Bank Governors Meeting*, 18 Juli 2020, <https://g20.org/en/media/Documents/Final%20G20%20FMCBG%20Communiqu%C3%A9%20-%20July%202020.pdf> (no. 10, p. 3)

<sup>79</sup> Sukarno, Puput Ady. "Sri Mulyani: Seluruh Dunia Pusing Tarik Pajak Google," *Bisnis*, 12 Juni 2019, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190612/259/932856/sri-mulyani-seluruh-dunia-pusing-tarik-pajak-google>

<sup>80</sup> "ICC launches G20 Advisory Group for CEO inputs to Heads of State [ICC meluncurkan G20 Advisory Group untuk input CEO kepada Kepala Negara]," *International Chamber of Commerce*, 24 Mei 2011, <https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-launches-g20-advisory-group-for-ceo-input-to-heads-of-state/>

<sup>81</sup> "Di Sela-sela KTT G20, SBY Bertemu Barack Obama," *Detik*, 5 November 2011, <https://news.detik.com/berita/d-1761030/-di-sela-sela-ktt-g20-sby-bertemu-barack-obama>

---

### V.1.3 TANTANGAN INDONESIA DI G20

Tantangan pertama bagi Indonesia terkait dengan hakikat organisasi dan pengambilan keputusan di G20. Hakikat G20 sebagai forum multilateral menjadi hambatan tersendiri bagi kepentingan nasional Indonesia. Biaya keanggotaan yang inklusif adalah keputusan kolektif yang dapat disetujui cenderung menjadi dangkal dan kurang komprehensif. Hambatan ini juga ditambah dengan pengambilan keputusan di G20 yang berdasar pada konsensus. Sama seperti di ASEAN, ini berarti tiap anggota secara praktis punya hak veto atas keputusan akhir. Keputusan bersama G20 melalui pernyataan resmi KTT (*communiqué*) juga sifatnya tidak mengikat. Tidak seperti WTO, tidak ada mekanisme sanksi jika negara anggota melanggar keputusan bersama G20. Hal ini tidak menjadi masalah serius ketika sebuah isu atau momen membuat kepentingan tiap anggota sejalan. Pada tahun 2009, misalnya, G20 sukses dalam mendorong tiap anggota untuk berkoordinasi dalam kebijakan fiskal dan moneter guna menangkal krisis global saat itu. Kesuksesan koordinasi ini adalah faktor kunci mengapa krisis itu disebut sebagai Resesi Besar (*great recession*), bukan Depresi Besar (*great depression*).<sup>82</sup> Namun, dalam menghadapi isu kontroversial, tidak banyak yang dapat dilakukan G20 secara signifikan. Situasi di KTT G20 2019 saat Presiden Amerika Serikat Donald Trump menolak menandatangani pernyataan apa pun terkait dengan perubahan iklim menggarisbawahi poin ini.<sup>83</sup>

Tantangan kedua adalah kurangnya kredibilitas Indonesia dalam reformasi struktural. Tak peduli seberapa penting usaha Indonesia untuk memajukan inisiatifnya di kancah G20, ini akan percuma jika Indonesia tidak melaksanakan reformasi di dalam negeri.<sup>84</sup> Sebagai contoh, bagian sebelumnya menjelaskan inisiatif reformasi WTO yang datang dari Indonesia, terutama karena Indonesia berkepentingan pada WTO yang efektif dan berdasarkan multilateralisme dan keterbukaan. Namun, rezim keterbukaan perdagangan Indonesia sendiri mengalami penurunan dengan meningkatnya hambatan non-tarif yang dicanangkan beberapa kementerian beberapa

---

<sup>82</sup> Triggs, Adam. "The Economic and Political Case for Coordinating Fiscal Stimulus [Argumen Ekonomi dan Politik untuk Koordinasi Stimulus Fiskal]," *Brookings*, November 2018, [https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/11/Triggs\\_Case-for-coordination-fiscal-stimulus.pdf](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/11/Triggs_Case-for-coordination-fiscal-stimulus.pdf)

<sup>83</sup> Zhen, Liu. "G20 split as US refuses to sign joint statement on climate change [G20 terpecah, AS menolak menandatangani pernyataan bersama perubahan iklim]," *South China Morning Post*, 29 Juni 2019, <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3016630/g20-split-us-refuses-sign-joint-statement-climate-change>

<sup>84</sup> Wawancara dengan Rizal Affandi Lukman, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Jakarta, 9 September 2020.

tahun ini.<sup>85</sup> Kontribusi inisiatif Indonesia menjadi tidak kredibel dalam situasi seperti ini. Presiden Jokowi sendiri juga terus mendorong reformasi seperti penyederhanaan perijinan dan penyediaan infrastruktur yang memadai, yang tercermin di Peringkat Kemudahan Berusaha (*Ease of Doing Business*), guna meningkatkan produktivitas Indonesia.<sup>86</sup>

## V.2. PENUTUP

Bab ini menganalisis keterlibatan Indonesia di berbagai forum internasional dengan menggunakan studi kasus G20. Menakar jenis-jenis pertemuan, tingkat delegasi, serta hakikat dari G20 sendiri, bab ini menemukan bahwa bagi Indonesia, G20 menyajikan kesempatan untuk berjejaring di sela-sela pertemuan dan utamanya, memberikan kontribusi inisiatif. Di lain pihak, secara eksternal, hakikat dan proses pengambilan keputusan di G20 menjadi tantangan tersendiri dan secara internal, terlepasnya agenda reformasi domestik mengikis kredibilitas Indonesia di G20. Terdapat juga beberapa hal yang digarisbawahi:

1. Karakteristik G20 sebagai forum multilateral dengan pengambilan keputusan konsensus yang tidak mengikat dan diikuti oleh banyak negara maju bisa menjadi model untuk menganalisis forum-forum lain dengan karakteristik serupa. Sebagai contoh, kesempatan serupa untuk berjejaring juga tersedia di forum multilateral lain seperti Kerjasama Ekonomi Asia-Pasifik (Asia-Pacific Economic Cooperation, APEC). Saat belum lama menjabat, Presiden Jokowi mengadakan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di sela KTT APEC 2014 dengan komitmen peningkatan investasi Jepang di Indonesia.<sup>87</sup>
2. Keanggotaan sebuah forum juga menentukan kesempatan dan tantangan forum tersebut. Keanggotaan G20 yang meliputi negara maju menyediakan kesempatan berjejering di

<sup>85</sup> Munadi, E. "Indonesian Non-Tariff Measures: Updates and Insights [Langkah Non-Tarif Indonesia: Perkembangan dan Wawasan]," in Ha Thi Thanh Doan & S. Rosenow (eds.), *Non-Tariff Measures in ASEAN: An Update* [Langkah Non-Tarif di ASEAN: Perkembangan]. 2019, Jakarta: ERIA, pp. 67-84,

[https://www.eria.org/uploads/media/10.ERIA\\_Book\\_2019\\_NTM\\_Update\\_Chapter\\_3.pdf](https://www.eria.org/uploads/media/10.ERIA_Book_2019_NTM_Update_Chapter_3.pdf)

<sup>86</sup> Anwar, Muhammad Choirul. "Peringkat Doing Business RI Mentok di 73, Ini Warning Jokowi," *CNBC Indonesia*, 12 Februari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212105504-4-137205/peringkat-doing-business-ri-mentok-di-73-ini-warning-jokowi>

<sup>87</sup> "Di Depan Jokowi, PM Shinzo Abe Janji Tingkatkan Investasi di Indonesia," *Detik*, 10 November 2014, <https://news.detik.com/berita/d-2743710/di-depan-jokowi-pm-shinzo-abe-janji-tingkatkan-investasi-di-indonesia>

sel-sela konferensi untuk mengundang investasi, membuka akses pasar, dan meraih akses pendanaan. Begitu juga dengan tantangan menemukan kesamaan posisi antar Indonesia sebagai negara berkembang dengan negara-negara maju di G20. Analisis ini bisa berbeda jika keanggotaan sebuah forum juga berbeda dengan studi kasus di bab ini. Keanggotaan di forum Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia (Indian Ocean Rim Association, IORA) yang didominasi negara berkembang, misalnya, membawa kesempatan dan tantangan tersendiri.<sup>88</sup> Dalam kasus IORA, kesempatan berjejaring mungkin tidak akan sama berharganya seperti di G20 yang dihadiri kepala pemerintah negara maju. Di bagian-bagian sebelumnya, berdasarkan wawancara berbagai narasumber, temuan studi ini menunjukkan pentingnya membuka akses pasar baru. Meski demikian, belum jelas kaitan antara pembukaan akses pasar baru dengan partisipasi di berbagai forum. Studi ini merekomendasikan studi-studi lanjutan untuk pemetaan forum lebih lanjut dan efektivitasnya.

3. Sepak terjang diplomasi ekonomi di forum-forum internasional tidak terlepas dari reformasi domestik. Seperti dijabarkan di bagian sebelumnya, kurangnya reformasi struktural di dalam negeri dapat secara langsung berdampak negatif pada upaya diplomasi ekonomi di luar negeri karena menggerus kredibilitas Indonesia di mata dunia. Terkait dengan ini, Kementerian Luar Negeri juga pernah menyatakan dibutuhkannya perbaikan dalam negeri agar diplomasi pengamanan akses pasar atas komoditas sawit efektif di mancanegara.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Australia dan Singapura adalah pengecualian.

<sup>89</sup> Setyorini, Virna P. "Diplomasi Sawit Sulit, Diplomat Sebut Perlu Perbaikan dalam Negeri," *Antara*, 23 Oktober 2019, <https://www.antaranews.com/berita/1128419/diplomasi-sawit-sulit-diplomat-sebut-perlu-perbaikan-dalam-negeri>

# BAB VI

## STRATEGI PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI DI TENGAH PANDEMI

Di tahun 2020 ini, dengan merebaknya pandemi COVID-19 di seluruh dunia, salah satu dampak yang dirasakan banyak negara, termasuk Indonesia, adalah tergerusnya pertumbuhan ekonomi, terutama terkait dengan rantai pasok global. COVID-19 mengubah tatanan ekonomi dunia, yang ditandai dengan berubahnya peta perdagangan dunia dan terhentinya berbagai bidang usaha. Hampir seluruh sektor industri global kesulitan akibat regulasi-regulasi yang membatasi pergerakan barang dan manusia. Banyak negara terimpit beban ekonomi dan bahkan terancam resesi.

Bagi Indonesia, harus ada strategi khusus untuk meminimalisasi dampak negatif COVID-19 terhadap perekonomian, antara lain dengan berbagai regulasi baru, inovasi teknologi, dan strategi menyikapi masalah produksi atau manufaktur yang meliputi ketersediaan bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi dalam mata rantai pasok global. Menteri Luar Negeri, Retno LP Marsudi, menegaskan bahwa krisis kesehatan global mengharuskan diplomasi RI beradaptasi dengan cepat, menyesuaikan dengan tantangan dan tatanan baru yang dinamis.<sup>90</sup> Di sisi lain, kolaborasi dengan negara lain yang turut terdampak pandemi dapat juga menjadi alternatif solusi. Kolaborasi berguna memecahkan masalah rantai pasok global dan menjadikan Indonesia pemain penting dalam sektor tersebut. Berbagai penyesuaian perlu dilakukan, misalnya pasca-pandemi tentunya industri kesehatan dan alat kesehatan akan menjadi salah satu prioritas.

Keberlanjutan diplomasi ekonomi adalah salah satu tantangan bagi Indonesia saat ini, dan juga seterusnya setelah masa pandemi mereda. Hubungan kerja sama dengan negara lain diharapkan dapat membantu memecahkan masalah rantai pasokan global dan menjadikan Indonesia sebagai pemeran penting. Menurut pandangan Wakil Menteri Luar Negeri, Mahendra Siregar, di tengah pandemi ini ada kesempatan bagi Indonesia untuk bertransformasi, yaitu dengan mengubah cara berpikir dan melakukan perubahan yang lebih mengarah pada kemampuan untuk beradaptasi

---

<sup>90</sup> Retno LP Marsudi, "Diplomasi RI di Masa Pandemi," Kompas, 9 Juli 2020.

terhadap kondisi krisis.<sup>91</sup> Bab ini membahas dampak pandemi terhadap diplomasi ekonomi, dan strategi penguatan diplomasi ekonomi di tengah pandemi.

## VI.1. DAMPAK PANDEMI TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI

Hanya kurang dari tiga bulan sejak mulai merebaknya COVID-19 di Indonesia, ramalan ekonomi Tanah Air pun berubah drastis. Pada bulan Maret 2020, Bank Indonesia (BI) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi di bawah 5 persen atau hanya sekitar 2,5 persen saja, dari yang pernah tumbuh mencapai 5,02 persen.<sup>92</sup> Hingga bulan Juni 2020, kontraksi perekonomian global berlanjut, sementara ketidakpastian pasar keuangan global menurun seiring penyebaran COVID-19 yang melandai. Tinjauan BI menemukan bahwa pembatasan aktivitas ekonomi sebagai langkah penanganan COVID-19 berisiko menurunkan pertumbuhan ekonomi global 2020 lebih besar dari prakiraan awal, meskipun kontraksi volume perdagangan dunia dan penurunan harga komoditas terlihat tidak sedalam prakiraan sebelumnya.<sup>93</sup>

Menteri Keuangan Sri Mulyani telah dua kali membeberkan proyeksi pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dalam kuartal berjalan dan beberapa kuartal ke depan, dan proyeksinya suram, karena jika pertumbuhan ekonomi minus dalam dua triwulan berturut-turut, maka bisa dikatakan Indonesia mengalami resesi. Untuk kuartal II, yang tengah berjalan sampai akhir Juni 2020, pemerintah Indonesia memproyeksi ekonomi akan menyusut sampai minus 3,8%, sementara pertumbuhan PDB di kuartal III, yang dimulai per Juli, diprediksi akan tumbuh di kisaran 1,4%, atau melemah sampai minus 1,6%.<sup>94</sup>

Merespons penurunan pertumbuhan ekonomi akibat pandemi COVID-19, terutama akibat dari terputusnya rantai pasokan global dan adanya regulasi-regulasi yang membatasi kegiatan manusia yang berhubungan dengan ekonomi distribusi pasokan menjadi terhambat yang

<sup>91</sup> Mahendra Siregar, "Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi (di Tengah) dan Pasca Pandemi (2020-2024)," Paparan pada Webinar Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi, yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), 15 Juli 2020.

<sup>92</sup> Bank Indonesia, "Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2020," 20 Maret 2020,

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Maret-2020.aspx>

<sup>93</sup> Bank Indonesia, "Tinjauan Kebijakan Moneter Juni 2020," 19 Juni 2020,

<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Juni-2020.aspx>

<sup>94</sup> "Covid-19: 'Indonesia berpotensi resesi' - dampak ekonomi 'jauh lebih berat' ketimbang krisis moneter 1998" BBC Indonesia, 24 Juni 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994>

membuat kegiatan produksi juga ikut terhambat, Indonesia butuh menerapkan strategi khusus dengan regulasi baru dalam menyikapi masalah produksi melalui kolaborasi dengan negara lain.

## VI.2. DAMPAK PANDEMI TERHADAP DINAMIKA INTERAKSI ANTAR NEGARA & EKONOMI INTERNASIONAL

Sejak beberapa tahun yang lalu, muncul sebuah tren baru dalam interaksi antarnegara dan ekonomi internasional, yaitu yang disebut “de-globalisasi.” Pergantian pemerintahan AS dibawah kepemimpinan Presiden Donald Trump menimbulkan risiko ketidakpastian kebijakan yang akan ditempuh AS. Kebijakan Trump dipandang akan menimbulkan perubahan paradigma kebijakan ekonomi AS pada dua area, yaitu: (1) perubahan dari pelonggaran moneter menjadi ekspansi fiskal khususnya terkait aturan pajak, serta (2) perubahan dari globalisasi menjadi de-globalisasi khususnya dalam bidang perdagangan.<sup>95</sup>

Nilai-nilai baru ini memengaruhi multilateralisme perdagangan global. Kecenderungan sejumlah negara besar, terutama AS, untuk memprioritaskan nasionalisme mengancam keberlangsungan norma multilateralisme yang selama ini dominan dalam dinamika interaksi antarnegara dan ekonomi internasional. Sebagai contoh, pengecualian-pengecualian terhadap aturan-aturan WTO menjadi dijustifikasi.

Kini, pandemi semakin mendisrupsi globalisasi. Sebagian besar negara akan merespons dengan mengadopsi kebijakan yang lebih proteksionis untuk melindungi pasar domestik dari gangguan global. Hal menjadi cikal-bakal nilai-nilai “the new normal”, yang mana pengecualian tersebut bertujuan untuk mengurangi penyebaran pandemi. Globalisasi mendorong efisiensi dan pemusatan rantai pasok dunia, yang mana semua proses produksi dan rantai pasok tersebut terdapat di negara yang dinilai paling efisien. Tren de-globalisasi membujarkan efisiensi ini, dan ancamannya antara lain adalah dunia bisa mengalami kekurangan sumber daya atau bahan baku yang menimbulkan masalah strategis.

---

<sup>95</sup> Bank Indonesia, “Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional: Momentum Pemulihan Berlanjut di Tengah Kerentanan Global,” Edisi II 2017, <https://www.bi.go.id/publikasi/ekonomi-keuangan-kerjasama-internasional/Documents/PEKKI-II-2017.pdf>

Melihat risiko geopolitik dan geo-ekonomi, Perang Dagang saat ini sudah jauh lebih luas dampaknya dibandingkan fase sebelumnya. Kondisi geopolitik dan ekonomi sendiri akan menjadi semakin berat karena persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok yang semakin berat pula, belum lagi ketegangan-ketegangan yang terjadi di kawasan tertentu. Perang Dagang bahkan sudah merambat dalam persaingan teknologi dan industri, dimana ada beberapa larangan perdagangan antara para pelaku industri teknologi (*high-tech industries*). Ada kemungkinan hal ini berkaitan dengan isu *intelligence method*. Selain kompetisi teknologi, beberapa pihak juga membatasi akuisisi dan investasi serta menerapkan sanksi pada perusahaan dan pihak yang melanggar batas tersebut. *Travel advisory* atau *alert* juga sudah menjadi instrumen diplomasi, yang mana dapat menimbulkan permasalahan bagi banyak negara yang mengandalkan sektor pariwisata.

Kondisi global akan selalu berubah, sehingga Indonesia tidak bisa selalu menggunakan pendekatan yang sama dalam melakukan diplomasi ekonomi. Indonesia perlu memahami situasi dan memetakan risiko persaingan geopolitik dan geo-ekonomi kedepannya. Perlu ada kapitalisasi politik luar negeri dimana Indonesia menggunakan prinsip kebijakan bebas-aktif dalam membentuk platform politik-ekonomi yang lebih cocok bagi kawasannya. Indonesia harus lebih berani mendorong konsep negaranya sendiri. Ada tantangan besar di sini, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, yaitu kurangnya sentimen multilateralisme, sehingga semakin besar preferensi terhadap transaksi yang tidak lagi *rules-based*.

Adapun target Indonesia yang dipresentasikan ke dunia yaitu mengatasi masalah reputasi dan kredibilitas dalam menangani pandemi. Indonesia perlu meningkatkan disiplin protokol kesehatan dan siap menyambut investasi dalam negeri maupun luar negeri. Koordinasi yang baik di berbagai jenjang kerja sama perlu dilakukan dalam melaksanakan program-program diplomasi ekonomi di tingkat bilateral dan internasional. Indonesia dihadapkan dengan suatu tatanan ekonomi dan geopolitik yang sangat baru. Krisis yang terjadi saat ini sangat berbeda dengan krisis-krisis yang terjadi di masa lampau, di mana krisis pandemi dan geopolitik berjalan bersamaan, sehingga menimbulkan krisis multidimensi—tidak hanya krisis kesehatan, tetapi juga ekonomi dan politik.

Terdapat berbagai peluang nyata bagi Indonesia. Sebagai contoh de-globalisasi, Wakil Menteri Luar Negeri menjelaskan keinginan perusahaan Amerika Serikat di Tiongkok untuk merelokasikan usahanya ke wilayah Asia Tenggara. Dalam hal ini, de-globalisasi memberikan peluang *global*

*value chain* yang baru.<sup>96</sup> Dengan ini, Indonesia harus mengantisipasi relokasi tersebut karena Indonesia memiliki SDA dan pasar domestik yang besar. Beliau juga mengatakan bahwa Indonesia mesti realistik dalam bersaing dengan negara lain dalam artian tetap netral, namun menjaga kepentingan nasional.

Berdasarkan data dari BKPM, ada 7 perusahaan asing yang menyatakan akan melakukan relokasi ke Indonesia. Kerja sama dengan BKPM sangat dibutuhkan untuk meyakinkan mereka untuk investasi di Indonesia. Indonesia, melalui kementerian/lembaga terkait investasi dan perdagangan, mesti dapat melakukan *lobby* di daerah tempat perusahaan tersebut berada karena wilayah tujuan relokasi perusahaan ditentukan langsung oleh kantor pusatnya sendiri. Hal yang harus diantisipasi adalah pandangan untuk tidak memberlakukan *multilateral rules*, misalkan dengan memberlakukan perdagangan produk-produk yang sebelumnya dipandang dapat menimbulkan isu perubahan iklim.

### VI.3. LANGKAH PRIORITAS DAN ANTISIPASI TANTANGAN DALAM DIPLOMASI EKONOMI

Bagaimana kaitannya dengan diplomasi ekonomi? Dijelaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri,<sup>97</sup> sebelum pandemi COVID-19 terjadi, Perwakilan RI di berbagai negara telah difokuskan pada intensifikasi diplomasi ekonomi. Sesuai dengan pembahasan dalam Rapat Kerja Kepala Perwakilan RI (Raker Keppri) pada bulan Januari 2020, yang diberi tajuk “Memenangkan Diplomasi Ekonomi di Tengah Tantangan Global”, Kemlu telah mengantisipasi beberapa hal terkait diplomasi ekonomi. Pertama, dampak dari perang dagang yang telah berlangsung selama 2 tahun terhadap perdagangan internasional. Kedua, kampanye hitam dan kebijakan diskriminatif di Uni Eropa terhadap penggunaan kelapa sawit mendorong Indonesia untuk menemukan pasar alternatif dalam mempromosikan kelapa sawit. Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas ekspor yang paling unggul bagi Indonesia. Ketiga, Indonesia perlu mengantisipasi bahaya serangan siber (*cyber attacks*) bagi *e-commerce* dan *e-governance*. Keamanan siber

<sup>96</sup> Disampaikan dalam “Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi (di Tengah) dan Pasca Pandemi (2020-2024),” Paparan pada Webinar Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi, yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), 15 Juli 2020.

<sup>97</sup> Ibid.

merupakan salah satu aspek yang menjadi keprihatinan bersama mengingat adanya kasus-kasus kejahatan siber yang merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam *e-commerce*.

Wakil Menteri Luar Negeri juga menyampaikan bahwa Perwakilan RI di luar negeri memiliki komitmen dalam ketiga sektor arahan Presiden dalam diplomasi ekonomi, yaitu: perdagangan, investasi, dan pariwisata. *Pertama*, terkait perdagangan, Perwakilan RI berkomitmen untuk mengoptimalkan eksplorasi pasar unggulan dan potensial (prioritas). Dalam hal ini, Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) bekerja sama dengan Litbang Kementerian Perdagangan, KADIN, dan Bank Indonesia dalam menyusun daftar produk unggulan dan potensial. Dalam bentuk *database*, daftar susunan ini terdiri dari para produsen dan eksportir yang mempunyai kredibilitas dan reputasi yang baik. Selain itu, Perwakilan RI berkomitmen memenuhi target ekspor masing-masing yang telah dibagi secara proporsional. Perwakilan juga berkomitmen untuk mempromosikan kelompok produk yang terkustomisasi namun tetap fleksibel (sesuai pemetaan oleh Pusat), dan penyusunan program serta memperbarui pemetaan bersama dengan KADIN dan asosiasi lainnya untuk mengidentifikasi perusahaan dan eksportir dengan kredibilitas berstandar tinggi. Sesuai dengan arahan presiden, sektor perdagangan Indonesia dapat mengoptimalkan eksplorasi pasar unggulan dan pasar potensi. Selain itu, jumlah ekspor non-migas RPJMN ditargetkan berjumlah 7,2 persen. Dalam mengantisipasi dinamika global, Kementerian Luar Negeri memproyeksikan 5,7%-7,3% dana dan dibagi ke setiap Perwakilan secara proporsional. Dari segi perdagangan, Indonesia juga difokuskan pada percepatan perundingan perdagangan

*Kedua*, terkait investasi, Perwakilan RI memprioritaskan substitusi produk impor, pengolahan energi, dan peningkatan nilai tambah melalui alih teknologi. Dalam melaksanakan komitmen di bidang investasi, Perwakilan perlu meningkatkan koordinasi dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kementerian/lembaga sektoral, pemerintah daerah, dan BUMN serta pihak swasta. Dalam hal ini, perlu ada pengawalan komitmen investasi dari akreditasi hingga proses di Indonesia. Selain itu, perlu ada pengolahan data mengenai peluang investasi yang dilakukan bersama oleh Perwakilan dan Pusat. Sektor investasi juga difokuskan pada prioritas untuk menarik sebanyak mungkin investasi dalam negeri dan mendorong investasi ke luar negeri guna meningkatkan jumlah ekspor. Dari segi investasi, diharapkan juga adanya kerja sama alih teknologi untuk meningkatkan inovasi di Indonesia.

*Ketiga*, dari aspek pariwisata, Perwakilan RI berkomitmen untuk memperbaiki program promosi, *selling mission*, dan kunjungan (khususnya ke destinasi baru) bersama dengan Kemenparekraf dan pemerintah daerah.

Lantas bagaimana dampak pandemi atas berbagai rencana dan strategi diplomasi ekonomi yang sudah disusun di awal 2020 tersebut? Pertanyaan ini sangat krusial mengingat dampak negatif pandemi terhadap pertumbuhan ekonomi yang sudah dibahas sebelumnya. Pertanyaan lain yang tak kalah penting: Apakah diplomasi ekonomi menjadi bagian dari strategi penguatan ekonomi Indonesia di masa pandemi?

#### VI.4. WACANA DIPLOMASI EKONOMI DI MASA PANDEMI: TELAAH MEDIA

Pada Bab II disampaikan telaah media yang dilakukan oleh studi ini untuk periode 2014 sampai dengan pertengahan Agustus 2020. Guna melihat wacana di media mengenai diplomasi ekonomi pada masa pandemi, pada Bab ini dilakukan kajian spesifik untuk periode Maret 2020 sampai pertengahan Agustus, yaitu periode di mana pandemi COVID-19 mulai terjadi di Indonesia. Temuan studi ini melalui telaah media menunjukkan bahwa ‘diplomasi ekonomi’ hanya beberapa kali diujarkan oleh para pemangku kepentingan sebagai strategi yang menjadi bagian dari respon Indonesia terhadap pandemi, dan baru mulai terlihat signifikan penggunaannya sejak Mei 2020. Meskipun diskusi mengenai strategi untuk meminimalkan dampak negatif pandemi terhadap perekonomian Indonesia banyak terjadi di media massa, diskusi akademik, dan kajian kebijakan, namun isu yang dibahas lebih terkait mengenai upaya-upaya yang sifatnya perbaikan keadaan di domestik, seperti misalnya masalah produksi, manufaktur, industri, maupun inovasi teknologi.

Kemlu, misalnya, meskipun beberapa kali menegaskan pentingnya kelanjutan diplomasi ekonomi, lebih berfokus pada isu perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri dan kerja sama pengadaan alat kesehatan dan vaksin. Pada bulan Maret 2020, ketika kasus COVID-19 pertama diumumkan di Indonesia sementara kasus di seluruh dunia mulai meningkat tajam, ada beberapa kegiatan dan ujaran yang dibuat oleh pejabat Kemlu. Wakil Menteri Luar Negeri dalam sebuah wawancara dengan media mengatakan bahwa diplomasi ekonomi tetap terus berjalan (di tengah pandemi) dengan sifat yang bisa diubah.<sup>98</sup> Selain itu, Kemlu melalui Direktorat Asia Timur dan Pasifik dan KBRI Beijing menyelenggarakan rapat koordinasi dan konferensi virtual mengenai ‘Penajaman Diplomasi Ekonomi: Promosi Tourism, Trade, and Investment (TTI) di China pasca berjangkitnya wabah COVID-19,’ yang membahas perlunya menggencarkan strategi

---

<sup>98</sup> Marcheilla Ariesta, “Wawancara Khusus Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar: Wamenlu Dorong Diplomasi Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19,” medcom.id, 22 Maret 2020.

diplomasi ekonomi, menyusul langkah-langkah strategis dan secara taktis bertindak untuk meningkatkan nilai TTI RI-China di tahun 2020.<sup>99</sup> Menariknya pada saat itu konteks yang ada adalah masih mengenai pandemi di China, dan bukan di Indonesia dan kemungkinan dampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Pada bulan April 2020, Indonesia terlibat dalam berbagai pertemuan dalam kerangka ASEAN yang membahas mengenai penangan COVID-19. Pada saat yang sama, Menteri Luar Negeri dalam suatu Konferensi Pers Virtual mengatakan bahwa dua prioritas diplomasi pada masa pandemi adalah: (1) memitigasi wabah dan mengatasi dampak ekonomi; dan (2) melindungi WNI di luar negeri serta warga asing di Indonesia. Belum terlihat fokus yang jelas pada diplomasi ekonomi.<sup>100</sup>

Pada bulan Mei 2020, mulai meningkat wacana diplomasi ekonomi sebagai strategi pertumbuhan ekonomi di tengah pandemi. Kemlu melangsungkan kegiatan dengan dua K/L terkait diplomasi ekonomi, yakni BKPM dan BI. Dengan BKPM, Kemlu melaksanakan Webinar dengan topik “Mempertahankan Momentum Investasi: Strategi Peningkatan Investasi Pasca COVID-19,”<sup>101</sup> sedangkan dengan BI ditandatangani MoU sebagai perkuatan kerja sama di bidang diplomasi ekonomi.<sup>102</sup>

Pada bulan Juli 2020, Kemlu resmi bentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE), yang ditugaskan membantu sektor usaha dalam negeri agar dapat mengambil peluang di kancah internasional saat pandemi. TPPE berkolaborasi dengan BKPM dan BUMN. Terkait ini, Kemlu menandatangani satu MoU lagi dengan Kementerian BUMN, yang bertujuan membentuk tim untuk mendukung pengembangan dan ekspansi BUMN di pasar global dan identifikasi bersama peluang investasi.<sup>103</sup>

Dari telaah media dapat disimpulkan bahwa pada awal pandemi, diplomasi lebih berfokus pada isu perlindungan WNI dan penyediaan alat kesehatan. Baru sejak Mei 2020 meningkat wacana mengenai diplomasi ekonomi, terutama dengan dibentuknya TPPE untuk mengatasi dampak negatif pandemi terhadap perekonomian Indonesia. Dengan meningkatnya fokus terhadap

---

<sup>99</sup> “COVID-19 di China Mereda, RI Harus Gencarkan Strategi Diplomasi Ekonomi,” *Rakyat Merdeka*, 12 Maret 2020.

<sup>100</sup> “Menlu Retno Paparkan Dua Prioritas Diplomasi RI dalam Menghadapi Virus Corona,” *kumparanNews*, 16 April 2020.

<sup>101</sup> “BKPM-Kemlu Perkuat Kerjasama untuk Genjot Investasi,” Siaran Pers BKPM, 7 Mei 2020.

<sup>102</sup> “Gubernur BI dan Melu Perkuat Kerja Sama Diplomasi Ekonomi di Masa COVID-19,” *Bisnis.com*, 20 Mei 2020.

<sup>103</sup> “Kementerian Luar Negeri Bentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi,” *Liputan 6*, 17 Juli 2020.

diplomasi ekonomi, maka isu berikutnya yang dibahas adalah, apa strategi yang dapat dilakukan untuk penguatan diplomasi ekonomi?

## VI.5. STRATEGI PENGUATAN DIPLOMASI EKONOMI

Pandemi menunjukkan kelemahan dari diplomasi ekonomi yang konvensional. Survei dari McKinsey menunjukkan bahwa adopsi teknologi dalam bisnis dan masyarakat telah mengalami kemajuan pesat dengan kualitas setara kemajuan lima tahun hanya dalam hitungan beberapa bulan saja sejak terjadi pandemi di tahun 2020 ini.<sup>104</sup>

Kemlu sebenarnya sudah sejak beberapa tahun ini mulai mempromosikan diplomasi digital, seiring dengan semakin berkembangnya ekonomi digital sebagai agenda utama berbagai forum multilateral dan regional, misalnya dengan menyelenggarakan Regional Conference on Digital Diplomacy (RCDD) tahun 2019. Kini semakin terlihat bahwa sudah eranya diplomasi digital mulai menggantikan sebagian dari diplomasi konvensional. Diplomasi Ekonomi Digital akan menjadi esensi utama strategi penguatan diplomasi ekonomi.

Temuan studi ini yang didasarkan pada wawancara dan telaah media menunjukkan ada 4 bidang di mana transformasi harus dilakukan dalam rangka strategi penguatan diplomasi ekonomi di tengah pandemi, yaitu: (1) penguatan kapasitas; (2) pola dan strategi perundingan perjanjian perdagangan; (3) pola dan strategi promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata; dan (4) diplomasi kesehatan. Berikut dibahas satu per satu bidang tersebut.

---

<sup>104</sup> Aamer Baig, Bryce Hall, et al. "The COVID-19 Recovery Will Be Digital: A Plan for the First 90 Days [Pemulihan COVID-19 Akan Digital: Sebuah Rencana 90 Hari Mendatang]," McKinsey Digital, 14 Mei 2020, <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days#>

---

## PENGUATAN KAPASITAS DI PUSAT

Strategi domestik yang perlu diterapkan meliputi harmonisasi kebijakan, penyederhanaan proses birokrasi, dan juga penegakan hukum yang memberikan kepastian. Strategi domestik ini perlu diterapkan untuk mempermudah proses usaha dan produksi dalam negeri, supaya sirkulasi ekonomi Indonesia berlangsung dengan lancar dan dapat menerapkan strategi tahap selanjutnya di skala internasional.

Dalam memperkuat kapasitas diplomasi di Pusat, ada dua kategori, yaitu penguatan kapasitas analisis kuantitatif dan penguatan kapasitas untuk percepatan pemulihan ekonomi. Seperti yang disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri,<sup>105</sup> penguatan kapasitas analisis kuantitatif di Kemlu telah terbentuk sejak Januari 2020, melalui pelatihan para diplomat muda secara intensif. Para diplomat muda tersebut dilatih untuk pembentukan Tim Analisis Kuantitatif yang berkedudukan di Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kemlu.

Penguatan kapasitas untuk percepatan pemulihan ekonomi dilakukan dengan membentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi per Juli 2020 di Kemlu, seperti yang dijelaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri.<sup>106</sup> Tim ini membantu percepatan realisasi investasi dan perdagangan. Presiden mengarahkan agar pembentukan tim pembangunan ekonomi di Kemlu tersebut bersifat *full-time* dan tugasnya tidak tumpang tindih dengan tugas-tugas lain. Dalam pelatihan intensif, tim ini belajar dari pengalaman senior yang mendukung kerja Gugus Tugas COVID-19. Wakil Menteri Luar Negeri menilai bahwa tim ini pada kenyataannya dapat merespon dengan cepat dan proaktif dalam antisipasi situasi pandemi sehingga banyak agenda yang bisa diselesaikan dengan baik.

---

## POLA DAN STRATEGI PERUNDINGAN PERJANJIAN PERDAGANGAN

Salah satu tantangan keberlanjutan diplomasi ekonomi salah satu di tengah pandemi COVID-19 adalah pencapaian target perjanjian rampung pada 2020. Pada akhir tahun 2019, dilaporkan bahwa Kemendag membidik penyelesaian 12 perjanjian perdagangan untuk tahun 2020, yaitu Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), Indonesia-Uni Eropa Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA), Indonesia-Maroko Preferential Trade Agreement

---

<sup>105</sup> Ibid.

<sup>106</sup> Ibid.

(IM-PTA), Indonesia-Tunisia Preferential Trade Agreement (IP-PTA), Indonesia-Bangladesh Preferential Trade Agreement (IB-PTA), Indonesia-Turki Comprehensive Economic Partnership Agreement (IT-CEPA), Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement, Indonesia-Eurasia Free Trade Agreement, Indonesia-Djibouti PTA, General Review ASEAN-Australia, New Zealand Free Trade Agreement (AANZFTA), Asean India Free Trade Agreement (AIFTA), dan Indonesia-Pakistan Trade in Goods.<sup>107</sup>

Staf Ahli Bidang Diplomasi Ekonomi Kemlu RI Ina Hagniningtyas Krisnamurthi menegaskan bahwa perundingan-perundingan ekonomi tetap berlangsung di tengah krisis, karena yang dibahas adalah norma-norma yang biasanya mengatur hal semacam tarif untuk perdagangan barang.<sup>108</sup> Meski demikian, sepertinya terlalu optimis bahwa target rampungnya 12 perjanjian perdagangan tersebut akan terpenuhi di tengah berbagai kendala pertemuan fisik akibat pandemi.

Pada Bab IV telah dibahas mengenai formulasi penilaian perjanjian internasional, termasuk sejumlah faktor yang menentukan pertimbangan nilai sebuah perjanjian internasional. Seiring dengan bergesernya target penyelesaian perundingan untuk tahun ini akibat pandemi, dan dengan adanya perubahan arsitektur ekonomi global, maka harus ada adaptasi pola dan strategi dalam penentuan kerja sama perdagangan, termasuk dalam perundingan perjanjian dagang.

Wakil Menteri Luar Negeri menyarankan agar perundingan perdagangan sebaiknya diarahkan ke sasaran yang lebih pragmatis dengan prinsip mengejar '*low hanging fruit to win the windfalls*', dan memprioritaskan hubungan perdagangan dengan sejumlah negara mitra, termasuk pemanfaatan perjanjian perdagangan dengan negara-negara tersebut.<sup>109</sup> Yang pertama disebutkan adalah Australia, di mana Indonesia perlu secepatnya memanfaatkan peluang *early-harvest* Indonesia-Australia Comprehensive Economic Agreement (IA-CEPA). Ini terkait dengan probabilitas perang dagang terbatas (*limited trade war*) dengan antara Australia dengan Tiongkok, sehingga Indonesia dapat meraih peluang untuk mengantikan produk-produk Tiongkok.

---

<sup>107</sup> "Pacu Ekspor, Kemendag Bidik Penyelesaian 12 Perjanjian Dagang di 2020" , Kata Data, 16 Oktober 2019, <https://katadata.co.id/marthathertina/berita/5e9a4e5f52b4c/pacu-ekspor-kemendag-bidik-penyelesaian-12-perjanjian-dagang-di-2020>

<sup>108</sup> "Tuntutan Perubahan dalam Diplomasi Ekonomi," Harian Nasional, 28 Mei 2020, <http://www.harnas.co/2020/05/21/tuntutan-perubahan-dalam-diplomasi-ekonomi>

<sup>109</sup> Disampaikan dalam "Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi (di Tengah) dan Pasca Pandemi (2020-2024)," Paparan pada Webinar Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi, yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), 15 Juli 2020.

Yang kedua adalah dengan Amerika Serikat. Walaupun Indonesia belum bisa menyelesaikan negosiasi terkait fasilitas *Generalized System of Preferences* (GSP) dengan Amerika Serikat, Indonesia masih termasuk dalam negara-negara penerima fasilitas GSP, berkisar 5,5 miliar dolar AS. Peluang yang dimiliki Indonesia adalah memanfaatkan GSP di tengah Perang Dagang AS-Tiongkok, optimalisasi raihan produk 5-7-5 dan memanfaatkan kesempatan melalui *Limited Trade Deals* yang pragmatis. Untuk itu, negosiasi fasilitas GSP penting untuk diselesaikan.

Yang ketiga adalah dengan Jepang, di mana Indonesia perlu mengulas kembali IJEPKA, seperti yang sudah dibahas di Bab IV. Diharapkan Jepang dapat melihat Indonesia sebagai rekan strategis dalam IJEPKA. Apabila tidak ditangani tahun ini, momentum Indonesia untuk menjalin kerja sama perdagangan dengan Jepang bisa berkurang akibat persoalan geopolitik yang semakin tajam di ASEAN. Terakhir, Wakil Menteri Luar Negeri juga menyampaikan pentingnya peluang hubungan dagang dengan India, di mana Indonesia perlu memanfaatkan peluang *accelerated PTA* dengan hati-hati untuk menyelamatkan surplus Indonesia dan meningkatkan total perdagangan mengingat India tidak masuk dalam RCEP.

---

#### *POLA DAN STRATEGI PROMOSI PERDAGANGAN, INVESTASI, DAN PARIWISATA*

Pandemi secara signifikan telah mengubah pola dan praktik promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata. Sebelumnya, diselenggarakannya berbagai pameran internasional menjadi porsi besar aktivitas promosi berbagai negara di dunia. Bab V telah membahas berbagai forum internasional yang diikuti Indonesia dalam rangka meningkatkan perdagangan, investasi, dan wisata. Di awal makalah ini juga disinggung mengenai peningkatan peran Indonesia di forum dan organisasi internasional (regional dan global) adalah bagian dari strategi diplomasi ekonomi.

Kini, berbagai pameran internasional terpaksa ditunda. Berbagai pertemuan fisik regular dalam forum-forum internasional juga dibatalkan akibat pandemi. Ini merupakan tantangan besar, karena berarti harus ada pola dan strategi promosi baru yang disesuaikan dengan kondisi pandemi saat ini. Selain itu, pemilihan sektor juga terdampak oleh pandemi.

BKPM menyebutkan setidaknya ada lima sektor investasi yang dinilai dapat bertahan di tengah krisis dan dapat dipertimbangkan untuk menjadi target promosi investasi pasca-pandemi, yaitu *e-commerce*, teknologi digital, keamanan siber, kesehatan dan bioteknologi, dan energi

terbarukan.<sup>110</sup> Untuk menggantikan promosi secara fisik dengan keterlibatan dalam berbagai forum dan pameran, maka yang perlu dilakukan adalah meningkatkan daya tarik investasi di Indonesia, ada sejumlah upaya fiskal dan non-fiskal yang perlu dilakukan, antara lain intensif fiskal seperti *tax allowance*, *tax holiday* dan keringanan impor bahan modal, dan kebijakan non-fiskal seperti percepatan proses perizinan. Perlu ada promosi khusus untuk sosialisasi berbagai kebijakan yang dapat meningkatkan daya tarik investasi ini, yaitu dengan memanfaatkan secara lebih efektif Perwakilan RI, dan meningkatkan promosi secara *online*.

Promosi secara daring juga telah menjadi strategi promosi pariwisata Indonesia selama pandemi. Menurut Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, kampanye ini merupakan upaya meningkatkan “*awareness*” bagi wisatawan mancanegara di negara-negara fokus pasar wisata Indonesia, dengan kegiatan antara lain menggelar Indonesian Sellers Meeting (ISM) yang memfasilitasi pelaku industri kita melakukan pertemuan virtual business to business dengan para pelaku industri pariwisata di luar negeri sehingga mereka dapat memberikan informasi terkait situasi wisata terkini di Indonesia, membuka peluang, dan berbagi strategi menarik dalam upaya menjaring calon wisatawan di tengah pandemi.<sup>111</sup>

Kegiatan virtual menjadi strategi di mana para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif dapat mengetahui kondisi masyarakat dan menjalin komunikasi dengan negara originasi khususnya antar pelaku industri (pembeli, penjual, dan pemerintah/regulator) dengan mempertemukan pelaku industri *inbound* dan *wholeseller/buyers* sebagai langkah persiapan menuju kegiatan *business to business*. Upaya ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap citra pariwisata Indonesia dengan menyampaikan kebijakan terkini dan *update* berbagai hal terkait pariwisata Indonesia.

Meski demikian, Wakil Menteri Luar Negeri tetap menegaskan bahwa masih banyak kendala untuk melakukan *physical openness* karena risiko penyebaran virus akibat pandemi, dan penting untuk melakukan kajian pertimbangan yang hati-hati terkait *timing* untuk membuka jalan bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.<sup>112</sup> Apabila pengambilan keputusan dilakukan terlalu

---

<sup>110</sup> “BKPM sebut 5 sektor ini calon target promosi investasi pasca-pandemi,” Antara News, 13 Mei 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1490372/bkpm-sebut-5-sektor-ini-calon-target-promosi-investasi-pasca-pandemi>

<sup>111</sup> “Promosi Pariwisata Indonesia Dioptimalkan lewat Online Selama Pandemi,” iNews, 18 Juli 2020, <https://www.inews.id/travel/destinasi/promosi-pariwisata-indonesia-dioptimalkan-lewat-online-selama-pandemi>

<sup>112</sup> Disampaikan dalam “Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi (di Tengah) dan Pasca Pandemi (2020-2024),” Paparan pada Webinar Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi, yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), 15 Juli 2020.

tergesa, dampaknya akan bersifat buruk bagi negara maupun negara asal turis (apabila dari luar negeri). Pengambilan keputusan yang tergesa-gesa dapat menimbulkan resistensi dalam negeri bila terjadi lonjakan angka kasus COVID-19.

---

### DIPLOMASI KESEHATAN

Diplomasi kesehatan kini telah masuk dalam ranah terkait diplomasi ekonomi. Sebenarnya, sejak tahun 2018 Kemlu sudah mengkaji hal ini, seperti yang tertuang dalam publikasi BPPK Kemlu tahun 2018 yang bertajuk “Kesehatan Untuk Semua: Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia.”<sup>113</sup> Saat ini, di tengah kelangkaan alat kesehatan, diplomasi dilakukan guna mencari inovasi melalui kemitraan. Selain itu, Indonesia sebagai anggota dari *Executive Board* WHO untuk tahun 2017–2021 mendukung jaminan ketersediaan vaksin dan akses ke vaksin. Menteri Luar Negeri menyampaikan bahwa diplomasi Indonesia saat ini diarahkan untuk menjamin akses, ketersediaan, dan keterjangkauan vaksin COVID-19.<sup>114</sup>

Dalam pemetaan bahan baku dan alat kesehatan, seperti disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri, Kemlu bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas untuk melakukan pemetaan penyediaan bahan baku dan obat di luar negeri. Kementerian Luar Negeri, dengan bantuan 71 Perwakilan, telah melakukan pemetaan, pada HS-6 Digit, untuk penyedia bahan baku alat kesehatan dan obat di luar negeri.<sup>115</sup> Pemetaan tersebut dilacak di *Trade Map* disertai dengan pelacakan produsen/perusahaan/eksportir di negara akreditasi dengan bantuan Perwakilan. Setelah daftar perusahaan atau eksportir penyedia bahan baku alat kesehatan dan obat berhasil dipetakan, pemetaan ini disampaikan ke pengusaha Indonesia melalui KADIN, APINDO, ASPAKI, Gakeslab, Bukalapak, PPI, Bank Indonesia, BNPB, dan Kementerian Kesehatan.

Secara umum, Indonesia menggunakan diplomasi untuk pembentukan *joint production* alat kesehatan, obat-obatan, dan vaksin dengan Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, dan India. Dengan Korea Selatan dan Jepang, misalnya, Indonesia menjalin kerja sama produksi bersama untuk

---

<sup>113</sup> BPPK Kemlu, “Kesehatan Untuk Semua: Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia,” 2018, <https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4lMjBCUFBL1A2SyUyME9JLU1VTFRJTEFURVJBTC8wNI9LZXNlaGF0YW5fdW50dWtfU2VtdWEucGRm>

<sup>114</sup> Retno LP Marsudi, “Diplomasi RI di Masa Pandemi,” *Kompas*, 9 Juli 2020.

<sup>115</sup> Disampaikan dalam “Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi (di Tengah) dan Pasca Pandemi (2020-2024),” Paparan pada Webinar Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi, yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), 15 Juli 2020.

melancarkan rantai pasok alat pelindung diri (APD) dan jubah operasi untuk kedua negara, sementara dengan India dilakukan kerja sama mempercepat pemenuhan bahan baku obat domestik.

Dalam jangka menengah dan panjang, diplomasi bahan baku obat ini dapat membantu meningkatkan kemandirian industri obat dan alat kesehatan melalui penjajakan *joint production* perusahaan farmasi nasional dengan perusahaan farmasi luar negeri. Kemudian, industri bahan baku obat Indonesia dapat semakin mandiri dengan adanya koordinasi kementerian/lembaga terkait untuk menyusun strategi bersama percepatan kemandirian industri bahan baku obat.

Indonesia menjalin kerja sama dan kolaborasi di tingkat bilateral, regional, dan multilateral. Menteri Luar Negeri dalam beberapa kesempatan menggarisbawahi berbagai bentuk kerja sama tersebut, baik di forum ASEAN, G-20, Gerakan Non Blok, Organisasi Kerja Sama Islam, maupun di berbagai forum informal tingkat menteri luar negeri lainnya.

## VI.6. PENUTUP

Sejumlah target diplomasi ekonomi Indonesia di tahun 2020, yaitu terkait perdagangan, investasi, dan pariwisata harus mengalami penyesuaian akibat pandemi COVID-19. Bukan hanya target, tetapi juga strategi untuk mencapai target tersebut juga harus dirancang ulang. Selain itu, pandemi menunjukkan kelemahan dari diplomasi ekonomi yang konvensional. Diplomasi Ekonomi Digital menjadi esensi utama strategi penguatan diplomasi ekonomi.

Penting bagi Indonesia agar tidak terjebak dalam tantangan, tapi harus dapat melihat pandemi sebagai kesempatan untuk bertransformasi, yaitu dengan mengubah cara berpikir dan melakukan adaptasi terhadap kondisi krisis. Ada peluang nyata bagi Indonesia, misalnya untuk mengambil peran penting dalam *global value chain* yang baru. Hubungan kerja sama dengan negara lain diharapkan dapat membantu memecahkan masalah rantai pasokan global dan menjadikan Indonesia sebagai pemeran penting.

Setidaknya ada 4 sektor di mana transformasi harus dilakukan dalam rangka strategi penguatan diplomasi ekonomi di tengah pandemi, seperti yang dibahas dalam bab ini, yaitu: penguatan kapasitas; pola dan strategi perundingan perjanjian perdagangan; pola dan strategi promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata; dan diplomasi kesehatan. Kesuksesan diplomasi ekonomi Indonesia akan bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dan melakukan transformasi pada sektor-sektor tersebut, dan mengambil peluang yang ada.

# BAB VII

## PENUTUP DAN REKOMENDASI

### 1. Terkait definisi diplomasi ekonomi

Pelaksanaan Diplomasi Ekonomi saat ini masih terbatas pada pekerjaan misi-misi diplomatik guna mencapai kesuksesan ekonomi dan tujuan pembangunan secara umum, utamanya perdagangan, investasi, dan pariwisata. Sedangkan dari perspektif aktor, diplomasi ekonomi Indonesia memiliki pemangku kepentingan yang beragam, meskipun, penggunaan istilah ‘diplomasi’ masih memberikan konotasi bahwa ini adalah ranah Kementerian Luar Negeri dan misi diplomatik, sehingga masih ada kerancuan dalam memahami terminologi ini. Terakhir, dari perspektif instrumen, diplomasi ekonomi Indonesia menggunakan instrumen yang cukup beragam, mulai dari perjanjian internasional, keterlibatan di berbagai forum internasional dan kegiatan lain seperti pameran dan bursa, dan penempatan atase perdagangan di sejumlah misi diplomatik yang dinilai penting.

Upaya untuk mendefinisikan diplomasi ekonomi dapat ditemukan antara lain dalam Renstra Kemlu 2015-2019, di mana diplomasi ekonomi didefinisikan sebagai: “*pemanfaatan alat politik internasional untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi melalui berbagai kerja sama seperti pembangunan (termasuk kesehatan, pendidikan dan pertanian), energi, lingkungan hidup, keuangan, dan pangan.*” Sesuai dengan kajian literatur, ini adalah definisi sempit.

Makalah kebijakan ini merekomendasikan bahwa pada jangka waktu pendek, definisi sempit ini cukup memadai bagi Indonesia, terutama bila mempertimbangkan situasi pandemi pada tahun 2020, di mana pertumbuhan ekonomi mengalami stagnasi atau bahkan kemunduran. Pada situasi demikian, dan beberapa tahun ke depan, tujuan ekonomi merupakan prioritas, sehingga sesuai bagi Indonesia untuk berfokus pada upaya pencapaian tujuan-tujuan ekonomi.

Namun, bila pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah stabil, dan tujuan ekonomi dari diplomasi ekonomi Indonesia sudah terpenuhi dengan baik, maka makalah kebijakan ini juga merekomendasikan untuk jangka waktu panjang Indonesia harus memperluas definisi diplomasi ekonomi. Sesuai dengan kajian literatur, definisi diplomasi ekonomi

yang luas adalah *penggunaan instrumen ekonomi untuk mencapai stabilitas politik negara dan juga penggunaan instrumen politik dalam negosiasi internasional dengan tujuan meningkatkan perekonomian sebuah negara*. Ini berarti instrumen dan tujuan akhir bisa kedua-duanya, ekonomi dan politik, dan dalam diplomasi ekonomi, kepentingan politik dan ekonomi seringkali berjalan secara bersama-sama bahkan saling mempengaruhi.

## 2. Terkait UU No. 37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Studi ini menyimpulkan bahwa ada urgensi untuk UU Hublu diperbaharui. Upaya pemerintah menggalakkan diplomasi ekonomi sejak 2014 tidak dibarengi dengan penyesuaian dokumen hukum yang melandasi kebijakan luar negeri, yakni UU Hublu. Istilah kebijakan luar negeri tidak jamak digunakan dalam dokumen ini, dan justru istilah “politik luar negeri” yang digunakan, yang menandakan bahwa hubungan luar negeri lebih dipandang sebagai bagian dari politik saja. Terminologi diplomasi ekonomi, ataupun isu yang terkait diplomasi ekonomi, tidak ditemukan dalam UU ini.

Satu contoh di mana ini bisa menjadi masalah adalah terkait koordinasi untuk pembuatan perjanjian perdagangan internasional yang belum diatur dalam UU Hublu. Bab III dari UU Hublu memang mengatur mengenai Pembuatan dan Pengesahan Perjanjian Internasional, tetapi pengaturannya sangat umum dan hanya melibatkan Kemlu saja tanpa ada pengaturan mengenai koordinasi dengan K/L lain, yang seyogyanya pasti dilakukan dalam hal perjanjian perdagangan internasional. Padahal, UU mengenai perdagangan sudah diperbaharui lengkap dengan pengaturan mengenai pembuatan perjanjian perdagangan internasional.

Urgensi ini tampaknya juga sudah diakui banyak pemangku kepentingan, dan Rancangan Undang-Undang yang baru pada saat ini sedang digodok di DPR. Penting bahwa RUU yang baru dapat memberikan definisi diplomasi ekonomi yang tepat bagi Indonesia termasuk tujuan dilakukannya diplomasi ekonomi itu sendiri, sehingga perumusan kebijakan yang dilakukan dapat disesuaikan dengan definisi tersebut. Studi ini sudah merekomendasikan pendefinisian pada poin 1 di atas.

## 3. Terkait pemetaan pemangku kepentingan

Kajian ini memetakan 16 pemangku kepentingan dalam diplomasi ekonomi Indonesia, dibagi menjadi tiga kategori, yaitu pelaksana diplomasi ekonomi, perencana diplomasi ekonomi; pendukung diplomasi ekonomi, dan tupoksi masing-masing. Sebagian tugas/fungsi ada yang spesifik dijalankan oleh aktor tertentu, tetapi ada juga tugas/fungsi yang tumpang tindih. Untuk 5 pemangku kepentingan yang menjadi pelaksana teknis dan

perumus kebijakan diplomasi ekonomi, pembagian tugas/fungsi cukup jelas. 4 pemangku kepentingan yang memiliki tiga peran sekaligus yaitu menjadi pelaksana teknis, perumus kebijakan, dan juga pendukung adalah Kemlu, Kemendag, BKPM, dan Kadin. Empat pemangku kepentingan ini terlibat langsung dalam pelaksanaan teknis diplomasi ekonomi, antara lain, tapi tidak terbatas pada, pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan luar negeri, perundingan perdagangan internasional, dan promosi investasi. Sedangkan Kementerian PPN/Bappenas memiliki dua peran sebagai perumus kebijakan dan pendukung.

Di sisi pendukungan, studi ini menemukan bisa terjadi tumpang tindih tugas/fungsi. Dalam RPJMN pun sudah diakui bahwa permasalahan diplomasi ekonomi adalah belum terpadunya kebijakan dan koordinasi diplomasi ekonomi, serta belum adanya mekanisme koordinasi penyelenggaraan investasi ke luar negeri, dan tidak disebutkan tugas pokok dan alur koordinasi dari K/L pemangku kepentingan yang menjadi hasil temuan dalam kajian ini. Ada 12 pemangku kepentingan yang memiliki peran pendukungan diplomasi ekonomi, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat, Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, Komite Ekonomi dan Industri Nasional, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif— - termasuk Visit Indonesia Tourism Office, Bank Indonesia, Kementerian BUMN, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Keuangan.

#### 4. Terkait perjanjian internasional

Dari kajian yang dilakukan dalam makalah ini, dapat dipahami bahwa Indonesia masih terus mempertahankan, kalau bisa memperluas, akses ke pasar-pasar tradisional, dan secara paralel juga membuka pasar-pasar yang selama ini belum terjangkau. Selain itu, juga dilakukan diversifikasi sektor ekspor, dan belakangan juga diversifikasi sektor impor.

Untuk menilai suatu perjanjian ekonomi internasional, ternyata baik pertimbangan ekonomi maupun strategis penting, setidaknya bagi Indonesia. Sebagai contoh, IA-CEPA bisa menjadi model untuk menilai FTA bilateral yang sangat menguntungkan secara ekonomi, dan meskipun tidak ASEAN-sentris tetapi ia sangat sesuai dengan kepentingan strategis Indonesia. Ini menunjukkan bahwa FTA yang tinggi keuntungan ekonomi dan strategis harus mendapatkan prioritas di antara negosiasi FTA lainnya.

Contoh lain adalah RCEP, di mana temuan studi ini RCEP memiliki keuntungan strategis yang justru melampaui keuntungan ekonomi, dan dengan profil yang demikian RCEP akan menjadi prioritas perundingan FTA Indonesia. Negara mitra yang terlibat dalam RCEP adalah negara-negara penting dalam arsitektur ekonomi kawasan, contohnya Tiongkok

dan Jepang. Di sisi lain, ia juga menawarkan keuntungan strategis bahwa ia sangat ASEAN-sentris (sesuai dengan arahan politik luar negeri Indonesia) dan sangat mendukung hubungan bilateral kunci karena semua negara RCEP adalah mitra penting Indonesia.

#### 5. Terkait forum internasional

Kajian ini menggunakan studi kasus G20 untuk menganalisis keterlibatan Indonesia di berbagai forum internasional. Bagi Indonesia, G20 menyajikan kesempatan untuk berjejaring di sela-sela pertemuan dan utamanya, memberikan kontribusi inisiatif. Di lain pihak, secara eksternal, hakikat dan proses pengambilan keputusan di G20 menjadi tantangan tersendiri dan secara internal, terlepasnya agenda reformasi domestik mengikis kredibilitas Indonesia di G20.

Ada tiga temuan penting. Pertama, karakteristik G20 sebagai forum yang multilateral dengan keputusan konsensus yang tidak mengikat dapat menjadi pelajaran-pelajaran di atas bisa menjadi model untuk menganalisis forum-forum lain dengan karakteristik serupa. Kedua, keanggotaan sebuah forum juga menentukan kesempatan dan tantangan forum tersebut. Keanggotaan G20 yang meliputi negara maju menyediakan kesempatan berjejaring di sela-sela konferensi untuk mengundang investasi, membuka akses pasar, dan meraih akses pendanaan. Begitu juga dengan tantangan menemukan kesamaan posisi antar Indonesia sebagai negara berkembang dengan negara-negara maju di G20. Sebagai perbandingan, keanggotaan Indonesia di forum Asosiasi Negara-Negara Pesisir Samudra Hindia (Indian Ocean Rim Association, IORA) yang didominasi negara berkembang, memberikan kesempatan berjejaring yang tidak sama berharganya seperti di G20 yang dihadiri kepala pemerintah negara maju. Ketiga, sepak terjang diplomasi ekonomi di forum-forum internasional tidak terlepas dari reformasi domestik. Seperti dijabarkan di bagian sebelumnya, bahkan kurangnya reformasi struktural di dalam negeri dapat secara langsung berdampak negatif pada upaya diplomasi ekonomi di luar negeri karena menggerus kredibilitas Indonesia di mata dunia.

Studi ini merekomendasikan studi-studi lanjutan untuk pemetaan forum lebih lanjut. Terutama melihat perbedaan kesempatan berdasarkan negara-negara anggota forum tersebut (negara maju atau negara berkembang).

#### 6. Terkait pandemi COVID-19

Sejumlah target diplomasi ekonomi Indonesia di tahun 2020, yaitu terkait perdagangan, investasi, dan pariwisata harus mengalami penyesuaian akibat pandemi COVID-19. Bukan

hanya target, tetapi juga strategi untuk mencapai target tersebut juga harus dirancang ulang.

Pandemi juga telah menunjukkan kelemahan dari diplomasi ekonomi yang konvensional. Kini semakin terlihat bahwa sudah eranya diplomasi digital mulai menggantikan sebagian dari diplomasi konvensional. Diplomasi Ekonomi Digital akan menjadi esensi utama strategi penguatan diplomasi ekonomi.

Setidaknya ada 4 sektor di mana transformasi harus dilakukan dalam rangka strategi penguatan diplomasi ekonomi di tengah pandemi, seperti yang dibahas dalam bab ini, yaitu: penguatan kapasitas; pola dan strategi perundingan perjanjian perdagangan; pola dan strategi promosi perdagangan, investasi, dan pariwisata; dan diplomasi kesehatan. Kesuksesan diplomasi ekonomi Indonesia akan bergantung pada kemampuan untuk beradaptasi dan melakukan transformasi pada sektor-sektor tersebut, dan mengambil peluang yang ada

#### 7. Terkait *Grand Design* Diplomasi Ekonomi Indonesia

Studi ini menemukan bahwa Indonesia belum memiliki *Grand Design* diplomasi ekonomi. Berdasarkan makalah kebijakan ini, perlu disusun rancangan *Grand Design* atau skema penguatan diplomasi ekonomi ke depan yang melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

## DAFTAR PUSTAKA

- “Ada 17 Ribu Pelajar Asal Indonesia di Australia,” *Tribun Makassar*, 11 Juli 2020,  
<https://makassar.tribunnews.com/2020/07/11/ada-17-ribu-pelajar-asal-indonesia-di-australia-begini-hebatnya-pendidikan-negeri-kanguru>
- “Australia Negara Terfavorit untuk Studi Mahasiswa Indonesia,” *Republika*, 9 Februari 2016,  
<https://www.republika.co.id/berita/internasional/abc-australia-network/16/02/09/o29t2c366-australia-negara-terfavorit-untuk-studi-mahasiswa-indonesia>
- “Australia Tambah Kuota Visa Kerja dan Liburan WNI jadi 4.100 Orang,” *Kontan*, 10 Juli 2020,  
<https://nasional.kontan.co.id/news/australia-tambah-kuota-visa-kerja-dan-liburan-untuk-wni-jadi-4100-orang>
- “Begini pembagian tugas Kemendag dan Kemenlu dalam diplomasi perdagangan,”  
*Kontan.co.id*, 19 November 2019, <https://nasional.kontan.co.id/news/begini-pembagian-tugas-kemendag-dan-kemenlu-dalam-diplomasi-perdagangan>
- “Crafting Trade Rules for a Digital Age in RCEP [Menempa Aturan Perdagangan di Era Digital untuk RCEP],” *Asia Trade Centre*, October 2018,  
<https://static1.squarespace.com/static/5393d501e4b0643446abd228/t/5bcd233c8165f55241feadc7/1540170559464/Policy+Brief+18-07+IP+and+EC+Oct+2018.pdf>
- “Di Depan Jokowi, PM Shinzo Abe Janji Tingkatkan Investasi di Indonesia,” *Detik*, 10 November 2014, <https://news.detik.com/berita/d-2743710/di-depan-jokowi-pm-shinzo-abe-janji-tingkatkan-investasi-di-indonesia>
- “Di Sela-sela KTT G20, SBY Bertemu Barack Obama,” *Detik*, 5 November 2011,  
<https://news.detik.com/berita/d-1761030/-di-sela-sela-ktt-g20-sby-bertemu-barack-obama>
- “Indonesia Buka Keran Impor Sapi, Australia Diprediksi Masih Akan Rajai Pasar,” *Detik*, 21 Januari 2020, <https://news.detik.com/abc-australia/d-4867788/indonesia-buka-keran-impor-sapi-australia-diprediksi-masih-akan-rajai-pasar>
- “Kementerian Luar Negeri Bentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi,” *Liputan 6*, 17 Juli 2020.
- “COVID-19 di China Mereda, RI Harus Gencarkan Strategi Diplomasi Ekonomi,” *Rakyat Merdeka*, 12 Maret 2020.
- “Menlu Retno Paparkan Dua Prioritas Diplomasi RI dalam Menghadapi Virus Corona,” *kumparanNews*, 16 April 2020.

- “Gubernur BI dan Melu Perkuat Kerja Sama Diplomasi Ekonomi di Masa COVID-19,” *Bisnis.com*, 20 Mei 2020.
- “Covid-19: 'Indonesia berpotensi resesi' - dampak ekonomi 'jauh lebih berat' ketimbang krisis moneter 1998” *BBC Indonesia*, 24 Juni 2020, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53152994>
- “Pacu Ekspor, Kemendag Bidik Penyelesaian 12 Perjanjian Dagang di 2020” , Kata Data, 16 Oktober 2019, <https://katadata.co.id/marthatertia/berita/5e9a4e5f52b4c/pacu-ekspor-kemendag-bidik-penyelesaian-12-perjanjian-dagang-di-2020>
- “Tuntutan Perubahan dalam Diplomasi Ekonomi,” Harian Nasional, 28 Mei 2020, <http://www.harnas.co/2020/05/21/tuntutan-perubahan-dalam-diplomasi-ekonomi>
- “BKPM sebut 5 sektor ini calon target promosi investasi pasca-pandemi,” *Antara News*, 13 Mei 2020, <https://www.antaranews.com/berita/1490372/bkpm-sebut-5-sektor-ini-calon-target-promosi-investasi-pasca-pandemi>
- “Promosi Pariwisata Indonesia Dioptimalkan lewat Online Selama Pandemi,” *iNews*, 18 Juli 2020, <https://www.inews.id/travel/destinasi/promosi-pariwisata-indonesia-dioptimalkan-lewat-online-selama-pandemi>
- “Officials: G20 to supplant G8 as international economic council [Pejabat: G20 menggantikan G8 sebagai dewan ekonomi internasional],” *CNN*, 24 November 2009, <http://edition.cnn.com/2009/US/09/24/us.g.twenty.summit/index.html>
- “Suap Daging PKS, Begini Awal Mulanya,” *Tempo*, 31 Januari 2013, <https://nasional.tempo.co/read/458101/suap-daging-pks-begini-awal-mulanya/full&view=ok>
- “RI Butuh 1,7 juta Ekor Sapi Impor Setahun, Mentan: Tak Bisa Dibiarkan,” *Katadata*, 20 Januari 2020, <https://katadata.co.id/marthatertia/berita/5e9a498e6615b/ri-butuh-17-juta-ekor-sapi-impor-setahun-mentan-tak-bisa-dibiarkan>

Anwar, Dewi Fortuna. “Megawati’s Search for an Effective Foreign Policy,” in *Governance in Indonesia, Challenges Facing the Megawati Presidency*, eds. Hadi Soesastro et al (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003).

Anwar, Muhammad Choirul. “Peringkat Doing Business RI Mentok di 73, Ini Warning Jokowi,” *CNBC Indonesia*, 12 Februari 2020, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200212105504-4-137205/peringkat-doing-business-ri-mentok-di-73-ini-warning-jokowi>

Australia Bureau of Statistics. “Balance of Payments and International Investment Position, Australia,” Desember 2019, <https://www.abs.gov.au/statistics/economy/international-trade/balance-payments-and-international-investment-position-australia/sept-2019>

- Baig, Aamer, Hall, Bryce Hall, et al. "The COVID-19 Recovery Will Be Digital: A Plan for the First 90 Days [Pemulihan COVID-19 Akan Digital: Sebuah Rencana 90 Hari Mendatang]," McKinsey Digital, 14 Mei 2020, <https://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/the-covid-19-recovery-will-be-digital-a-plan-for-the-first-90-days#>
- Baldwin, David. *Economic Statecraft*. (Princeton University Press, 1985).
- Barua, Poonam. "Economic Diplomacy in South Asia: Priorities and Stakeholders in the New Economy." *South Asian Survey*, Volume 13(1) (2006)
- Berridge, GR & James, Alan. *A Dictionary of Diplomacy* (Palgrave MacMillan, 2001).
- BKPM, "Siaran Pers: BKPM-Kemlu Perkuat Kerjasama untuk Genjot Investasi," , 7 Mei 2020, [https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file\\_siaran\\_pers/Siaran\\_Pers\\_BKPM\\_07052020\\_BKPM-Kemlu\\_Perkuat\\_Kerjasama\\_untuk\\_Genjot\\_Investasi.docx.pdf](https://www.bkpm.go.id/images/uploads/file_siaran_pers/Siaran_Pers_BKPM_07052020_BKPM-Kemlu_Perkuat_Kerjasama_untuk_Genjot_Investasi.docx.pdf)
- Blackwill, Robert D. & Harris, Jennifer M. *War By Other Means: Geoeconomics and Statecraft* (Belknap Press of Harvard University Press, 2016).
- Department of Education, Skills, and Employment. "Student Numbers," Juni 2020, <https://internationaleducation.gov.au/research/DataVisualisations/Pages/Student-number.aspx>
- Department of Foreign Affairs and Trade. "Memorandum of Understanding on a Pilot Workplace-Based Training Visa Arrangement," <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/in-force/iacepa/iacepa-text/Pages/iacepa-mou-pilot-workplace-based-training-visa-arrangement>
- Department of Foreign Affairs and Trade. "RCEP: Outcomes at a glance," <https://www.dfat.gov.au/trade/agreements/negotiations/rcep>
- Department of Foreign Affairs and Trade & Kementerian Perdagangan "Joint Feasibility Study Report on FTA between Indonesia and Australia," [http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20180523\\_joint-feasibility-study-report-on-fta-between-indonesia-and-australia.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20180523_joint-feasibility-study-report-on-fta-between-indonesia-and-australia.pdf)
- G20. "Communiqué of the G20 Finance Ministers & Central Bank Governors Meeting," 18 Juli 2020, <https://g20.org/en/media/Documents/Final%20G20%20MBCG%20Communiqu%C3%A9%20-%20July%202020.pdf>
- Gareta, Sella Panduarsa. "Indonesia-Jepang sepakat usung reformasi WTO di G20," Antara, 29 Mei 2019, <https://www.antaranews.com/berita/892461/indonesia-jepang-sepakat-usung-reformasi-wto-di-g20>
- Hurst, Daniel. "Why has China slapped tariffs on Australian barley and what can Australia do about it? [Mengapa Tiongkok menaikkan tarif jelai Australia dan apa yang bisa Australia

lakukan?]" *The Guardian*, 19 Mei 2020,  
<https://www.theguardian.com/business/2020/may/20/why-has-china-slapped-tariffs-on-australian-barley-and-what-can-australia-do-about-it>

International Chamber of Commerce, "ICC launches G20 Advisory Group for CEO inputs to Heads of State [ICC meluncurkan G20 Advisory Group untuk input CEO kepada Kepala Negara]," 24 Mei 2011, <https://iccwbo.org/media-wall/news-speeches/icc-launches-g20-advisory-group-for-ceo-input-to-heads-of-state/>

Kementerian Perdagangan "Apendiks 1-A. 1: Tarif Rate Quotas",  
[http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20191203\\_2a1-appendix-2a1-tariff-rate-quotas.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20191203_2a1-appendix-2a1-tariff-rate-quotas.pdf)

Kementerian Perdagangan. "Lampiran I: Jadwal Indonesia untuk Jasa dan Investasi",  
[http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20191203\\_14-9-annex-i-indonesia-services-and-investment-schedule-catatan-pengantar-lampiran-i.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20191203_14-9-annex-i-indonesia-services-and-investment-schedule-catatan-pengantar-lampiran-i.pdf)

Kementerian Perdagangan. "Lampiran 2-A. Jadwal Komitmen Tarif Indonesia," *Kementerian Perdagangan*, [http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc\\_20191203\\_2a-indonesia-tariff-schedule-bahasa.pdf](http://ditjenppi.kemendag.go.id/assets/files/publikasi/doc_20191203_2a-indonesia-tariff-schedule-bahasa.pdf)

Monash University. "Monash University announces new campus in Indonesia [Monash University mengumumkan kampus baru di Indonesia]," 10 Februari 2020,  
<https://www.monash.edu/news/articles/monash-university-announces-new-campus-in-indonesia#.XkC7TCILtBE.twitter>

Munadi, E. "Indonesian Non-Tariff Measures: Updates and Insights [Langkah Non-Tarif Indonesia: Perkembangan dan Wawasan]," in Ha Thi Thanh Doan & S. Rosenow (eds.), *Non-Tariff Measures in ASEAN: An Update* [Langkah Non-Tarif di ASEAN: Perkembangan]. 2019, Jakarta: ERIA, pp. 67-84,  
[https://www.eria.org/uploads/media/10.ERIA\\_Book\\_2019\\_NTM\\_Update\\_Chapter\\_3.pdf](https://www.eria.org/uploads/media/10.ERIA_Book_2019_NTM_Update_Chapter_3.pdf)

Naray, Olivier. "Commercial diplomacy: An Integrative Framework." *International Journal of Diplomacy and Economy*, Volume 1(2) (2012).

Nota Kesepahaman Kamar Dagang dan Industri dan Kementerian Luar Negeri, Januari 2020.

Office of the Prime Minister of Australia. "Visit to Thailand for East Asia Summit [Kunjungan ke Thailand untuk Konferensi Tinggi Asia Timur]," 2 November 2019,  
<https://www.pm.gov.au/media/visit-thailand-east-asia-summit>

Okano-Heijmans, Maaike. *Economic Diplomacy: Japan and The Balance of National Interests* (Martinus Nijhoff Publishers, 2013)

Paramesawaran, Prashanth. "Is Indonesia Turning Away from ASEAN Under Jokowi [Apakah Indonesia Berpaling dari ASEAN di bawah Jokowi]?" *The Diplomat*, 18 Desember 2014, <https://thediplomat.com/2014/12/is-indonesia-turning-away-from-asean-under-jokowi/>

Peraturan Kepala BKPM No 1 Tahun 2016 tentang Perwakilan BKPM di Luar Negeri

Peraturan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi No 2 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi

Peraturan Menteri Pariwisata No. 6 Tahun 2015

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 40 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan tahun 2020-2024.

Peraturan Presiden RI No 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal

Peraturan Presiden RI No 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian

Peraturan Presiden RI No 48 Tahun 2015 tentang Kementerian Perdagangan

Peraturan Presiden RI No 56 Tahun 2015 tentang Kementerian Luar Negeri

Peraturan Presiden RI No 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional

Peraturan Presiden RI No. 8 Tahun 2016 tentang Komite Ekonomi dan Industri Nasional

Peraturan Presiden RI No 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-202

Petri & Plummer et al. "Going it Alone in the Asia-Pacific: Regional Trade Agreements without the United States [Jalan Sendiri di Asia-Pasifik: Perjanjian Perdagangan Regional tanpa Amerika Serikat]," *Peterson Institute for International Economics*, October 2017, <https://www.piie.com/system/files/documents/wp17-10.pdf>

Pissarides, C. "Learning by Trading and the Returns to Human Capital in Developing Countries." *The World Bank Economic Review*. 11. pp. 17–32.

Putus PUU BK DPR RI, "Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan Luar Negeri," 25 September 2019, <http://berkas.dpr.go.id/pusatpuu/na/file/na-66.pdf>

Rana, Kishan S. "Economic diplomacy: what might best serve a developing country?" *International Journal of Diplomacy and Economy*, Volume 1(3/4) (2013).

Reinsh, William Alan & Jack Caporal. "At Last, An RCEP Deal [Akhirnya, Persetujuan atas RCEP]," *Center for Strategic and International Studies*, 3 Desember 2019, <https://www.csis.org/analysis/last-rcep-deal>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

- Rencana Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2015-201
- Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2020-2024
- Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024
- Roberts, Anthea, Moraes, Henrique & Ferguson, Victor Ferguson. "Toward a Geoeconomic Order in International Trade and Investment." *Journal of International Economic Law*, Volume 22 (4). (2019).
- Scholte, Jan Aart. *Globalization: A Critical Introduction* (St. Martin's Press, 2000).
- Scholvin, Sören & Wigell. "Power Politics by Economic Means: Geoconomics as an Analytical Approach and Foreign Policy Practice." *Comparative Strategy*, Volume 37 (1). (2018).
- Sebayang, Rehia Indrayanti Beru. "IA-CEPA Resmi Diteken, Dua Kampus Australia ini Siap Masuk RI," *CNBC Indonesia*, 4 Maret 2019,  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20190304191215-4-58828/ia-cepa-resmi-diteken-dua-kampus-australia-ini-siap-masuk-ri>
- Setyorini, Virna P. "Diplomasi Sawit Sulit, Diplomat Sebut Perlu Perbaikan dalam Negeri," *Antara*, 23 Oktober 2019, <https://www.antaranews.com/berita/1128419/diplomasi-sawit-sulit-diplomat-sebut-perlu-perbaikan-dalam-negeri>
- Sherpa G20 Indonesia. "Perkembangan Isu Utama,",  
<https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/public/perkembangan-isu-utama-2>
- Sherpa G20 Indonesia. "Pertemuan KTT Luar Biasa Pemimpin G20 Secara Virtual dalam Pembahasan Penanganan COVID-19," 26 Maret 2020,  
<https://sherpag20indonesia.ekon.go.id/public/pertemuan-ktt-luar-biasa-pemimpin-g20-secara-virtual-dalam-pembahasan-penanganan-covid-19>
- Sukarno, Puput Ady. "Sri Mulyani: Seluruh Dunia Pusing Tarik Pajak Google," *Bisnis*, 12 Juni 2019,  
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190612/259/932856/sri-mulyani-seluruh-dunia-pusing-tarik-pajak-google>
- Tobin, Meaghan. "Explained: the difference between RCEP and CPTPP [Penjelasan: Perbedaan RCEP dan CPTPP]," *South China Morning Post*, 6 Juli 2019, <https://www.scmp.com/week-asia/geopolitics/article/3017487/explained-difference-between-rcep-and-cptpp>
- Triggs, Adam. "The Economic and Political Case for Coordinating Fiscal Stimulus [Argumen Ekonomi dan Politik untuk Koordinasi Stimulus Fiskal]," *Brookings*, November 2018,  
[https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/11/Triggs\\_Case-for-coordination-fiscal-stimulus.pdf](https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2018/11/Triggs_Case-for-coordination-fiscal-stimulus.pdf)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang No 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri

Undang-Undang No 37 Tahun 1999 mengenai Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang No 2 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan

Nota Kesepahaman Antara Bank Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Kerja Sama Peningkatan Diplomasi Ekonomi

Nota Kesepahaman Antara Kementerian BUMN dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

Wawancara: Iman Pambagyo, Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional  
Kementerian Perdagangan: Jakarta, 12 Agustus 2020.

Wawancara: Rizal Affandi Lukman, Deputi Bidang Kerja Sama Ekonomi Internasional,  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian: Jakarta, 9 September 2020.

Wawancara: Kamar Dagang dan Industri & Asosiasi Pengusaha Indonesia di *focus group discussion* Daerah Indonesia-EU CEPA: Jakarta, 30 Juni 2020.

Witular, Rendi A. "Jokowi demands fair trade [Jokowi menuntut perdagangan adil]," *Jakarta Post*, 13 November 2014, <https://www.thejakartapost.com/news/2014/11/13/jokowi-demands-fair-trade.html>

Woolcock, Nicholas & Bayne, Stephen. (Eds.) *The New Economic Diplomacy: Decision-Making and Negotiation in International Economic Relations*. (Taylor and Francis, 2017).

Yakop, Mina & van Bergeijk. "Economic Diplomacy, Trade, and Developing Countries."  
*Cambridge Journal of Regions Economy and Society*, Volume 4(2) (2011).

Zhen, Liu. "G20 split as US refuses to sign joint statement on climate change [G20 terpecah, AS menolak menandatangani pernyataan bersama perubahan iklim]," *South China Morning Post*, 29 Juni 2019, <https://www.scmp.com/news/china/diplomacy/article/3016630/g20-split-us-refuses-sign-joint-statement-climate-change>

Retno LP Marsudi, "Diplomasi RI di Masa Pandemi," *Kompas*, 9 Juli 2020.

Mahendra Siregar, "Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi (di Tengah) dan Pasca Pandemi (2020-2024)," Paparan pada Webinar Strategi Penguatan Diplomasi Ekonomi Indonesia Pasca Pandemi, yang diselenggarakan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Centre for Strategic and Internasional Studies (CSIS), 15 Juli 2020.

Bank Indonesia, "Tinjauan Kebijakan Moneter Maret 2020," 20 Maret 2020,  
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Maret-2020.aspx>

Bank Indonesia, "Tinjauan Kebijakan Moneter Juni 2020," 19 Juni 2020,  
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/kebijakan-moneter/tinjauan/Pages/Tinjauan-Kebijakan-Moneter-Juni-2020.aspx>

Bank Indonesia, "Perkembangan Ekonomi Keuangan dan Kerja Sama Internasional: Momentum Pemulihan Berlanjut di Tengah Kerentanan Global," Edisi II 2017,  
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/ekonomi-keuangan-kerjasama-internasional/Documents/PEKKI-II-2017.pdf>

Marcheilla Ariesta, "Wawancara Khusus Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar: Wamenlu Dorong Diplomasi Ekonomi di Tengah Pandemi COVID-19," *medcom.id*, 22 Maret 2020.

BPPK Kemlu, "Kesehatan Untuk Semua: Strategi Diplomasi Kesehatan Global Indonesia," 2018,  
<https://kemlu.go.id/download/L3NpdGVzL3B1c2F0L0RvY3VtZW50cy9LYWppYW4lMjBCUFBLl1AzSyUyME9JLU1VTFRJTEFURVJBTC8wNi9LZXNlaGFOYW5fdW50dWtfU2VtdWEucGRm>

## LAMPIRAN 1

### SUMBER BERITA PELACAKAN MEDIA

No	Kategori	Tahun	Tanggal	Pengujar	Lokasi	Kutipan	Media	Tautan
1	Diplomasi perdagangan	2014	15-Dec-2014	Kementerian Perdagangan (Kemendag)	Medan	Staf Ahli Bidang Diplomasi Perdagangan Kemendag Sondang Anggraini, mengatakan, pemerintah mengupayakan dukungan kebijakan, kelembagaan dan anggaran dalam menghadapi MEA.	Medan Bisnis	<a href="https://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/16/135726/pen-gusaha-sumut-tak-siap-hadapi-mea/">https://medanbisnisdaily.com/news/read/2014/12/16/135726/pen-gusaha-sumut-tak-siap-hadapi-mea/</a>
2	Diplomasi ekonomi	2015	8-Jan-2015	Kementerian Luar Negeri (Kemlu)		"Untuk memfasilitasi tindak lanjut kegiatan ekonomi di luar negeri, Kemlu akan membentuk task force diplomasi ekonomi yang dipimpin Wamenlu. Unit ini akan berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait guna memastikan bahwa peluang bisnis, kerja sama pembangunan dan kesepakatan ekonomi dengan negara lain dapat segera ditindaklanjuti."	Liputan 6	<a href="https://www.liputan6.com/news/read/2158087/ini-3-prioritas-politik-luar-negeri-indonesia">https://www.liputan6.com/news/read/2158087/ini-3-prioritas-politik-luar-negeri-indonesia</a>
3	Diplomasi ekonomi	2015	22-Jan-2015	Kemlu	Jakarta	"Dalam pernyataan pers awal tahun Menteri Luar Negeri menyebutkan salah satu prioritas Kemlu adalah untuk meningkatkan diplomasi ekonomi. Satgas Diplomasi ekonomi menjadi prioritas kami, dan sejak awal Januari sudah banyak kegiatan dan langkah konkret yang dilakukan	Kompas	<a href="https://nasional.kompas.com/read/2015/01/22/1904516/Prioritas.Diplomasi.Ekonomi.Perwakilan.RI.di.Luar.Negeri.Juga.Lakukan.Riset.Pasar">https://nasional.kompas.com/read/2015/01/22/1904516/Prioritas.Diplomasi.Ekonomi.Perwakilan.RI.di.Luar.Negeri.Juga.Lakukan.Riset.Pasar</a>
4	Diplomasi ekonomi	2015	16-Jun-2015	Kemlu	Jakarta	Kementerian Luar Negeri Indonesia membentuk kelompok kerja ekonomi (pokja ekonomi) pada awal 2015. Tujuan pembentukan pokja ini untuk merespon dan mendukung capaian diplomasi ekonomi yang digagas Presiden Joko Widodo.	Merdeka	<a href="https://www.merdeka.com/dunia/diplomasi-ekonomi-ri-difokuskan-pada-perdagangan-dan-turisme.html">https://www.merdeka.com/dunia/diplomasi-ekonomi-ri-difokuskan-pada-perdagangan-dan-turisme.html</a>
5	Diplomasi ekonomi	2015	14-Sep-2015	Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	Jakarta	Fadli Zon mengenai pertemuan Ketua DPR dengan Donald Trump: "Jadi ini peran diplomasi untuk	Kompas	<a href="https://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/13440261/Bagi.Fadli.Zon.Pertemuan.dengan.Donald.Trump.Bentuk.Diplomasi.Ekonomi">https://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/13440261/Bagi.Fadli.Zon.Pertemuan.dengan.Donald.Trump.Bentuk.Diplomasi.Ekonomi</a>

					mendukung pemerintah sebagai second track diplomacy. Karena memang tugas diplomasi bukan hanya tugas pemerintah tapi juga parlemen. Dan ini sudah diratifikasi dalam Inter-Parliamentary Union."		mi	
6	Diplomasi ekonomi	2015	23-Nov-2015	Presiden Joko Widodo	Jakarta	"Menteri luar negeri tetap memegang tanggung jawab penuh dalam menjalankan diplomasi ekonomi, menyelenggarakan urusan yang berkaitan dengan hubungan luar negeri dan bertanggung jawab untuk menjalin hubungan baik Indonesia dengan negara-negara sahabat,"	Detik	<a href="https://news.detik.com/berita/d-3078618/seksab-penunjukan-para-menteri-penghubung-antarnegara-di-bawah-koordinasi-menlu">https://news.detik.com/berita/d-3078618/seksab-penunjukan-para-menteri-penghubung-antarnegara-di-bawah-koordinasi-menlu</a>
7	Diplomasi ekonomi	2015	24-Nov-2015	Kemlu		Menteri Luar Negeri tetap bertugas buka jalan diplomasi ekonomi.	Merdeka	<a href="https://www.merdeka.com/dunia/menteri-luar-negeri-tetap-bertugas-buka-jalan-diplomasi-ekonomi.html">https://www.merdeka.com/dunia/menteri-luar-negeri-tetap-bertugas-buka-jalan-diplomasi-ekonomi.html</a>
8	Diplomasi ekonomi	2015	4 - 5 Juni 2015	Kemlu	Jakarta	Diplomasi ekonomi penting dalam meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Amerika Tengah. Indonesia dapat manfaatkan peluang kerja sama yang dimiliki di bidang perdagangan dan teknik, khususnya dengan Nikaragua.	Tribun	<a href="tribunnews.com/nasional/2015/06/06/indonesia-rengkuh-nikaragua-melalui-diplomasi-ekonomi">tribunnews.com/nasional/2015/06/06/indonesia-rengkuh-nikaragua-melalui-diplomasi-ekonomi</a>
9	Diplomasi ekonomi	2016	1-Feb-2016	Kemlu		Selain itu, melalui diplomasi ekonomi, dia akan menarik para investor dan menjadikan Kroasia sebagai pintu kedua masuk Eropa untuk produk-produk eksport Indonesia, sehingga menghemat tujuh hari dari biasanya yang membutuhkan waktu lama jika melalui pelabuhan Rotterdam	Berita Satu	<a href="https://www.beritasatu.com/gagarin/photo/4553/alex-litaay-akan-wujudkan-diplomasi-ekonomi-demi-kemajuan-indonesia">https://www.beritasatu.com/gagrin/photo/4553/alex-litaay-akan-wujudkan-diplomasi-ekonomi-demi-kemajuan-indonesia</a>
10	Diplomasi ekonomi	2016	13-Mar-2016	Kemlu	Amman	Dalam kunjungan ke Amman, Yordania pada 12 Maret 2016, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno LP Marsudi menegaskan bahwa pemerintah Indonesia memiliki perhatian lebih terhadap kawasan Timur Tengah dan Afrika, khususnya dalam mendorong diplomasi	Okezone	<a href="https://news.okezone.com/read/2016/03/13/18/1334600/menlu-ri-indonesia-dorong-diplomasi-ekonomi-timur-tengah-dan-afrka">https://news.okezone.com/read/2016/03/13/18/1334600/menlu-ri-indonesia-dorong-diplomasi-ekonomi-timur-tengah-dan-afrka</a>

						ekonomi.		
11	Diplomasi perdagangan	2016	20-Sep-2016	Kamar Dagang Indonesia (KADIN)	Jakarta	"Bagi saya pengusaha 'the show must go on'. Kita tidak boleh terombang ambing oleh ketidakpastian. Diharapkan Mendag selaku pemerintah, melakukan diplomasi perdagangan harus lebih cerdas pak,"	Merdeka	<a href="https://www.merdeka.com/uang/pengusaha-kesal-belanja-modal-pemerintah-dan-bumn-habis-buat-impor.html">https://www.merdeka.com/uang/pengusaha-kesal-belanja-modal-pemerintah-dan-bumn-habis-buat-impor.html</a>
12	Diplomasi ekonomi	2016	6-Oct-2016	Kemlu	Jember	"Kunjungan ke daerah sebagai bagian dari kurikulum Diklat diplomasi ekonomi yang bertujuan untuk lebih memahami dan menggali potensi ekonomi daerah dan membangun jejaring dengan para pemangku kepentingan."	Tribun	<a href="https://www.tribunnews.com/tribunners/2016/10/06/diplomat-indonesia-pasarkan-potensi-jember-ke-luar-negeri">https://www.tribunnews.com/tribunners/2016/10/06/diplomat-indonesia-pasarkan-potensi-jember-ke-luar-negeri</a>
13	Diplomasi ekonomi	2016	3-Nov-2016	Bank Indonesia (BI)	Jakarta	"Kita perlu meningkatkan kerja sama bilateral dan regional. Namun, juga diperlukan adanya diplomasi ekonomi agar tidak terus tergerus dan dibanjiri persaingan global, karena ekonomi dunia juga belum membaik,"	Sindo News	<a href="https://ekbis.sindonews.com/berita/1152391/33/indonesia-perlu-diplomasi-ekonomi-agar-mampu-bersaing">https://ekbis.sindonews.com/berita/1152391/33/indonesia-perlu-diplomasi-ekonomi-agar-mampu-bersaing</a>
14	Diplomasi ekonomi	2016	26-Nov-2016	Kemlu	Calgary	Dubes Teuku Faizasyah: "Saudara-saudara adalah "duta-duta" memperkenalkan wajah dan budaya Indonesia kepada masyarakat Kanada dan juga membantu Pemerintah Indonesia dengan melakukan diplomasi ekonomi."	Republika	<a href="https://republika.co.id/berita/oh89cv284/wni-di-kanada-diajak-dukung-diplomasi-ekonomi">https://republika.co.id/berita/oh89cv284/wni-di-kanada-diajak-dukung-diplomasi-ekonomi</a>
15	Diplomasi ekonomi	2017	5-Feb-2017	Kemlu	Kairo	"...peningkatan diplomasi ekonomi ke kawasan Afrika merupakan salah satu prioritas Indonesia untuk 2017... Kita harus mencari mekanisme bilateral yang dapat menurunkan tarif bagi produk Indonesia di Mesir."	Republika	<a href="https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/02/06/okxu95368-indonesiamesir-tingkatkan-kerja-sama-ekonomi-dan-ukm">https://republika.co.id/berita/ekonomi/makro/17/02/06/okxu95368-indonesiamesir-tingkatkan-kerja-sama-ekonomi-dan-ukm</a>
16	Diplomasi ekonomi	2017	8-Feb-2017	Kemlu	Jakarta	Salah satu prioritas diplomasi ekonomi Indonesia pada 2017 adalah meningkatkan hubungan ekonomi dengan negara-negara di Afrika yang menurut Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, kawasan Afrika memiliki potensi besar dan penting	Tirto	<a href="https://tirto.id/menteri-luar-negeri-ungkapkan-afrika-penting-bagi-indonesia-ciBq">https://tirto.id/menteri-luar-negeri-ungkapkan-afrika-penting-bagi-indonesia-ciBq</a>

						bagi Indonesia.		
17	Diplomasi ekonomi	2017	3-Mar-2017	BI	Jakarta	"BI dan Kemlu perlu memperkuat dan meningkatkan kerja sama di tengah semakin dinamisnya tantangan yang dihadapi Indonesia dalam kerja sama internasional. Kerja sama dan sinergi yang harmonis ini diharapkan dapat mendukung terciptanya diplomasi ekonomi yang efektif sehingga kepentingan nasional dan persepsi positif Indonesia dapat tetap terjaga,"	CNN Indonesia	<a href="https://www.cnnindonesia.com/economia/20170303111923-78-197566/bi-kemlu-teken-kesepakatan-tingkatkan-diplomasi-ekonomi">https://www.cnnindonesia.com/economia/20170303111923-78-197566/bi-kemlu-teken-kesepakatan-tingkatkan-diplomasi-ekonomi</a>
18	Diplomasi ekonomi	2017	11-Aug-2017	Kemlu	Jakarta	Kepala Bagian Dukungan Substansi Program Luar Negeri Biro Dukungan Strategi Pimpinan Kemlu Landry Subianto: "Diplomasi ekonomi telah menjadi prioritas Kemlu, selain menjaga kedaulatan NKRI, perlindungan WNI, dan meningkatkan peran Indonesia di forum regional dan multilateral global."	Harian Jakarta	<a href="http://www.koran-jakarta.com/mengisi-kemerdekaan-indonesia-dengan-diplomasi-ekonomi/">http://www.koran-jakarta.com/mengisi-kemerdekaan-indonesia-dengan-diplomasi-ekonomi/</a>
19	Diplomasi ekonomi	2017	16-Aug-2017	Presiden Joko Widodo	DPR	"....dalam diplomasi ekonomi, mesin diplomasi kita juga terus bergerak menggarap pasar-pasar non-tradisional di Afrika, Timur Tengah, dan Asia."	Liputan 6	<a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/3060142/jokowi-diplomasi-ekonomi-ri-bergerak-ke-pasar-nontradisional">https://www.liputan6.com/bisnis/read/3060142/jokowi-diplomasi-ekonomi-ri-bergerak-ke-pasar-nontradisional</a>
20	Diplomasi ekonomi	2017	1-Sep-2017	Presiden Joko Widodo		"Pengiriman pesawat buatan PT Dirgantara Indonesia tersebut bukan sekadar aksi perdagangan belaka, tapi sekaligus diplomasi ekonomi Indonesia di dunia,"	Liputan 6	<a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/3079266/cn235-jadi-cara-jokowi-jalankan-diplomasi-ekonomi">https://www.liputan6.com/bisnis/read/3079266/cn235-jadi-cara-jokowi-jalankan-diplomasi-ekonomi</a>
21	Diplomasi ekonomi	2017	28-Sep-2017	Kemlu	Bogor	"Penguatan diplomasi ekonomi merupakan salah satu prioritas politik luar negeri Indonesia, ini menjadi pertimbangan kami melakukan kajian ini... Salah satu tujuan diplomasi ekonomi tersebut adalah meningkatkan volume dan kualitas perdagangan Indonesia... Untuk itu, diplomasi ekonomi diarahkan salah satunya untuk menggali potensi pasar non-tradisional dan	Okezone	<a href="https://economy.okezone.com/read/2017/09/28/320/1784750/dinilai-potensial-indonesia-bidik-peluang-ekonomi-di-amerika-latin">https://economy.okezone.com/read/2017/09/28/320/1784750/dinilai-potensial-indonesia-bidik-peluang-ekonomi-di-amerika-latin</a>

						pasar alternatif bagi produk-produk Indonesia."		
22	Diplomasi ekonomi	2017	21-Nov-2017	Kemlu	Moscow	"Keikutsertaan Indonesia [di Moscow Halal Expo] sebagai bagian dari diplomasi ekonomi... Selain mempererat hubungan kedua masyarakat, saling mengetahui budaya dan tradisi satu sama lainnya melalui kunjungan wisata, kerja sama ini juga dapat memberikan dampak ekonomi yang berarti bagi sektor bisnis."	Okezone	<a href="https://travel.okezone.com/read/2017/1/21/406/1817632/berpenduduk-muslim-terbesar-di-eropa-indonesia-bidik-wisatawan-rusia">https://travel.okezone.com/read/2017/1/21/406/1817632/berpenduduk-muslim-terbesar-di-eropa-indonesia-bidik-wisatawan-rusia</a>
23	Diplomasi perdagangan	2018	13-Jan-2018	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)		Dalam rangka meningkatkan ekspor produk nonmigas, langkah yang diambil, yakni meningkatkan efektivitas diplomasi perdagangan, meningkatkan efektivitas market intelligence, promosi dan asistensi eksport, serta membantu eksport produk manufaktur.	Liputan 6	<a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/3225198/pemerintah-patok-ekonomi-ri-tumbuh-8-persen-di-2019-dalam-rpimn">https://www.liputan6.com/bisnis/read/3225198/pemerintah-patok-ekonomi-ri-tumbuh-8-persen-di-2019-dalam-rpimn</a>
24	Diplomasi ekonomi	2018	12-Feb-2018	Kemlu	Jakarta	"Fokus kita adalah perlindungan warga dan meningkatkan diplomasi ekonomi. Ke depan, akan dikembangkan pelayanan imigrasi bagi para pelaut Indonesia."	Tempo	<a href="https://bisnis.tempo.co/read/1059922/ingin-ekspansi-pasar-ke-singapura-ada-aplikasi-khususnya/full&amp;view=ok">https://bisnis.tempo.co/read/1059922/ingin-ekspansi-pasar-ke-singapura-ada-aplikasi-khususnya/full&amp;view=ok</a>
25	Diplomasi ekonomi	2018	12-Feb-2018	Presiden Joko Widodo	Kemlu	"Jadi bapak/ibu dubes harus berhadapan pada dua hal ini untuk menjalankan diplomasi ekonomi kita di luar negeri. "Negara sebesar Indonesia nilai eksornya kalah dengan Malaysia, Thailand, Filipina. Bahkan dengan Vietnam hampir separuhnya nilai ekspor kita. Kita itu monoton gak pernah lakukan terobosan." Indonesia sudah tak bisa lagi hanya mengandalkan pasar tradisional di tengah maraknya kebijakan proteksionisme dan ketidakpastian yang muncul di berbagai belahan dunia."	CNN Indonesia	<a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180212140725-106-275588/jokowi-tegur-dubes-agar-genjot-nilai-ekspor-indonesia">https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180212140725-106-275588/jokowi-tegur-dubes-agar-genjot-nilai-ekspor-indonesia</a>
26	Diplomasi ekonomi	2018	13-Feb-2018	Kemlu	Jakarta	"Memang fokus diplomasi ekonomi pemerintah Indonesia saat ini sudah mengarah ke pasar non-tradisional, khususnya	Bisnis	<a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20180214/19/738599/indonesia-afrika-pererat-diplomasi-ekonomi">https://kabar24.bisnis.com/read/20180214/19/738599/indonesia-afrika-pererat-diplomasi-ekonomi</a>

						Afrika,"		
27	Diplomasi ekonomi	2018	22-Feb-2018	Kemlu	Jakarta	Duta Besar Indonesia untuk Bulgaria Sri Astari Rasjid mengungkapkan hubungan diplomasi ekonomi Indonesia-Hungaria semakin membaik dilihat dari kegiatan ekspor-impor dan kegiatan investasi di kedua negara yang terus bertambah.	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/gNQydBqN-dubes-ri-untuk-bulgaria-kegiatan-diplomasi-ekonomi-kian-membai">https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/gNQydBqN-dubes-ri-untuk-bulgaria-kegiatan-diplomasi-ekonomi-kian-membai</a>
28	Diplomasi ekonomi	2018	2-Mar-2018	Kemlu	Jakarta	"Diplomasi ekonomi adalah salah satu prioritas nasional untuk program pemerintah periode 2014-2019. Bidang kesehatan termasuk salah satu yang potensial untuk terus didorong melalui diplomasi ekonomi"	Republika	<a href="https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/02/p4yg2a423-biofarmakemenlu-siapkan-strategi-diplomasi-kesehatan">https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/02/p4yg2a423-biofarmakemenlu-siapkan-strategi-diplomasi-kesehatan</a>
29	Diplomasi ekonomi	2018	2-Mar-2018	Kemlu	Jakarta	"Dengan total pendapatan domestik bruto sekitar US\$6,5 triliun pada 2016, OKI sangat potensial bagi diplomasi ekonomi bidang kesehatan,"	Bisnis	<a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20180302/257/745169/oki-jadi-sasaran-diplomasi-ekonomi-bidang-kesehatan">https://ekonomi.bisnis.com/read/20180302/257/745169/oki-jadi-sasaran-diplomasi-ekonomi-bidang-kesehatan</a>
30	Diplomasi perdagangan	2018	8-May-2018	Kementerian Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves)	Jakarta	"Pemerintah Indonesia akan menerapkan diplomasi perdagangan, dengan mengedepankan dialog, dan lobi, serta menjelaskan langkah yang akan diambil oleh pemerintah untuk penerapan prinsip keberlanjutan dalam sektor kelapa sawit,"	Antara	<a href="https://www.antaranews.com/berita/708081/indonesia-kedepankan-diplomasi-perdagangan-untuk-sektor-sawit">https://www.antaranews.com/berita/708081/indonesia-kedepankan-diplomasi-perdagangan-untuk-sektor-sawit</a>
31	Diplomasi perdagangan	2018	19-May-2018	Kemendag	Jakarta	"Pendekatan diplomasi perdagangan secara bilateral terus dilakukan baik dengan negara mitra dagang utama maupun negara non tradisional,"	Katadata	<a href="https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55f62f97e/kemendag-optimistis-bisa-capai-target-pertumbuhan-ekspor">https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a55f62f97e/kemendag-optimistis-bisa-capai-target-pertumbuhan-ekspor</a>
32	Diplomasi perdagangan	2018	27-Jun-2018	Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)	Jakarta	"...pemerintah perlu melakukan diplomasi perdagangan untuk mendorong ekspor CPO dan produk turunannya."	Neraca	<a href="https://www.neraca.co.id/article/102576/kampanye-negatif-berdampak-kepada-ekspor-produk-sawit">https://www.neraca.co.id/article/102576/kampanye-negatif-berdampak-kepada-ekspor-produk-sawit</a>
33	Diplomasi perdagangan	2018	2-Jul-2018	KEIN	Jakarta	Misalnya dari sisi pelayaran, belum tentu perusahaan dalam negeri lebih murah dari perusahaan pelayaran global yang melayani perdagangan antar negara. Di sinilah diplomasi	Kompas	<a href="https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/05/102243426/rupiah-terus-melemah-simak-penjelasan-dua-ekonomini?page=all">https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/05/102243426/rupiah-terus-melemah-simak-penjelasan-dua-ekonomini?page=all</a>

						perdagangan kita harus bergerak untuk menekan defisit di sektor jasa dalam current account.		
34	Diplomasi perdagangan	2018	5-Jul-2018	KEIN	Jakarta	"Sebab Amerika adalah salah satu mitra dagang penting Indonesia sehingga diplomasi perdagangan kita ke Amerika harus kita perkuat."	Kompas	<a href="https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/05/102243426/rupiah-terus-melemah-simak-penjelasan-dua-ekonomini?page=all">https://ekonomi.kompas.com/read/2018/07/05/102243426/rupiah-terus-melemah-simak-penjelasan-dua-ekonomini?page=all</a>
35	Diplomasi ekonomi	2018	25-Jul-2018	Bappenas	Pusdiklat Kemlu	"Diplomasi ekonomi memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan nasional... Para diplomat Indonesia kedepannya perlu terus meningkatkan upaya penajaman diplomasi ekonomi, yang tentunya perlu didukung dengan anggaran."	Media Indonesia	<a href="https://mediaindonesia.com/read/detail/174166-bappenas-diplomasi-ekonomi-penting-dorong-pembangunan-nasional">https://mediaindonesia.com/read/detail/174166-bappenas-diplomasi-ekonomi-penting-dorong-pembangunan-nasional</a>
36	Diplomasi ekonomi	2018	13-Sep-2018	Kemlu	Jakarta	Dubes RI untuk Meksiko: Sesuai dengan amanat Nawacita Presiden Joko Widodo, untuk mencapai kemandirian ekonomi maka perwakilan RI di luar negeri mengutamakan kemajuan dalam bidang tourism, trade, and investment (TTI). Selain itu, kami mendorong kerja sama kemaritiman termasuk konektivitas maritim yang akan mendorong terwujudnya fasilitasi perdagangan kedua negara.	Bisnis	<a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20180913/15/838026/dubes-meksiko-diplomasi-ekonomi-adalah-kunci">https://kabar24.bisnis.com/read/20180913/15/838026/dubes-meksiko-diplomasi-ekonomi-adalah-kunci</a>
37	Diplomasi ekonomi	2018	4-Oct-2018	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	Bali	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)/Indonesia Eximbank menandatangani nota kesepahaman dengan Kementerian Luar Negeri RI untuk meningkatkan kerja sama di bidang diplomasi ekonomi.	Bisnis	<a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20180410/9/782487/indonesia-eximbank-kemenlu-mou-untuk-diplomasi-ekonomi">https://ekonomi.bisnis.com/read/20180410/9/782487/indonesia-eximbank-kemenlu-mou-untuk-diplomasi-ekonomi</a>
38	Diplomasi perdagangan	2018	7-Oct-2018	KEIN	Bursa Efek Indonesia, Jakarta	Untuk mendukung UMKM ekspor: "Selain memperkuat kredit, solusi kedua kata Arif, melalui diplomasi perdagangan, yang mana dua akses pasar harus dilakukan."	Tempo	<a href="https://bisnis.tempo.co/read/1257071/indef-indonesia-sedang-hadapi-masalah-kesenjangan-penghasilan/full&amp;view=ok">https://bisnis.tempo.co/read/1257071/indef-indonesia-sedang-hadapi-masalah-kesenjangan-penghasilan/full&amp;view=ok</a>
39	Diplomasi perdagangan	2018	20-Oct-2018	Kemlu	Jakarta	<u>Ke depannya, lanjut Retno, pemerintah akan</u>	CNBC Indonesia	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20181020145414-4-">https://www.cnbcindonesia.com/news/20181020145414-4-</a>

						<u>melanjutkan empat strategi prioritas bidang hubungan luar negeri, di antaranya diplomasi kemanusiaan, diplomasi perdagangan, juga masalah kemaritiman untuk menguatkan perundingan kelautan dan kemaritiman.</u>		<a href="https://www.medcom.id/internasional/asia/4KZ4a86B-diplomasi-ekonomi-indonesia-di-afrika-dinilai-sangat-sukses">38293/curhatan-menlu-retno-4-tahun-tangani-urusan-luar-negeri-ri</a>
40	Diplomasi ekonomi	2018	25-Sep-2018	Kemlu	Jakarta	"Diplomasi ekonomi kita tetap sejak awal memfasilitasi mereka yang ingin masuk ke Indonesia, sekaligus memperlebar eksansi potensi kita ke luar. Dan untuk Afrika, kita sekarang mengejar USD1,3 miliar tersebut,"	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/internasional/asia/4KZ4a86B-diplomasi-ekonomi-indonesia-di-afrika-dinilai-sangat-sukses">https://www.medcom.id/internasional/asia/4KZ4a86B-diplomasi-ekonomi-indonesia-di-afrika-dinilai-sangat-sukses</a>
41	Diplomasi ekonomi	2018	25-Oct-2018	Kemlu	Jakarta	Selain Afrika, Indonesia pun gencar melakukan diplomasi ekonomi dengan sejumlah negara. Retno bilang diplomasi berjalan dilihat dari berhasil masuknya hasil industri Indonesia ke sejumlah negara.	Kontan	<a href="https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-membidik-afrika-amerika-selatan-melalui-diplomasi-ekonomi">https://nasional.kontan.co.id/news/indonesia-membidik-afrika-amerika-selatan-melalui-diplomasi-ekonomi</a>
42	Diplomasi ekonomi	2018	25-Oct-2018	Kemlu	Jakarta	"Menurutnya setidaknya sudah ada tiga diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Afrika selama empat tahun pemerintahan Jokowi-JK"	Tribun	<a href="https://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/25/ini-keberhasilan-diplomasi-ekonomi-indonesia-ke-afrika-dalam-empat-tahun-pemerintahan-jokowi">https://www.tribunnews.com/nasional/2018/10/25/ini-keberhasilan-diplomasi-ekonomi-indonesia-ke-afrika-dalam-empat-tahun-pemerintahan-jokowi</a>
43	Diplomasi perdagangan	2018	4-Nov-2018	Pelaku/Asosiasi Usaha	Medan	Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dengan melakukan diplomasi perdagangan bersama pelaku usaha karet."	Bisnis	<a href="https://sumatra.bisnis.com/read/20181104/533/856432/krisis-bahan-baku-karet-gapindo-minta-pemerintah-turun-tangan">https://sumatra.bisnis.com/read/20181104/533/856432/krisis-bahan-baku-karet-gapindo-minta-pemerintah-turun-tangan</a>
44	Diplomasi ekonomi	2018	18-Dec-2018	Kemlu	Bandung	Pemerintah RI menjadikan diplomasi ekonomi sebagai salah satu fokus kebijakan luar negeri di Asia Selatan, Asia Tengah, dan Timur Tengah. Pemerintah kini menyasar pasar non-tradisional seperti India, Pakistan, juga negara-negara di Afrika dan Timur Tengah. "Selama ini mungkin kita puas bermain-main di pasar lama. Sekarang tidak lagi. Kita sudah jenuh melihat pasar-pasar tradisional yang ada, sekarang kita bisa lihat kesempatan yang lain,"	Republika	<a href="https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/12/18/pixw5k382-kedekatan-negara-islam-dinilai-belum-secara-ekonomi">https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/12/18/pixw5k382-kedekatan-negara-islam-dinilai-belum-secara-ekonomi</a>
45	Diplomasi ekonomi	2018	21-Dec-2018	Kemlu	Jakarta	Meski demikian, Tumpal menuturkan diplomasi	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/internasional/asia/ObzqVxgN-">https://www.medcom.id/internasional/asia/ObzqVxgN-</a>

						ekonomi tidak bisa disederhanakan menjadi kerja sama perdagangan saja, namun juga harus bisa menghasilkan sumber dana baru dan outbound investment.		<a href="#"><u>infrastruktur-afrika-jadi-incaran-indonesia-pada-2019</u></a>
46	Diplomasi perdagangan	2018	25-Dec-2018	Pelaku/Asosiasi Usaha	Jakarta	Tumanggor menjelaskan bahwa untuk penjualan CPO ini, balik lagi ke negara masing-masing, bagaimana kemampuan untuk melakukan diplomasi perdagangan dan bagaimana meyakinkan pembeli.	Kontan	<a href="https://nasional.kontan.co.id/news/aprobi-produksi-cpo-indonesia-45-juta-ton-malaysia-28-juta-ton">https://nasional.kontan.co.id/news/aprobi-produksi-cpo-indonesia-45-juta-ton-malaysia-28-juta-ton</a>
47	Diplomasi ekonomi	2018	23-Oct-2018	Kemlu	Jakarta	Dubes Indonesia untuk Suriname: Oleh karena itu, visi dan misi diarahkan untuk lebih mengembangkan diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Suriname.	Bisnis	<a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20180823/19/830689/d-supratikno-kita-ada-ikatan-historis-dengan-suriname">https://kabar24.bisnis.com/read/20180823/19/830689/d-supratikno-kita-ada-ikatan-historis-dengan-suriname</a>
48	Diplomasi ekonomi	2018	2-May-2018	Kemlu		"Prioritas utama tentu saja diplomasi ekonomi, sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden, tentu saja dikuatkan oleh Ibu Menlu (Retno LP Marsudi) dalam hal ini,"	Detik	<a href="https://news.detik.com/berita/d-4001439/jadi-dubes-afsel-salman-al-farisi-akan-kuatkan-diplomasi-ekonomi">https://news.detik.com/berita/d-4001439/jadi-dubes-afsel-salman-al-farisi-akan-kuatkan-diplomasi-ekonomi</a>
49	Diplomasi ekonomi	2019	9-Jan-2019	Kemlu	Jakarta	"Pelaksanaan diplomasi ekonomi yang kita lakukan pun melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti BUMN, perbankan dan swasta,"	Neraca	<a href="https://www.neraca.co.id/article/111482/kerja-sama-ekonomi-prioritas-kebijakan-luar-negeri">https://www.neraca.co.id/article/111482/kerja-sama-ekonomi-prioritas-kebijakan-luar-negeri</a>
50	Diplomasi perdagangan	2019	17-Jan-2019	Kemendag	Washington DC	Menteri Perdagangan RI Enggartiasto Lukita menyambut hubungan diplomatik antara Indonesia dan Amerika Serikat dengan mengawali kunjungan diplomasi perdagangan Indonesia tahun 2019 ke AS.	Antara	<a href="https://www.antaranews.com/berita/788677/mendag-sambut-70-tahun-hubungan-ri-as-dengan-diplomasi-perdagangan">https://www.antaranews.com/berita/788677/mendag-sambut-70-tahun-hubungan-ri-as-dengan-diplomasi-perdagangan</a>
51	Diplomasi ekonomi	2019	6-Feb-2019	Kemendag	Jakarta	Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita memastikan hubungan diplomasi ekonomi antara Indonesia dan Rusia berjalan baik. Aktivitas perdagangan kedua negara juga terus ditingkatkan.	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/ekonomi/globals/nN9MBj3N-hubungan-diplomasi-ekonomi-indonesia-rusia-semakin-baik">https://www.medcom.id/ekonomi/globals/nN9MBj3N-hubungan-diplomasi-ekonomi-indonesia-rusia-semakin-baik</a>
52	Diplomasi perdagangan	2019	28-Feb-2019	Kemenko Marves	Jakarta	"Di setiap zona kebun kelapa sawit akan kita bikin kilang pengolahan. Ini menjadi	Gatra	<a href="https://www.gatra.com/detail/news/394768-Luhut-Petani-Sawit-">https://www.gatra.com/detail/news/394768-Luhut-Petani-Sawit-</a>

						bagian dari stabilitas harga. Lalu untuk urusan keluar, diplomasi kita opensip. Kita ini negara besar, enggak boleh diatur-atur apalagi didikte orang,		<a href="#">Itu-Pahlawan-Eksport</a>
53	Diplomasi ekonomi	2019	22-Mar-2019	Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemparekraf)	Jakarta	"Saya ingin melihat ada mahasiswa di sini menjadi pebisnis muda Indonesia di tahun mendatang,"	Kontan	<a href="https://peluangusaha.kontan.co.id/news/salah-satu-bentuk-diplomasi-ekonomi-adalah-lewat-inovasi-digital">https://peluangusaha.kontan.co.id/news/salah-satu-bentuk-diplomasi-ekonomi-adalah-lewat-inovasi-digital</a>
54	Diplomasi ekonomi	2019	22-Mar-2019	Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)	Jakarta	"Diplomat adalah garda depan untuk penetrasi pasar ke negara sahabat dan menarik masuk investasi ke Indonesia, ini adalah inti Diplomasi Ekonomi"	Bisnis	<a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20180322/9/752324/ini-alasan-para-diplomat-wajib-kuasai-diplomasi-ekonomi">https://ekonomi.bisnis.com/read/20180322/9/752324/ini-alasan-para-diplomat-wajib-kuasai-diplomasi-ekonomi</a>
55	Diplomasi ekonomi	2019	30-Mar-2019	Presiden Joko Widodo	Jakarta	"Kekuatan kita sebagai negara muslim ini bisa jadi modal besar dalam upaya diplomasi. Terutama dalam upaya memperkenalkan produk dari negara kita ke negara lain,"	Liputan 6	<a href="https://www.liputan6.com/global/read/3930124/jokowi-indonesia-negara-muslim-terbesar-modal-utama-diplomasi-internasional">https://www.liputan6.com/global/read/3930124/jokowi-indonesia-negara-muslim-terbesar-modal-utama-diplomasi-internasional</a>
56	Diplomasi perdagangan	2019	31-Mar-2019	Kemendag		Kawasan negara di Benua Afrika juga turut menjadi fokus diplomasi perdagangan dalam membuka pasar baru industri tekstil Tanah Air. Tiga negara di antaranya Tunisia, Maroko, dan Mozambik telah bersepakat untuk menerima pasokan produk TPT Indonesia dalam membuka keran ekspor.	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/GNI2Vigk-meningkatkan-daya-saing-industri-teksil">https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/GNI2Vigk-meningkatkan-daya-saing-industri-teksil</a>
57	Diplomasi ekonomi	2019	31-Mar-2019	DPR	Jakarta	Dalam diplomasi ekonomi, kata Charles, Indonesia di bawah Presiden Jokowi juga menorehkan pencapaian yang mengagumkan dan memberi kontribusi bagi perekonomian negara.	Merdeka	<a href="https://www.merdeka.com/politik/politikus-pdip-sindir-prabowo-diplomasi-hard-power-sudah-ketinggalan-zaman.html">https://www.merdeka.com/politik/politikus-pdip-sindir-prabowo-diplomasi-hard-power-sudah-ketinggalan-zaman.html</a>
58	Diplomasi perdagangan	2019	14-May-2019	Kemendag	Santiago	"Keberhasilan Indonesia dalam mengupayakan persetujuan terhadap proposal yang diusung membuktikan efektivitas diplomasi perdagangan Indonesia. Tidak mudah mendorong inisiatif yang harus disetujui seluruh anggota Ekonomi,	Kastara	<a href="https://kastara.id/14/05/2019/tiga-inisiatif-indonesia-disetujui-di-forum-apec-2019/">https://kastara.id/14/05/2019/tiga-inisiatif-indonesia-disetujui-di-forum-apec-2019/</a>

						mengingat terdapatnya perbedaan prioritas dan kepentingan masing-masing Ekonomi terhadap isu-isu yang diusulkan,"		
59	Diplomasi ekonomi	2019	13-Jul-2019	Kemlu	Addis Ababa	"Menteri Luar Negeri Retno Marsudi juga telah menekankan agar diplomasi ekonomi Indonesia harus memberikan hasil yang konkret dan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemajuan bangsa dan negara kita."	Antara	<a href="https://www.antaranews.com/berita/954627/indonesia-tingkatkan-diplomasi-ekonomi-di-ethiopia">https://www.antaranews.com/berita/954627/indonesia-tingkatkan-diplomasi-ekonomi-di-ethiopia</a>
60	Diplomasi perdagangan	2019	13-Jul-2019	Kementerian Pertanian (Kemen-tan)	Yogyakarta	"Butuh penguatan market intelligence dan diplomasi perdagangan internasional untuk bisa mendobrak pasar dunia. Harus lebih cerdik dan progresif, jangan terlalu konservatif."	Tribun	<a href="https://iatim.tribunnews.com/2019/07/13/komoditas-hortikultura-indonesia-diekspor-ke-113-negara-dirjen-hortikultura-kenalkan-sartika">https://iatim.tribunnews.com/2019/07/13/komoditas-hortikultura-indonesia-diekspor-ke-113-negara-dirjen-hortikultura-kenalkan-sartika</a>
61	Diplomasi perdagangan	2019	16-Jul-2019	Pelaku/ Asosiasi Usaha	Jakarta	Dia menilai ada beberapa faktor yang akan mendorong pertumbuhan tersebut yakni percepatan implementasi perjanjian dagang komprehensif dengan Uni Eropa dan diplomasi perdagangan dengan negara-negara pemasok kapas seperti Brazil dan Amerika Serikat.	Bisnis	<a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20190716/257/1125073/industri-tekstil-bisa-dongkrak-kinerja-ekspor-nasional">https://ekonomi.bisnis.com/read/20190716/257/1125073/industri-tekstil-bisa-dongkrak-kinerja-ekspor-nasional</a>
62	Diplomasi perdagangan	2019	19-Jul-2019	Kementerian	Jakarta	Guna menggenjot kemudahan dan percepatan ekspor, maka diplomasi perdagangan yang kuat dan berbagai kemudahan-kemudahan yang diberikan pemerintah, dia optimistis ekspor ke Singapura ke depannya akan semakin meningkat.	Republika	<a href="https://republika.co.id/berita/puv10k383/risingapura-kerja-sama-ekspor-hortikultura">https://republika.co.id/berita/puv10k383/risingapura-kerja-sama-ekspor-hortikultura</a>
63	Diplomasi perdagangan	2019	7-Aug-2019	Bappenas	Jakarta	Sedikit banyak berpengaruh tetapi pemerintah melakukan diplomasi perdagangan totally. Dari sisi perdagangan ada semacam langkah menomorsatukan kepentingan suatu negara dalam hal ini Indonesia,"	Liputan 6	<a href="https://www.liputan6.com/bisnis/read/3612574/ri-cari-cara-hindari-sanksi-usd-350-juta-dari-as">https://www.liputan6.com/bisnis/read/3612574/ri-cari-cara-hindari-sanksi-usd-350-juta-dari-as</a>
64	Diplomasi ekonomi	2019	14-Aug-2019	Kemlu	Jakarta	Direktur Sekolah Staf dan Pimpinan Luar Negeri, Pusat Pendidikan dan Latihan Kemlu June Kuncoro Hadiningrat menuturkan,	Sindo News	<a href="https://ekbis.sindonews.com/berita/1429756/34/kemenlu-genjot-diplomasi-ekonomi-lewat-kuliner-indonesia">https://ekbis.sindonews.com/berita/1429756/34/kemenlu-genjot-diplomasi-ekonomi-lewat-kuliner-indonesia</a>

						diskusi ini merupakan wujud nyata upaya pemerintah dalam mengedepankan diplomasi ekonomi. Khususnya potensi bumbu instan, dalam mendukung masakan Indonesia sebagai salah satu keunggulan diplomasi Indonesia.		
65	Diplomasi ekonomi	2019	14-Aug-2019	Presiden Joko Widodo	Jakarta	Secara jumlah bisa sama tapi ada kementerian yang dilebur. Misal menlu juga handle diplomasi ekonomi."	CNBC Indonesia	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20190819212749-4-93164/kementerian-investasi-diyakini-tak-jamin-genjot-investasi">https://www.cnbcindonesia.com/news/20190819212749-4-93164/kementerian-investasi-diyakini-tak-jamin-genjot-investasi</a>
66	Diplomasi ekonomi	2019	15-Aug-2019	Presiden Joko Widodo		"Secara jumlah bisa sama, tapi ada kementerian yang dilebur. Misal Menlu juga handle diplomasi ekonomi. Ada juga Kementerian Investasi, akan konsentrasi di digital dan kreatif."	Merdeka	<a href="https://www.merdeka.com/uang/kein-sebut-kementerian-investasi-sudah-jadi-praktik-umum-negara-maju-dunia.html">https://www.merdeka.com/uang/kein-sebut-kementerian-investasi-sudah-jadi-praktik-umum-negara-maju-dunia.html</a>
67	Diplomasi perdagangan	2019	15-Aug-2019	DPR	Jakarta	Anggota Komisi I DPR Supiadin percaya dengan wacana pembentukan Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dan Perdagangan Internasional. Ia menyebut diplomasi perdagangan bakal lebih kuat di bawah kendali Kemlu.	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/nasional/politik/ZkervPZK-diplomasi-perdagangan-dipercaya-kuat-di-bawah-kemenlu">https://www.medcom.id/nasional/politik/ZkervPZK-diplomasi-perdagangan-dipercaya-kuat-di-bawah-kemenlu</a>
68	Diplomasi ekonomi	2019	21-Aug-2019	Kemlu	Bali	"Berbeda dari masa lalu, Kementerian Luar Negeri kini tidak hanya menangani politik luar negeri, namun juga diplomasi ekonomi. Ketika kita melakukan diplomasi ekonomi, Kemlu juga melibatkan kementerian teknis dan bahkan BUMN dalam suatu misi yang komprehensif,"	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/internasional/asia/akWVPEBb-pasar-afrika-jadi-prioritas-kebijakan-diplomasi-ekonomi-ri">https://www.medcom.id/internasional/asia/akWVPEBb-pasar-afrika-jadi-prioritas-kebijakan-diplomasi-ekonomi-ri</a>
69	Diplomasi ekonomi	2019	22-Aug-2019	Kemlu	Pertemuan Dubes RI untuk Yunani dengan Wamenlu Yunani	Duta Besar RI untuk Yunani, Ferry Adamhar melakukan pertemuan dengan Wakil Menteri Luar Negeri Yunani bidang Diplomasi Ekonomi dan Keterbukaan, Konstantinos Fragkogiannis pada Kamis, 22 Agustus 2019.	Tempo	<a href="https://dunia.tempo.co/read/1239822/yunani-indonesia-sepakat-tingkatkan-kerja-sama/full&amp;view=ok">https://dunia.tempo.co/read/1239822/yunani-indonesia-sepakat-tingkatkan-kerja-sama/full&amp;view=ok</a>
70	Diplomasi ekonomi	2019	10-Sep-2019	Kemlu	Jakarta	Retno menyebut diplomasi digital merupakan salah satu upaya untuk mendukung diplomasi di bidang ekonomi. Retno berharap	Detik	<a href="https://news.detik.com/berita/d-4699957/menlu-bicara-pentingnya-diplomasi-digital-untuk-kerja-sama-ekonomi">https://news.detik.com/berita/d-4699957/menlu-bicara-pentingnya-diplomasi-digital-untuk-kerja-sama-ekonomi</a>

						teknologi informasi dapat menjalin komunikasi antarnegara untuk melakukan kerja sama di bidang ekonomi.		
71	Diplomasi ekonomi	2019	11-Sep-2019	Kemlu	Jakarta	Sekjen Kemlu Mayerfas: "Diplomasi ekonomi dan maritim perlindungan WNI dan pelayanan konsuler di perwakilan RI di luar negeri pada program pelaksanaan diplomasi dan kerja sama internasional dan perwakilan RI di luar negeri,"	Kompas	<a href="https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/15535861/kemenlu-minta-tambahan-anggaran-rp-356-miliar-pada-tahun-2020">https://nasional.kompas.com/read/2019/09/11/15535861/kemenlu-minta-tambahan-anggaran-rp-356-miliar-pada-tahun-2020</a>
72	Diplomasi ekonomi	2019	14-Sep-2019	Kemlu	Bandung	"Kenapa ekonomi kreatif? Ini tugas diplomasi sekarang, yang mendapat prioritas diplomasi ekonomi. Salah satu kegiatan kita adalah ekonomi kreatif karena kreativitas yang bisa membuat kita bersaing dengan bangsa-bangsa lain di seluruh dunia."	Tribun	<a href="https://iabar.tribunnews.com/2017/09/14/dorong-diplomasi-ekonomi-kreatif-kemenlu-undang-sutradara-hollywood-ke-pembekalan-para-diplomat">https://iabar.tribunnews.com/2017/09/14/dorong-diplomasi-ekonomi-kreatif-kemenlu-undang-sutradara-hollywood-ke-pembekalan-para-diplomat</a>
73	Diplomasi ekonomi	2019	17-Sep-2019	Kemlu		Meningkatkan perdagangan, dukung IEUCEPA, dan undang perusahaan Hongaria buat investasi	Kompas	<a href="https://internasional.kompas.com/read/2019/09/18/15111751/tingkatkan-hubungan-diplomatik-indonesia-jalin-kerja-sama-pendidikan?page=all">https://internasional.kompas.com/read/2019/09/18/15111751/tingkatkan-hubungan-diplomatik-indonesia-jalin-kerja-sama-pendidikan?page=all</a>
74	Diplomasi ekonomi	2019	19-Sep-2019	Kemlu	Johor Bahru	Malaysia menjadi salah satu mitra dagang utama Indonesia dengan nilai perdagangan mencapai USD17,87 miliar. Sebagai negara tetangga yang sangat dekat dengan Indonesia dan memiliki banyak kesamaan budaya, Malaysia masih menyimpan banyak potensi sebagai pasar produk trade, tourism, and investment.	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/Wb7Lm00k-indonesia-malaysia-perkuat-diplomasi-ekonomi">https://www.medcom.id/ekonomi/mikro/Wb7Lm00k-indonesia-malaysia-perkuat-diplomasi-ekonomi</a>
75	Diplomasi ekonomi	2019	23-Sep-2019	Kemlu	New York	"Terlihat lebih intensifnya saling kunjung, di antaranya saling kunjung antara private sector. Sekarang memang ini yang kita lakukan karena fokus kita sekarang adalah bagaimana upaya memperkuat diplomasi ekonomi,"	Detik	<a href="https://news.detik.com/berita/d-4718796/upaya-menlu-perkuat-diplomasi-ekonomi-saat-rangkaian-sidang-umum-pbb">https://news.detik.com/berita/d-4718796/upaya-menlu-perkuat-diplomasi-ekonomi-saat-rangkaian-sidang-umum-pbb</a>
76	Diplomasi ekonomi	2019	25-Sep-2019	Bappenas	Jakarta	Deputi Bidang Ekonomi, Bambang Prijambodo: "Saya akui Indonesia ini tertinggal jauh dibandingkan dengan negara lain dimana sudah	Gatra	<a href="https://www.gatra.com/detail/news/447091/ekonomi/indonesia-tertinggal-jauh-dari-segi-diplomasi-ekonomi">https://www.gatra.com/detail/news/447091/ekonomi/indonesia-tertinggal-jauh-dari-segi-diplomasi-ekonomi</a>

						banyak yang menjalin kerja sama dengan European Union (EU) untuk memperkuat sektor di masing-masing negara tersebut," Indonesia tertinggal jauh dari segi diplomasi ekonomi dan harus diperbaiki sistem internal dalam kementerian dan lembaga.		
77	Diplomasi ekonomi	2019	2-Oct-2019	Kemendag	Malang	Enggar mengungkapkan ada perbedaan karakteristik diplomasi politik dengan negosiasi dagang. Menteri Luar Negeri menurutnya lebih menangani tugas diplomasi ekonomi. Namun, diplomasi tersebut tidak secara spesifik mencakup negosiasi perdagangan. Sehingga apabila nanti digabungkan, akan ada tantangan tersendiri."	Katadata	<a href="https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a4e6188add/menteri-enggar-menilai-sulit-peleburan-kemendag-ke-dalam-kemenlu">https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a4e6188add/menteri-enggar-menilai-sulit-peleburan-kemendag-ke-dalam-kemenlu</a>
78	Diplomasi ekonomi	2019	15-Oct-2019	Kementerian Koordinator bidang Ekonomi (Kemenko Ekonomi)	Jakarta	kebijakan perdagangan untuk mendorong ekspor dan menciptakan pertumbuhan ekonomi berkualitas di era industri 4.0 melalui peningkatan produk ekspor dengan terlibat sebagai bagian Global Value Chain (GVC), simplifikasi prosedural untuk menekan biaya dan waktu, efisiensi logistik, serta diplomasi ekonomi dan peningkatan pasar.	Merdeka	<a href="https://www.merdeka.com/uang/tujuh-langkah-pemerintah-jaga-iklim-usaha-investasi-dan-daya-saing-indonesia.html">https://www.merdeka.com/uang/tujuh-langkah-pemerintah-jaga-iklim-usaha-investasi-dan-daya-saing-indonesia.html</a>
79	Diplomasi ekonomi	2019	17-Oct-2019	Kemlu	Jakarta	"Makanan adalah identitas nasional suatu bangsa. Gastrodiplomacy akan mendukung diplomasi ekonomi Indonesia."	Tempo	<a href="https://dunia.tempo.co/read/1261087/kementerian-luar-negeri-promosi-makanan-lokal-di-luar-negeri/full&amp;view=ok">https://dunia.tempo.co/read/1261087/kementerian-luar-negeri-promosi-makanan-lokal-di-luar-negeri/full&amp;view=ok</a>
80	Diplomasi perdagangan	2019	17-Oct-2019	Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN)	Jakarta	"Kebijakan perdagangan yang memihak kepentingan nasional, seperti dukungan terhadap produksi dalam negeri harus menjadi fokus ke depan melalui diplomasi perdagangan, baik yang bersifat tarif maupun non tarif,"	Bisnis	<a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20191017/9/1160171/kein-butuh-langkah-ekstrim-tuntaskan-defisit-neraca-dagang">https://ekonomi.bisnis.com/read/20191017/9/1160171/kein-butuh-langkah-ekstrim-tuntaskan-defisit-neraca-dagang</a>
81	Diplomasi perdagangan	2019	21-Oct-2019	Kemendag	Jakarta	Dirjen PEN juga menegaskan, capaian ini tak lepas dari kerja keras segenap perangkat	Kontan	<a href="https://pressrelease.kontan.co.id/release/membanggakan-tei-ke-34-tahun-2019-sukses-bukukan">https://pressrelease.kontan.co.id/release/membanggakan-tei-ke-34-tahun-2019-sukses-bukukan</a>

					Kementerian Perdagangan, baik di dalam negeri sebagai penggerak ekonomi nasional, maupun para perwakilan perdagangan di luar negeri yang telah melaksanakan diplomasi perdagangan dengan sangat baik.		<a href="#">usd-930-miliar</a>
82	Diplomasi perdagangan	2019	23-Oct-2019	Kemlu	Jakarta	Perlu perbaikan dalam negeri untuk diplomasi sawit	Antara <a href="https://www.antaranews.com/berita/1128419/diplomasi-sawit-sulit-diplomat-sebut-perlu-perbaikan-dalam-negeri">https://www.antaranews.com/berita/1128419/diplomasi-sawit-sulit-diplomat-sebut-perlu-perbaikan-dalam-negeri</a>
83	Diplomasi ekonomi	2019	23-Oct-2019	Kemlu			Antara <a href="https://www.antaranews.com/berita/1128419/diplomasi-sawit-sulit-diplomat-sebut-perlu-perbaikan-dalam-negeri">https://www.antaranews.com/berita/1128419/diplomasi-sawit-sulit-diplomat-sebut-perlu-perbaikan-dalam-negeri</a>
84	Diplomasi ekonomi	2019	25-Oct-2019	Presiden Joko Widodo	Jakarta	"Tadi pagi saya sampaikan tugas khusus diplomasi ekonomi, terutama yang berkaitan dengan perjanjian perdagangan dan investasi,"	Kompas <a href="https://nasional.kompas.com/read/2019/10/25/14244031/mahen-dra-siregar-wamenlu-pilihan-jokowi-yang-diberi-tugas-diplomasi-ekonomi?page=all">https://nasional.kompas.com/read/2019/10/25/14244031/mahen-dra-siregar-wamenlu-pilihan-jokowi-yang-diberi-tugas-diplomasi-ekonomi?page=all</a>
85	Diplomasi ekonomi	2019	28-Oct-2019	Kemlu		"Arahan Menlu jelas, lugas, dan tegas untuk fokus diplomasi ekonomi ke Afrika berdasarkan visi misi Presiden Joko Widodo."	Antara <a href="https://www.antaranews.com/berita/1135611/empat-strategi-diplomasi-ekonomi-indonesia-di-afrika">https://www.antaranews.com/berita/1135611/empat-strategi-diplomasi-ekonomi-indonesia-di-afrika</a>
86	Diplomasi ekonomi	2019	31-Oct-2019	Kemlu		"Kita sampaikan prioritas formula 4+1. Yang pertama penguatan diplomasi ekonomi, kedua diplomasi perlindungan, ketiga diplomasi kedaulatan dan kebangsaan, keempat kontribusi dan kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia. Dan kelima infrastruktur diplomasi. Infrastruktur diplomasi ini terkait lebih ke dalam mengenai reformasi birokrasi, untuk mendukung empat hal tersebut,"	Detik <a href="https://news.detik.com/berita/d-4766690/rapat-di-kemenko-polhukam-menlu-jabarkan-prioritas-politik-luar-negeri-ri">https://news.detik.com/berita/d-4766690/rapat-di-kemenko-polhukam-menlu-jabarkan-prioritas-politik-luar-negeri-ri</a>
87	Diplomasi ekonomi	2019	31-Oct-2019	Kemlu	Bandung	Ben Perkasa Drajt: Diplomasi ekonomi akan menjadi prioritas pertama Kementerian Luar Negeri pada era Kabinet Indonesia Maju. Hal itu untuk menggenjot ekspor Indonesia seperti yang dilakukan pemerintah Vietnam sehingga neraca perdagangannya menjadi positif.	Pikiran Rakyat <a href="https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/p-01322361/tingkatkan-eksport-indonesia-prioritaskan-diplomasi-ekonomi">https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/p-01322361/tingkatkan-eksport-indonesia-prioritaskan-diplomasi-ekonomi</a>

88	Diplomasi perdagangan	2019	4-Nov-2019	Kemenko Ekonomi	Jakarta	Diplomasi perdagangan Indonesia dan India memasuki babak baru khususnya dalam perdagangan sawit dan gula. Kedua negara sepakat 'saling tukar' kepentingan, Indonesia punya kepentingan produk sawitnya masuk India tetapi bisa bersaing dengan sawit Malaysia, sedangkan India ingin gula mentahnya dibeli oleh Indonesia.	CNBC Indonesia	<a href="https://www.cnbcindonesia.com/news/20191104114545-4-112396/lokowi-modi-deal-ri-rela-impor-gula-dan-beras-dari-india">https://www.cnbcindonesia.com/news/20191104114545-4-112396/lokowi-modi-deal-ri-rela-impor-gula-dan-beras-dari-india</a>
89	Diplomasi ekonomi	2019	6-Nov-2019	Kemlu	Kupang	Kementerian Luar Negeri RI bekerja sama dengan Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam menggelar sosialisasi mengenai diplomasi ekonomi di kawasan Asia Pasifik dan Afrika (Aspasaf) dan juga kisah sukses penyelenggaraan Indonesia-Africa Infrastructure Dialogue 2019.	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/internasional/asia/GbmXd34N-kemenlu-sosialisasikan-diplomasi-ekonomi-aspasaf-di-undana">https://www.medcom.id/internasional/asia/GbmXd34N-kemenlu-sosialisasikan-diplomasi-ekonomi-aspasaf-di-undana</a>
90	Diplomasi ekonomi	2019	12-Nov-2019	Kemlu	Rapat Komisi I DPR	Retno juga menguraikan upaya yang akan dilakukan Menlu mengenai diplomasi ekonomi, yakni, penguatan pasar domestik, penguatan pasar tradisional dan pasar non tradisional, penguatan perundingan perdagangan dan investasi, promosi perdagangan dan investasi terpadu, menjaga kepentingan strategis ekonomi Indonesia dan mendorong ekonomi 4.0.	Sindo News	<a href="https://nasional.sindonews.com/berita/1458035/12/di-hadapan-komisi-i-dpr-menlu-beberkan-soal-diplomasi-ekonomi">https://nasional.sindonews.com/berita/1458035/12/di-hadapan-komisi-i-dpr-menlu-beberkan-soal-diplomasi-ekonomi</a>
91	Diplomasi ekonomi	2019	12-Nov-2019	DPR	Rapat Komisi I DPR	Menurut Hasanuddin, ada banyak bidang strategis yang bisa dikembangkan untuk mendukung diplomasi ekonomi, diantaranya produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), infrastruktur, pariwisata, hingga hasil pertanian dari wilayah tropis. "Ini potensinya sangat besar, tinggal bagaimana upaya-upaya yang komprehensif perlu dilakukan,"	Parlementaria Kini	<a href="http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26459/t/Tingkatkan+Diplomasi+Ekonomi+Melalui+Pasar+Domestik">http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/26459/t/Tingkatkan+Diplomasi+Ekonomi+Melalui+Pasar+Domestik</a>

92	Diplomasi ekonomi	2019	13-Nov-2019	Kemlu	Acara bertajuk "Curah Gagasan: Diplomasi Lingkungan Hidup Indonesia"	"Namun demikian, hal ini tidak berarti diplomasi lingkungan hidup kemudian menjadi nomor dua. Bahkan sebaliknya, diplomasi lingkungan hidup menjadi salah satu pendukung diplomasi ekonomi,"	Berita Satu	<a href="https://www.beritasatu.com/jeany-aipassa/dunia/585334/kemlu-arahkan-diplomasi-lingkungan-dukung-diplomasi-ekonomi">https://www.beritasatu.com/jeany-aipassa/dunia/585334/kemlu-arahkan-diplomasi-lingkungan-dukung-diplomasi-ekonomi</a>
93	Diplomasi ekonomi	2019	14-Nov-2019	Kemlu		"Dengan misi presiden menciptakan lapangan kerja, berarti lapangan kerja yang sudah ada juga harus diamankan, jangan sampai kita menciptakan yang baru yang lama hilang. Maka kewajiban kita untuk mengamankan lapangan kerja yang 16 juta sampai 16,5 juta yang bekerja di lapangan sawit dengan mengawal produksinya agar tidak mendapatkan perlakuan diskriminatif dan lain-lain."	Okezone	<a href="https://economy.okezone.com/read/2019/11/14/320/2129941/atai-diskriminasi-minyak-sawit-menlu-retno-beberkan-langkah-diplomasi?page=1">https://economy.okezone.com/read/2019/11/14/320/2129941/atai-diskriminasi-minyak-sawit-menlu-retno-beberkan-langkah-diplomasi?page=1</a>
94	Diplomasi ekonomi	2019	19-Nov-2019	KADIN		Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Hubungan Internasional Shinta W. Kamdani merespons positif penunjukan Wakil Menteri Luar Negeri yang ditugaskan khusus untuk melakukan diplomasi ekonomi.	Kontan	<a href="https://nasional.kontan.co.id/news/kolaborasi-kemenlu-kemedag-dalam-diplomasi-perdagangan-direspons-positif-pengusaha">https://nasional.kontan.co.id/news/kolaborasi-kemenlu-kemedag-dalam-diplomasi-perdagangan-direspons-positif-pengusaha</a>
95	Diplomasi ekonomi	2019	19-Nov-2019	Kemlu		"Diplomasi ekonomi memang bukan prioritas utama yang ditetapkan di Kemlu... mendukung adanya perundungan dagang, ekspansi ke pasar non tradisional, serta memperkokoh pasar tradisional dan sebagainya... Pak Wamenlu mendapatkan tugas khusus untuk diplomasi khusus ekonomi ini, bekerja sama dengan Kementerian Perdagangan dan lain-lain."	Kontan	<a href="https://nasional.kontan.co.id/news/begini-pembagian-tugas-kemendag-dan-kemenlu-dalam-diplomasi-perdagangan">https://nasional.kontan.co.id/news/begini-pembagian-tugas-kemendag-dan-kemenlu-dalam-diplomasi-perdagangan</a>
96	Diplomasi perdagangan	2019	19-Nov-2019	Kemendag	Jakarta	Agus mengatakan Kemlu nantinya fokus pada diplomasi perdagangan, sementara pelaksanaan teknis –seperti menentukan kebijakan, akan di bawah kewenangan Kemendag.	Tempo	<a href="https://bisnis.tempo.co/read/1274238/kemendag-14-perjanjian-dagang-akan-selesai-pada-tahun-depan/full&amp;view=ok">https://bisnis.tempo.co/read/1274238/kemendag-14-perjanjian-dagang-akan-selesai-pada-tahun-depan/full&amp;view=ok</a>

						"Kami memastikan tidak akan ada overlapping. Jadi semacam tandem,"		
97	Diplomasi perdagangan	2019	19-Nov-2019	Kemendag	Jakarta	Menteri Perdagangan Agus Suparmanto menilai, meskipun diplomasi perdagangan ini turut ditangani oleh Wamenlu, pembagian tugas antara Kemlu dengan Kementerian Perdagangan tak akan tumpang tindih.	Kontan	<a href="https://nasional.kontan.co.id/news/begini-pembagian-tugas-kemendag-dan-kemenlu-dalam-diplomasi-perdagangan">https://nasional.kontan.co.id/news/begini-pembagian-tugas-kemendag-dan-kemenlu-dalam-diplomasi-perdagangan</a>
98	Diplomasi perdagangan	2019	19-Nov-2019	KADIN	Jakarta	Kepala Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan P. Roeslani berharap Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Perdagangan akan berperan aktif dalam memberikan masukan dan diplomasi perdagangan.	Katadata	<a href="https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a4c559c4a1/perdagang-berlanjut-ekspor-5-komoditas-berpeluang-meningkat-ke-as">https://katadata.co.id/ekarina/berita/5e9a4c559c4a1/perdagang-berlanjut-ekspor-5-komoditas-berpeluang-meningkat-ke-as</a>
99	Diplomasi ekonomi	2019	25-Nov-2019	Kemlu	Jakarta	"Kementerian Luar Negeri mendorong ekosistem startup atau perusahaan rintisan dalam negeri untuk menjadi penyokong diplomasi ekonomi, yang merupakan salah satu prioritas kebijakan luar negeri Indonesia."	Antara	<a href="https://www.antaranews.com/berita/1179183/kemlu-dorong-ekosistem-startup-untuk-diplomasi-ekonomi">https://www.antaranews.com/berita/1179183/kemlu-dorong-ekosistem-startup-untuk-diplomasi-ekonomi</a>
100	Diplomasi ekonomi	2019	27-Nov-2019	Kemlu	Kupang	"Kunjungan peserta Sesparlu ke daerah adalah untuk mengenal kekayaan budaya dan memperkuat diplomasi ekonomi demikian disampaikan Direktur Sesparlu, June Kuncoro Hadiningrat yang memimpin rombongan.	Sindo News	<a href="https://nasional.sindonews.com/berita/1463113/15/kemenlu-dorong-diplomasi-ekonomi-kembangkan-potensi-titi-kabupaten-manggarai">https://nasional.sindonews.com/berita/1463113/15/kemenlu-dorong-diplomasi-ekonomi-kembangkan-potensi-titi-kabupaten-manggarai</a>
101	Diplomasi ekonomi	2019	30-Nov-2019	Kemlu	Jakarta	"(Strategi diplomasi ekonomi) ke depan akan lebih strategis dan luas karena kondisi perekonomian global terus berubah,"	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/internasional/asia/8kogWwYk-wamenlu-beri-gambaran-strategi-diplomasi-ekonomi-indonesia">https://www.medcom.id/internasional/asia/8kogWwYk-wamenlu-beri-gambaran-strategi-diplomasi-ekonomi-indonesia</a>
102	Diplomasi perdagangan	2019	4-Dec-2019	Kementan	Jakarta	"Tentu ada diplomasi perdagangan pertanian harus dimainkan dan Insya Allah saya sangat yakin perintah Presiden akan saya laksanakan dengan baik,"	Okezone	<a href="https://economy.okezone.com/read/2019/12/04/320/2138053/ior-owi-minta-kementan-ekspor-beras-tahun-depan">https://economy.okezone.com/read/2019/12/04/320/2138053/ior-owi-minta-kementan-ekspor-beras-tahun-depan</a>
103	Diplomasi perdagangan	2019	14-Dec-2019	Pelaku/Asosiasi	Jakarta	Muis berharap, pemerintah dapat memperluas kerja sama dan diplomasi perdagangan dengan	Republika	<a href="https://republika.co.id/berita/q2g-8c6370/pengusaha-tuna-harap-pemerintah-hapus-hambatan-">https://republika.co.id/berita/q2g-8c6370/pengusaha-tuna-harap-pemerintah-hapus-hambatan-</a>

				Usaha		negara-negara di Eropa maupun Amerika untuk memudahkan ekspor perikanan ke kawasan sana.		<u>dagang</u>
104	Diplomasi perdagangan	2019	9-Aug-2019	Kemenko Ekonomi	Jakarta	Sementara untuk isu dan permasalahan dibahas terkait, strategis komoditas kelapa sawit, pengembangan e-commerce, diplomasi perdagangan untuk mendorong eksport.	Tribun	<a href="https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/10/pemerintah-gandeng-dekan-dan-dosen-bentuk-forekon">https://www.tribunnews.com/nasional/2019/08/10/pemerintah-gandeng-dekan-dan-dosen-bentuk-forekon</a>
117	Diplomasi ekonomi	2019	20-Jan-2019	Kemlu	Jakarta	Namun, menurut Tumpal, diplomasi ekonomi tidak boleh disederhanakan untuk kerja sama perdagangan saja. Diplomasi ekonomi juga harus dapat menghasilkan sumber pendanaan baru dan investasi keluar.	Antara	<a href="https://www.antaranews.com/brita/789637/mata-diplomasi-ekonomi-indonesia-terus-tertuju-ke-afrika">https://www.antaranews.com/brita/789637/mata-diplomasi-ekonomi-indonesia-terus-tertuju-ke-afrika</a>
128	Diplomasi ekonomi	2019	23-Feb-2019	Kemlu	Makassar	Dalam kuliah umum tersebut, Menlu menjelaskan tentang pelaksanaan politik luar negeri Indonesia yang berkaitan dengan jiwa masyarakat Makassar, yaitu diplomasi maritim, diplomasi ekonomi, dan diplomasi kemanusiaan.	Republika	<a href="https://republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/19/02/24/pnfu3x374-falsafah-makassar-warnai-diplomasi-ri">https://republika.co.id/berita/pendidikan/dunia-kampus/19/02/24/pnfu3x374-falsafah-makassar-warnai-diplomasi-ri</a>
105	Diplomasi ekonomi	2020	7-Jan-2020	Kemlu	Jakarta	"Menlu Retno Marsudi akan menandatangani kesepakatan kerja sama dengan Pak Rosan (Ketua Kadin) untuk bersama-sama menjalankan dan membangun sinergi mencapai apa yang menjadi salah satu prioritas pemerintah dan perwakilan RI di luar negeri yaitu diplomasi ekonomi,"	Kompas	<a href="https://money.kompas.com/read/2020/01/08/112900026/kemenu-gandeng-kadin-untuk-perkuat-diplomasi-ekonomi">https://money.kompas.com/read/2020/01/08/112900026/kemenu-gandeng-kadin-untuk-perkuat-diplomasi-ekonomi</a>
106	Diplomasi ekonomi	2020	8-Jan-2020	Kemlu	Jakarta	Dalam lima tahun ke depan, diplomasi ekonomi akan diperkuat melalui penugasan khusus yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar serta penugasan konkret kepada perwakilan RI di luar negeri.	Antara	<a href="https://www.antaranews.com/brita/1240688/lima-tahun-ke-depan-diplomasi-ekonomi-diperkuat">https://www.antaranews.com/brita/1240688/lima-tahun-ke-depan-diplomasi-ekonomi-diperkuat</a>
107	Diplomasi ekonomi	2020	8-Jan-2020	Kemlu	Jakarta	SPK tentang Kerja Sama Digital bertujuan untuk	Warta Ekonomi	<a href="https://www.wartaekonomi.co.id/read265721/indonesia-australia-">https://www.wartaekonomi.co.id/read265721/indonesia-australia-</a>

						mempererat kerja sama, konsultasi, dan kolaborasi antara Indonesia dan Australia dalam pengembangan diplomasi digital yang mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan infrastruktur digital.		<a href="#">kembangkan-diplomasi-digital</a>
108	Diplomasi ekonomi	2020	8-Jan-2020	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	Jakarta	"Diplomasi ekonomi yang baik nantinya akan menjadi salah satu faktor pendukung bagi para eksportir untuk melakukan penetrasi pasar ke negara-negara di dunia."	Antara	<a href="https://www.antaranews.com/berita/1240783/lpe-i-gandeng-kemlu-dan-ui-tingkatkan-diplomasi-ekonomi">https://www.antaranews.com/berita/1240783/lpe-i-gandeng-kemlu-dan-ui-tingkatkan-diplomasi-ekonomi</a>
109	Diplomasi ekonomi	2020	8-Jan-2020	Kemlu	Jakarta	"Wakil Menteri Luar Negeri telah mendapatkan tugas khusus Presiden RI untuk memperkuat diplomasi ekonomi. Penugasan-penugasan konkret akan diberikan kepada para Kepala Perwakilan dalam memperkuat diplomasi ekonomi,"	Bisnis	<a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20200108/15/1188221/pidato-tahunan-2020-menlu-tekan-penguatan-diplomasi-ekonomi-jadi-prioritas">https://kabar24.bisnis.com/read/20200108/15/1188221/pidato-tahunan-2020-menlu-tekan-penguatan-diplomasi-ekonomi-jadi-prioritas</a>
110	Diplomasi ekonomi	2020	9-Jan-2020	Kemlu	Jakarta	Retno Marsudi saat menyampaikan pernyataan pers di Kementerian Luar Negeri, Selasa (9/1) menyampaikan pengembangan hubungan dengan Afrika, Asia Tengah, dan Afrika Selatan, dan Amerika Latin.	Kontan	<a href="https://nasional.kontan.co.id/news/diplomasi-ekonomi-indonesia-terus-diperkuat">https://nasional.kontan.co.id/news/diplomasi-ekonomi-indonesia-terus-diperkuat</a>
111	Diplomasi ekonomi	2020	9-Jan-2020	Presiden Joko Widodo	Jakarta	Presiden Jokowi: "Saya kira bapak ibu tahu semuanya mengenai ini, tetapi saya ingin kita semuanya fokus kepada diplomasi ekonomi. Saya ingin 70-80% apa yang kita miliki itu fokusnya di situ, diplomasi ekonomi karena itulah yang sekarang yang sedang diperlukan oleh negara kita,"	Detik	<a href="https://news.detik.com/berita/d-4852386/jokowi-buka-rapat-kerja-kepala-perwakilan-ri-dengan-kemlu-di-istana">https://news.detik.com/berita/d-4852386/jokowi-buka-rapat-kerja-kepala-perwakilan-ri-dengan-kemlu-di-istana</a>
112	Diplomasi ekonomi	2020	9-Jan-2020	Kemlu	Jakarta	"Titik berat 70% dari diplomasi diarahkan ke diplomasi ekonomi,"	Kontan	<a href="https://nasional.kontan.co.id/news/dubes-dapat-tugas-diplomasi-ekonomi-indonesia-sasar-sejumlah-perjanjian-dagang">https://nasional.kontan.co.id/news/dubes-dapat-tugas-diplomasi-ekonomi-indonesia-sasar-sejumlah-perjanjian-dagang</a>
113	Diplomasi ekonomi	2020	13-Jan-2020	Kemendag	Jakarta	Mendag Agus Suparmanto mengajak para kepala perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai mitra kerja Kementerian Perdagangan	Tribus	<a href="https://news.tribus.id/baca/3464/dongkrak-ekspor-mendag-agus-ajak-perwakilan-ri-di-luar-negeri-lakukan-diplomasi-ekonomi">https://news.tribus.id/baca/3464/dongkrak-ekspor-mendag-agus-ajak-perwakilan-ri-di-luar-negeri-lakukan-diplomasi-ekonomi</a>

						untuk melakukan diplomasi ekonomi guna meningkatkan ekspor Indonesia. Para perwakilan Indonesia tersebut antara lain Duta Besar, Konsulat Jenderal, Atase Perdagangan, Indonesia Trade Promotion Center (ITPC), dan para pejabat fungsional ekonomi.		
114	Diplomasi ekonomi	2020	19-Jan-2020	Kemlu		Wamenlu menambahkan bahwa Inggris menjadi prioritas penting bagi penguatan diplomasi ekonomi Indonesia di kawasan Eropa.	Antara	<a href="https://www.antaranews.com/berita/1676638/indonesia-china-fokuskan-diplomasi-tti">https://www.antaranews.com/berita/1676638/indonesia-china-fokuskan-diplomasi-tti</a>
115	Diplomasi perdagangan	2020	15-Jan-2020	Kementan	Jakarta	Untuk mendukung akselerasi ekspor hasil pertanian tersebut, Prihasto akan mengoptimalkan penataan kawasan, perbaikan pascapanen, dan memperkuat diplomasi perdagangan.	Tribun	<a href="https://jabar.tribunnews.com/2020/01/15/pacu-ekspor-mangga-asal-sumedang-ini-yang-dilakukan-kementerian-pertanian">https://jabar.tribunnews.com/2020/01/15/pacu-ekspor-mangga-asal-sumedang-ini-yang-dilakukan-kementerian-pertanian</a>
116	Diplomasi perdagangan	2020	18-Jan-2020	Kemlu		Dubes Djauhari Oratmangun: Menurut dia, diplomasi ekonomi Indonesia selama 2019 di Beijing berhasil meningkatkan nilai investasi inbound 81,3% dan nilai perdagangan kedua negara, dan sekaligus mempersempit defisit perdagangan Indonesia terhadap China. "Indonesia berhasil mendorong peningkatan ekspor sejumlah komoditas unggulan yang menjadi prioritas perdagangan luar negeri Indonesia, seperti sawit, buah-buahan, kopi, perikanan, rumput laut, sarang burung walet, batubara,"	Bisnis	<a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20200118/9/1191524/ini-capaihan-diplomasi-ekonomi-ri-di-china-2019">https://ekonomi.bisnis.com/read/20200118/9/1191524/ini-capaihan-diplomasi-ekonomi-ri-di-china-2019</a>
118	Diplomasi ekonomi	2020	21-Jan-2020	Kemlu	Jakarta	Wamenlu bahas diplomasi ekonomi dengan delegasi parlemen Norwegia: Dalam kesempatan ini, telah dilakukan pertukaran pandangan terhadap isu-isu regional dan global seperti perang dagang, belt and road initiative, reformasi PBB, dan isu-isu bilateral	Liputan 6	<a href="https://www.liputan6.com/global/read/4162602/wamenlu-ri-bahas-diplomasi-ekonomi-dengan-delegasi-parlemen-norwegia">https://www.liputan6.com/global/read/4162602/wamenlu-ri-bahas-diplomasi-ekonomi-dengan-delegasi-parlemen-norwegia</a>

						seperti kerja sama Indonesia-EFTA CEPA dan kelapa sawit.		
119	Diplomasi ekonomi	2020	22-Jan-2020	BKPM	Davos	Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Thomas Trikasih Lembong menjelaskan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Indonesia Pavilion adalah untuk meyakinkan serta menggiring sentimen positif para investor dan para penggiat ekonomi dunia terhadap kondisi ekonomi Indonesia di tengah isu perang dagang AS – China, Politik dalam negeri (Pemilu) serta fluktuasi harga minyak dunia yang mempengaruhi nilai tukar rupiah.	Bisnis	<a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20190123/12/881285/wef-2019-indonesia-pavilion-kembali-ditampilkan">https://ekonomi.bisnis.com/read/20190123/12/881285/wef-2019-indonesia-pavilion-kembali-ditampilkan</a>
120	Diplomasi perdagangan	2020	24-Jan-2020	Kemenko Marves	Davos	"Dari 41 persen yang dimiliki oleh petani kecil, saya kira itu mengurangi angka kemiskinan di Indonesia, dan itu karena kelapa sawit,"	Tempo	<a href="https://bisnis.tempo.co/read/1299115/wef-di-davos-luhut-sebut-kebijakan-sawit-ri-tak-rusak-lingkungan/full&amp;view=ok">https://bisnis.tempo.co/read/1299115/wef-di-davos-luhut-sebut-kebijakan-sawit-ri-tak-rusak-lingkungan/full&amp;view=ok</a>
121	Diplomasi ekonomi	2020	30-Jan-2020	Kemlu	Jakarta	Tugas Kementerian Luar Negeri (Kemlu) adalah memberikan perlindungan bagi investasi tersebut. Bagaimana caranya? Retno menyebut ada yang disebut dengan istilah prioritas 4+1. Apa itu? Pertama adalah diplomasi ekonomi, kedua diplomasi perlindungan dengan badan hukum Indonesia di luar negeri. Ketiga adalah kedaulatan dan kebangsaan. "Empat peningkatan peran Indonesia di kawasan dan global, kelima penguatan infrastruktur dan diplomasi,"	IDN Times	<a href="https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/apa-sih-pentingnya-diplomasi-dalam-pertumbuhan-ekonomi/3">https://www.idntimes.com/business/economy/helmi/apa-sih-pentingnya-diplomasi-dalam-pertumbuhan-ekonomi/3</a>
122	Diplomasi ekonomi	2020	31-Jan-2020	KADIN		"Menurut saya kebijakan presiden sudah tepat. Karena diplomasi ekonomi kunci dari diplomasi politik luar negeri kita ke depan."	Detik	<a href="https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4880583/pengusaha-ingin-dubes-tak-cuma-pandai-dagang-tapi-juga-jadi-intel">https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4880583/pengusaha-ingin-dubes-tak-cuma-pandai-dagang-tapi-juga-jadi-intel</a>
123	Diplomasi ekonomi	2020	7-Feb-2020	Kemlu	Jakarta	"Pemerintah kita sekarang memprioritaskan diplomasi ekonomi. Kita berharap peluang ini benar-benar dimanfaatkan oleh daerah seperti Riau,"	Riau Mandiri	<a href="https://riaumandiri.haluan.co/read/detail/80591/prioritaskan-diplomasi-ekonomi-kemenlu-ajak-riau-promosi-ke-luar-">https://riaumandiri.haluan.co/read/detail/80591/prioritaskan-diplomasi-ekonomi-kemenlu-ajak-riau-promosi-ke-luar-</a>

124	Diplomasi perdagangan	2020	10-Feb-2020	Kementan	Purwakarta	"Mulai dari panduan SOP budidaya, perijinan ekspor, registrasi kebun atau lahan, promosi hingga diplomasi perdagangan terus kami lakukan untuk mendukung ekspor,"	Republika	<a href="https://republika.co.id/berita/q5gxen423/kementan-dorong-ekspor-anggrek">https://republika.co.id/berita/q5gxen423/kementan-dorong-ekspor-anggrek</a>
125	Diplomasi ekonomi	2020	12-Feb-2020	Kemlu	Jakarta	"Jelas, dalam rapat ini kami juga akan membahas berbagai target politik luar negeri kita, tak terkecuali diplomasi ekonomi. Jadi misalnya negara X tahun ini targetnya apa dan kita mau masukin produk apa itu akan dibahas beberapa hari ini."	CNN Indonesia	<a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180212140725-106-275588/jokowi-tegur-dubes-agar-genjot-nilai-ekspor-indonesia">https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180212140725-106-275588/jokowi-tegur-dubes-agar-genjot-nilai-ekspor-indonesia</a>
126	Diplomasi perdagangan	2020	18-Feb-2020	Kemendag	Brussels	"Kesepakatan ini akan menjadi jalan untuk mewujudkan kepentingan indonesia di dunia perdagangan internasional, khususnya di Uni Eropa." Pernyataan itu Jerry sampaikan sehubungan dengan perkembangan positif proposal diplomasi perdagangan Indonesia setelah menemui Komisioner Perdagangan Uni Eropa.	Kompas	<a href="https://money.kompas.com/read/2020/02/19/203007726/wamen-dag-jerry-sambuaga-sukses-ajak-komisioner-uni-eropa-percepat-penyelesaian?page=all">https://money.kompas.com/read/2020/02/19/203007726/wamen-dag-jerry-sambuaga-sukses-ajak-komisioner-uni-eropa-percepat-penyelesaian?page=all</a>
127	Diplomasi ekonomi	2020	20-Feb-2020	Kemlu	Jakarta	"Kita harus siap dengan sistem hukum yang memadai. Karena permintaan dari Presiden Joko Widodo supaya kita meningkatkan diplomasi ekonomi, dan salah satu poin adalah hukum perdamaian internasional ini,"	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/internasional/asia/yNLGq3PK-hukum-perdata-internasional-dapat-perkuat-diplomasi-ekonomi-ri">https://www.medcom.id/internasional/asia/yNLGq3PK-hukum-perdata-internasional-dapat-perkuat-diplomasi-ekonomi-ri</a>
129	Diplomasi perdagangan	2020	4-Mar-2020	Kementerian Perindustrian (Kemenperin )	Jakarta	"Solusi dalam jangka pendek, kita mesti melakukan diplomasi perdagangan agar dapat meningkatkan ekspor produk-produk industri Indonesia ke negara atau pasar alternatif,"	Tempo	<a href="https://bisnis.tempo.co/read/1315580/ekspor-ke-cina-terancam-anjlok-indonesia-lirik-afrika-dan-turki">https://bisnis.tempo.co/read/1315580/ekspor-ke-cina-terancam-anjlok-indonesia-lirik-afrika-dan-turki</a>
130	Diplomasi perdagangan	2020	4-Mar-2020	Kemenperin	Jakarta	"Diplomasi perdagangan [dilakukan] agar dapat meningkatkan ekspor produk-produk industri Indonesia ke negara atau pasar alternatif,"	Bisnis	<a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20200305/257/1209379/pemerintah-cari-pasar-baru-khawatir-ekspor-ke-china-melotot">https://ekonomi.bisnis.com/read/20200305/257/1209379/pemerintah-cari-pasar-baru-khawatir-ekspor-ke-china-melotot</a>
131	Diplomasi perdagangan	2020	5-Mar-2020	Kementan	Jakarta	Pihaknya pun menegaskan bahwa dibukanya	Republika	<a href="https://republika.co.id/berita/q6pu4370/soal-impor-bawang">https://republika.co.id/berita/q6pu4370/soal-impor-bawang</a>

						kesempatan untuk mengimpor bawang putih dari India murni sebagai alternatif pasar China. Tidak berkaitan dengan diplomasi perdagangan antara Indonesia dan China soal komoditas sawit. Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah mempermudah proses impor gula dari India sebagai imbalan atas diterimanya produk sawit asal Indonesia di India.		<a href="#">putih-india-importir-lebih-baik-lokal</a>
132	Diplomasi ekonomi	2020	12-Mar-2020	Kemlu	Jakarta	Keduanya menekankan, Indonesia perlu menggencarkan strategi diplomasi ekonomi. Indonesia perlu menyusun langkah-langkah strategis, dan secara taktis bertindak untuk meningkatkan nilai TTI RI-China di tahun 2020.	Rakyat Merdeka	<a href="https://rmco.id/baca-berita/internasional/30050/covid-19-di-china-mereda-ri-harus-gencarkan-strategi-diplomasi-ekonomi">https://rmco.id/baca-berita/internasional/30050/covid-19-di-china-mereda-ri-harus-gencarkan-strategi-diplomasi-ekonomi</a>
133	Diplomasi ekonomi	2020	23-Mar-2020	Kemlu		Ini menjadi esensi dari diplomasi ekonomi dan bagaimana seluruh instrumen dan elemen serta leverage yang ada di dalam kebijakan luar negeri kita bisa juga mendorong kepentingan ekonomi kita. Ini yang perlu kita sadari.	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/internasional/asean/4bam74rb-diplomasi-indonesia-di-tengah-wabah-korona">https://www.medcom.id/internasional/asean/4bam74rb-diplomasi-indonesia-di-tengah-wabah-korona</a>
134	Diplomasi perdagangan	2020	31-Mar-2020	Pelaku/Asosiasi Usaha	Jakarta	Jumlah tersebut perlu dipenuhi melalui bantuan pemerintah dengan memperkuat diplomasi perdagangan bahan baku dari negara produsen.	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNx47D1N-18-perusahaan-teknologi-bisnis-apd">https://www.medcom.id/ekonomi/bisnis/VNx47D1N-18-perusahaan-teknologi-bisnis-apd</a>
135	Diplomasi ekonomi	2020	16-Apr-2020	Kemlu	Jakarta	Untuk prioritas pertama, kata Retno, Indonesia ingin memastikan lockdown yang dilakukan oleh berbagai negara tidak mengganggu lalu lintas perdagangan dan rantai pasokan. Hal ini sangat penting mengingat pasokan medis saat ini sangat terbatas.	Kumparan	<a href="https://kumparan.com/kumparan/news/menlu-retno-paparkan-dua-prioritas-diplomasi-ri-dalam-menghadapi-virus-corona-1tEZX3z2FTk/full">https://kumparan.com/kumparan/news/menlu-retno-paparkan-dua-prioritas-diplomasi-ri-dalam-menghadapi-virus-corona-1tEZX3z2FTk/full</a>
136	Diplomasi ekonomi	2020	8-May-2020	BKPM	Jakarta	“Di tengah pandemi memang agaknya berat untuk kita mengharapkan investasi baru, masuk. Maka, BKPM membuat langkah-langkah yang terukur untuk melakukan sebuah fokus	Rakyat Merdeka	<a href="https://rmco.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/34691/bahlil-akui-sulit-dapat-investor-baru-di-masa-corona">https://rmco.id/baca-berita/ekonomi-bisnis/34691/bahlil-akui-sulit-dapat-investor-baru-di-masa-corona</a>

						pada investasi yang sudah jalan yang progresnya sudah 60 persen atau sudah 70 persen,"		
137	Diplomasi ekonomi	2020	20-May-2020	Bank Indonesia (BI)	Jakarta	"Peningkatan peran dan penguatan posisi Indonesia dalam kerja sama internasional melalui jalur diplomasi ekonomi yang efektif akan mendukung terjaganya kepentingan nasional dan persepsi positif terhadap Indonesia,"	Bisnis	<a href="https://ekonomi.bisnis.com/read/20200520/9/1243086/gubernur-bi-dan-menlu-perkuat-kerja-sama-diplomasi-ekonomi-di-masa-covid-19">https://ekonomi.bisnis.com/read/20200520/9/1243086/gubernur-bi-dan-menlu-perkuat-kerja-sama-diplomasi-ekonomi-di-masa-covid-19</a>
138	Diplomasi perdagangan	2020	5-Jun-2020	Kemlu	Kemlu	Indonesia harus bisa mengambil pelajaran dan menciptakan peluang dari pandemi COVID-19, khususnya di bidang ekonomi. "Utamanya kita ingin dorong investasi yang ada di Indonesia, tetapi kita juga ingin dorong investasi dari luar negeri yang bisa memanfaatkan perkembangan yang ada yaitu (besarnya) pasar di Indonesia sekaligus menggunakan Indonesia sebagai hub di kawasan maupun global."	Realita Rakyat	<a href="https://realitarakyat.com/2020/06/05/wamenlu-indonesia-harus-manfaatkan-krisis-covid-19-untuk-lakukan-reformasi/">https://realitarakyat.com/2020/06/05/wamenlu-indonesia-harus-manfaatkan-krisis-covid-19-untuk-lakukan-reformasi/</a>
139	Diplomasi perdagangan	2020	20-Jun-2020	Kementan	Jakarta	Pertama peningkatan diplomasi perdagangan, promosi, investasi, dan ekspor. Kedua, peningkatan sertifikasi Good Agricultural Practice (GAP), Ketiga Good Handling Practices (GHP), serta organik.	Republika	<a href="https://republika.co.id/berita/qcb_1md380/kementan-kembangkancold-chain-komoditas-hortikultura">https://republika.co.id/berita/qcb_1md380/kementan-kembangkancold-chain-komoditas-hortikultura</a>
140	Diplomasi ekonomi	2020	5-Jul-2020	Kemlu	Jakarta	"Ekonomi internasional sedang dalam kondisi buruk, maka diplomasi ekonomi Indonesia harus berjalan kreatif. Kita harus bisa mengisi ruang-ruang yang ada di luar sana, meski memang relatif mengecil,"	Medcom	<a href="https://www.medcom.id/internasional/asean/dN60mqpk-kemenlu-prioritaskan-kepentingan-nasional-di-tengah-pandemi">https://www.medcom.id/internasional/asean/dN60mqpk-kemenlu-prioritaskan-kepentingan-nasional-di-tengah-pandemi</a>
141	Diplomasi ekonomi	2020	6-Jul-2020	Kementerian Keuangan		"...melakukan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Upaya ini dilaksanakan dengan strategi meningkatkan efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/"	Kontan	<a href="https://nasional.kontan.co.id/news/begini-strategi-kemenkeu-untuk-memperkuat-ketahanan-ekonomi-sampai-tahun-2024">https://nasional.kontan.co.id/news/begini-strategi-kemenkeu-untuk-memperkuat-ketahanan-ekonomi-sampai-tahun-2024</a>

						Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), dan diplomasi ekonomi."		
142	Diplomasi perdagangan	2020	12-Jul-2020	Kementerian	Yoga-karta	"Butuh penguatan market intelligence dan diplomasi perdagangan internasional untuk bisa mendobrak pasar dunia. Harus lebih cerdik dan progresif, jangan terlalu konservatif dalam mendorong protokol ekspor.	Jawa Pos	<a href="https://www.jawapos.com/ekonomi/15/07/2019/guru-besar-ipb-kebijakan-amran-menggebrak-pasar-ekspor-hortikultura/">https://www.jawapos.com/ekonomi/15/07/2019/guru-besar-ipb-kebijakan-amran-menggebrak-pasar-ekspor-hortikultura/</a>
143	Diplomasi ekonomi	2020	15-Jul-2020	Kemlu		Kepada Presiden Botswana, Dubes Salman menyatakan kesiapannya untuk bekerja dengan kalangan pemerintah, swasta, dan masyarakat madani Botswana guna lebih memperkuat kerja sama di segala bidang, terutama dengan meningkatkan kinerja diplomasi ekonomi.	CNN Indonesia	<a href="https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180715224450-127-314264/potensi-kerja-sama-ri-botswana-penghasil-berlian-diafrika">https://www.cnnindonesia.com/internasional/20180715224450-127-314264/potensi-kerja-sama-ri-botswana-penghasil-berlian-diafrika</a>
144	Diplomasi ekonomi	2020	17-Jul-2020	Kementerian BUMN	Jakarta	Kementerian BUMN tandatangan MoU Kerja sama Diplomasi Ekonomi dengan Kementerian Luar Negeri buat dukung BUMN Go Global	Kontan	<a href="https://nasional.kontan.co.id/news/erick-thohir-aspek-kesehatan-dan-ekonomi-perlu-berjalan-seiring-di-era-covid-19">https://nasional.kontan.co.id/news/erick-thohir-aspek-kesehatan-dan-ekonomi-perlu-berjalan-seiring-di-era-covid-19</a>
145	Diplomasi perdagangan	2020	3-Aug-2020	Kemlu	Jakarta	"Diplomasi sawit perlu diterapkan untuk membuka dan menjamin akses pasar bagi minyak kelapa sawit Indonesia, dengan melakukan pendekatan diplomasi ke negara-negara tujuan utama ekspor minyak kelapa sawit, seperti India dan China,"	Bisnis	<a href="https://kabar24.bisnis.com/read/20200803/15/1274401/ekspansi-pasar-kemenlu-gencarkan-diplomasi-sawit">https://kabar24.bisnis.com/read/20200803/15/1274401/ekspansi-pasar-kemenlu-gencarkan-diplomasi-sawit</a>
146	Diplomasi perdagangan	2020	6-Aug-2020	Kemendag	Jakarta	Wamendag Jerry Sambuaga: tim yang melibatkan pengusaha dan pemerintah untuk menangkal kampanye negatif sawit Indonesia	Kontan	<a href="https://nasional.kontan.co.id/news/hadapi-kampanye-negatif-kemendag-siap-bentuk-tim-kampanye-positif-sawit-indonesia">https://nasional.kontan.co.id/news/hadapi-kampanye-negatif-kemendag-siap-bentuk-tim-kampanye-positif-sawit-indonesia</a>
147	Diplomasi ekonomi	2020	16-Aug-2020	Kemlu		"Beberapa kegiatan diplomasi ekonomi bidang TTI di tengah pandemi COVID-19 terus dilakukan KBRI Beijing melalui terobosan-terobosan baru dan media virtual bekerja sama dengan mitra di Tiongkok, antara lain promosi investasi dan pariwisata secara daring	Viva	<a href="https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1293723-peluang-baru-hubungan-ekonomi-ri-dan-china-saat-pandemi-apa-saja">https://www.viva.co.id/berita/bisnis/1293723-peluang-baru-hubungan-ekonomi-ri-dan-china-saat-pandemi-apa-saja</a>

					ataupun melakukan penjualan produk Indonesia dengan memanfaatkan platform digital dan influencer."		
148	Diplomasi ekonomi	2020	28-Aug-2020	BI	Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan diplomasi ekonomi menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong UMKM sebagai sumber ekonomi.	Katadata	<a href="https://katadata.co.id/febrinaiska_na/berita/5f49ef7a56956/bi-dan-kemenlu-tingkatkan-diplomasi-demi-dongkrak-ekspor-produk-umkm">https://katadata.co.id/febrinaiska_na/berita/5f49ef7a56956/bi-dan-kemenlu-tingkatkan-diplomasi-demi-dongkrak-ekspor-produk-umkm</a>



- [!\[\]\(930a2430534a50aa4b851ea0dd169638\_img.jpg\) csis.or.id](http://csis.or.id)
- [!\[\]\(367d18876612294b087c277e9925f95c\_img.jpg\) csis@csis.or.id](mailto:csis@csis.or.id)
- [!\[\]\(63f155138b1ae86d642888238d6c8962\_img.jpg\) @csisindonesia](https://twitter.com/csisindonesia)
- [!\[\]\(0c8a940970214c07c904b8ed2cf7a9a3\_img.jpg\) CSIS Indonesia](https://www.linkedin.com/company/csis-indonesia)

**Centre for Strategic and  
International Studies  
(CSIS Indonesia)**

Jl Tanah Abang III No 23-27  
Gambir, Jakarta Pusat 10160  
Indonesia